Volume 10 No. 2, Desember 2011 ISSN 1411-514X

Trikonomika
Jurnal Ekonomi

Keseimbangan Jangka Panjang antara Variabel Makro Ekonomi dengan Indeks Harga Saham
R. Adisetiawan

Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita
Saparuddin M.

Analisis Penawaran Tenaga Kerja Dosen PTN di Luar Tugas Pokok PNS
Madris

Determinan dan Strategi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi
Caska

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur *Audit*
Deddy Supardi

Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Perusahaan *Go Public* Berbasis Pendekatan *Multinomial Logit*
Jaja Suteja

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar
Zulki Zulkifli Noor

Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia
Tete Saepudin

Keterjangkauan Perumahan di Indonesia
Endang Rostiana

Terakreditasi Dikti dengan Nomor 110/DIKTI/Kep/2009
Tanggal 5 Desember 2009

ISSN 1411-514X

TRIKONOMIKA

Jurnal Ekonomi

Volume 10, No. 2, Desember 2011

PELINDUNG
H. R. Abdul Maqin

PIMPINAN UMUM
H. Jaja Suteja

DEWAN REDAKSI
H. Tb. Hasanudin
H. M. Sidik Priadana
H. Azhar Affandi
Hj. Ellen Rusliati
Atty Tri Juniarti
Hj. Liza Laila Nurwulan
Horas Djulius

PENYUNTING PELAKSANA
Endang Rostiana

STAF REDAKSI
Lilis Nurlela
Lili Iskandar

PENERBIT
Badan Penerbit Buku dan Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Trikonomika terbit pertama kali tahun 2000, merupakan Jurnal Ekonomi yang menyajikan artikel hasil penelitian (empiris) serta hasil gagasan konseptual terkini yang mencakup ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Trikonomika terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Naskah yang masuk akan ditelaah oleh mitra bebestari yang relevan. Daftar nama mitra bebestari akan dicantumkan pada lembar Ucapan Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Badan Penerbit Buku dan Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan,
Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung - 40116. Telp. 081322406181, 022-4233646, Fax. 022-4208363,
E-mail: Trikonomika@yahoo.com

Percetakan: Badan Penerbit Buku dan Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
Untuk berlangganan dan pembelian, kirimkan Formulir Berlangganan
dan Berita Pengiriman Uang Langganan ke alamat Redaksi.
Harga Langganan per eksemplar (nomor) Rp 50.000,00

ISSN 1411-514X

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pakar yang telah menjadi mitra bebestari pada Jurnal Trikonomika Volume 10, No. 1 dan 2 tahun 2011. Berikut ini adalah daftar nama mitra bebestari yang berpartisipasi:

- H. Ginanjar Kartasasmita, Anggota Wantimpres Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah.
- Hj. Ria Ratna Ariawati, ASDIR II Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- H. Agus Suroso, ASDIR II Program Pascasarjana Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- H. Maman Haeruman, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Basri Modding, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Djoko Suhardjanto, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Unti Ludigdo, Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang.
- H. Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

ISSN 1411-514X

DAFTAR ISI

Trikonomika, Volume 10, No. 2, Desember 2011

Keseimbangan Jangka Panjang antara Variabel Makro Ekonomi dengan Indeks Harga Saham
R. Adisetiawan 72–84

Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita
Saparuddin M. 85–94

Analisis Penawaran Tenaga Kerja Dosen PTN di Luar Tugas Pokok PNS
Madris 95–104

Determinan dan Strategi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi
Caska 105–115

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur *Audit*
Deddy Supardi 116–127

Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Perusahaan *Go Public* Berbasis Pendekatan *Multinomial Logit*
Jaja Suteja 128–138

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar
Zulki Zulkifli Noor 139–147

Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia
Tete Saepudin 148–161

Keterjangkauan Perumahan di Indonesia
Endang Rostiana 162–175

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 72–84
ISSN 1411-514X

Keseimbangan Jangka Panjang antara Variabel Makro Ekonomi dengan Indeks Harga Saham

R. Adisetiawan
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
Jl. Slamet Riyadi, Broni – Kota Jambi 36122
E-Mail: r.adisetiawan@yahoo.co.id

ABSTRACT

The economic condition of a good country usually characterized by the reduced amount of money in circulation, declining inflation, a stronger exchange rate of IDR/USD, as well as the decline in interest rates. This study aims to determine whether there is a balance of long-term and simultaneous relationships between macroeconomic variables (inflation, BI rate, 1-month deposit interest rate, money supply and exchange rate IDR/USD) to Composite Stock Price Index (CSPI) on the Stock Exchange Indonesia using the cointegration test and Vector Auto Regression (VAR) for the period 1995-2011. Cointegration test shows that there is a strong long-term balance between macroeconomic variables in the study of the JCI, while the test results of an analysis using Vector Auto Regression (VAR) indicates that there is an interplay of simultaneous relationships between macroeconomic variables in the study by CSPI.

Keywords: macro economic variables, JCI, stationarity, cointegration, Vector Auto Regression (VAR).

ABSTRAK

Kondisi perekonomian suatu negara yang bagus biasanya ditandai dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, menurunnya angka inflasi, menguatnya kurs IDR/USD, serta penurunan tingkat suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan jangka panjang dan hubungan simultan antara variabel makro ekonomi (tingkat inflasi, BI *rate*, suku bunga deposito 1 bulan, jumlah uang beredar dan nilai tukar IDR/USD) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan uji kointegrasi dan *Vector Auto Regression* (VAR) selama periode 1995-2011. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan jangka panjang yang kuat antara variabel makro ekonomi dalam penelitian terhadap IHSG, sedangkan hasil analisis dengan menggunakan uji *Vector Auto Regression* (VAR) menunjukkan bahwa terdapat hubungan simultan yang saling keterkaitan antara variabel makro ekonomi dalam penelitian dengan IHSG.

Kata Kunci: variabel makro ekonomi, IHSG, stasioneritas, kointegrasi, *Vector Auto Regression* (VAR).

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu negara, karena pasar modal merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar yang sekaligus merefleksikan kondisi sektor riil pada negara yang bersangkutan, hal ini dapat terukur dari pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek suatu negara (Anoraga, 2003). Demikian juga di Indonesia, situasi pasar modal secara umum ditandai dengan pergerakan harga saham yang tercatat bursa efek (Darmadji, 2001).

Pertumbuhan ekonomi yang melambat, hal ini juga ditandai dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar (M2), meningkatnya angka inflasi, melemahnya kurs IDR/USD, serta kenaikan tingkat suku bunga merupakan faktor-faktor penyebab buruknya kinerja pasar modal, karena indikator-indikator makro ekonomi tersebut ikut serta memberikan andil yang kuat bagi pertumbuhan pasar modal (Samsul, 2002). Realitas ini terlihat pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama periode 1995-2011. Ketika kondisi fundamental ekonomi mengalami perbaikan, maka Indeks Harga Saham Gabungan juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dari kecenderungan meningkatnya IHSG selama periode 1995-2011, bahkan pada bulan Juli 2011 indeks harga saham mencapai *level* 4.130,80 *point* yang merupakan *level* tertinggi selama 16 tahun terakhir. Kenaikan indeks harga saham di lantai Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat telah memperkuat opini bahwa pasar modal telah berhasil mengaktualisasikan sebagai instrumen ekonomi yang dapat bermanfaat bagi kepentingan roda perekonomian negara Indonesia. Kenaikan indeks harga saham ini diikuti oleh menguatnya kurs IDR/USD yang berada pada *level* Rp 2.209,63 pada bulan Januari 1995 dan ditutup pada *level* Rp 9.029,36 pada bulan Desember 2011 (Bank Sentral Indonesia, 2012). Kondisi kurs IDR/USD yang cenderung menguat ini disertai dengan menurunnya angka inflasi dari 9,54% pada bulan Januari 1995 menjadi 3,79% di bulan Desember 2011. Kestabilan kurs sangat penting untuk mendorong kelancaran berputarnya roda kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Kestabilan akan tercapai apabila sensitivitas kurs di pasar terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya terjadi secara wajar (Hendarsah, 2005). Oleh karena itu, bank sentral berperan penting dalam menjaga kestabilan jangka panjang nilai tukar IDR/USD yang bersandar pada instrumen kebijakan moneter yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel makro ekonomi sudah mulai masuk dalam keseimbangan jangka panjang yang diharapkan pemerintah (Therik, 2004).

Menurut Iswardono (1997), salah satu kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk dapat mengendalikan laju inflasi adalah membatasi pertumbuhan jumlah uang yang beredar (M2) dan tingkat suku bunga. Pada dasarnya, tujuan pemerintah menaikkan BI *rate* adalah untuk meredam melemahnya kurs IDR/USD dan menekan laju inflasi, agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Apabila jumlah uang beredar di masyarakat meningkat, maka ada kecenderungan masyarakat untuk berspekulasi membeli dollar Amerika, hal ini akan berdampak melemahnya kurs IDR/USD. Di samping itu, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka masyarakat akan terdorong untuk menggunakan uangnya untuk dikonsumsi. Hal ini akan menyebabkan permintaan akan barang dan jasa meningkat lebih besar dibandingkan penawaran barang dan jasa tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat diikuti dengan peningkatan angka inflasi. Sebaliknya, tingkat inflasi dapat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Apabila tingkat inflasi terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok secara umum, maka masyarakat membutuhkan lebih banyak uang ditangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, akibatnya jumlah uang yang beredar akan meningkat (Nopirin, 1992). Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk meredam meningkatnya laju inflasi dan melemahnya

kurs IDR/USD. Kenaikan BI *rate* akan diikuti pula dengan kenaikan suku bunga deposito, karena apabila kenaikan tingkat BI *rate* tidak diikuti oleh kenaikan suku bunga deposito, maka ada kecenderungan pemilik modal akan mengalihkan modalnya ke pasar modal, yang tentunya akan berakibat positif terhadap pasar modal yang ditandai dengan kenaikan indeks harga saham. Investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya di pasar modal karena *return* yang akan diterima lebih besar dibandingkan dengan *return* yang diperoleh dari bunga deposito, walaupun dengan tingkat risiko yang lebih besar (Sirait, 2004).

Melihat hal di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan dan simultan jangka panjang antara variabel makro ekonomi, yaitu jumlah uang beredar (M2), suku bunga deposito, BI *rate*, kurs IDR/USD, dan angka inflasi terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 1995-2011.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang menggunakan data bulanan dokumenter dari Bank Indonesia dan Statistik Pasar Modal selama 16 tahun, yaitu periode Januari 1995 hingga Desember 2011. Data yang dipergunakan di antaranya harga penutupan nilai IDR/USD, angka inflasi, jumlah uang beredar (M2), suku bunga deposito 1 bulan dan BI *rate* yang diperoleh melalui Statistik dan Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia (SEKI), harga penutupan bulanan IHSG diperoleh dari Statistik Pasar Modal.

Pengujian penelitian ini di antaranya adalah pengujian stasioneritas data (*Unit Root Test*). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak, yaitu dengan membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi statistik McKinnon, sehingga model regresi yang diperoleh mempunyai kemampuan prediksi yang andal (Gujarati, 1995 dalam Sudjono, 2005). Langkah-langkah pengujian stasioneritas data adalah:

1) Mengasumsikan model sebagai berikut:

$$\Delta M2_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma M2_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta M2_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta DEPO_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma DEPO_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta DEPO_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta SBI_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma SBI_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta SBI_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta KURS_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma KURS_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta KURS_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta INF_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma INF_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta INF_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\Delta IHSG_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma IHSG_{t-1} + \sum_{i=2}^{2} \beta_i \Delta IHSG_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dengan:

$M2_t$: data jumlah uang beredar M2 saat ini
$M2_{t-1}$: data jumlah uang beredar satu periode sebelumnya
$\Delta M2_t$: $M2_t - M2_{t-1}$
$DEPO_t$: data suku bunga deposito 1 bulan saat ini;
$DEPO_{t-1}$: data suku bunga deposito 1 bulan satu periode sebelumnya;
$\Delta DEPO_t$: $DEPO_t - DEPO_{t-1}$;
SBI_t : data suku bunga SBI saat ini;
SBI_{t-1} : data suku bunga SBI satu periode sebelumnya;
ΔSBI_t : $SBI_t - SBI_{t-1}$;
$KURS_t$: data kurs IDR/USD saat ini;
$KURS_{t-1}$: data kurs IDR/USD satu periode sebelumnya;
$\Delta KURS_t$: $KURS_t - KURS_{t-1}$;
INF_t : data tingkat inflasi saat ini;
INF_{t-1} : data tingkat inflasi satu periode sebelumnya;
ΔINF_t : $INF_t - INF_{t-1}$;
$IHSG_t$: data Indeks Harga Saham Gabungan saat ini;
$IHSG_{t-1}$: data IHSG satu periode sebelumnya;
$\Delta IHSG_t$: $IHSG_t - IHSG_{t-1}$;
α : konstanta;
β, γ : koefisien;
εt : *error term*;
T : *trend* waktu.

Panjang lag yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan standar (*default*).

2) Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi statistik McKinnon.

Data dikatakan telah stasioner pada *level* (I(0)) apabila:

Nilai absolut statistik ADF > nilai kritis statistik McKinnon.

Data dikatakan tidak stasioner atau masih memiliki akar unit (*unit root*) pada *level* (I(0)) apabila:

Nilai absolut statistik ADF < nilai kritis statistik McKinnon.

3) Apabila dari hasil uji ADF diperoleh data belum stasioner, maka perlu dilakukan *first difference*. Apabila dari hasil uji ternyata data *first difference* belum stasioner, maka dilakukan *second difference* pada data tersebut. Cara ini dilakukan sampai diperoleh data yang stasioner.

Pengujian kedua adalah pengujian keseimbangan jangka panjang (*Cointegration Test*). Menurut Ajayi dan Mougoué (1996) dalam Sudjono (2005), uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, antara variabel-variabel makro ekonomi dengan IHSG di Bursa Efek Indonesia, maka dilakukan uji kointegrasi yang dikembangkan Johansen (*Johansen's Cointegration Test*). Salah satu syarat untuk melakukan uji kointegrasi adalah variabel-variabel yang digunakan tidak memiliki akar unit dan berintegrasi pada derajat yang sama (Gujarati, 1995 dalam Sudjono, 2005). Model kointegrasi dalam penelitian ini adalah:

$$\Delta IHSG_t = \sum_{i=1} \Gamma_i \Delta IHSG_{t-1} + \prod IHSG_{t-k} + BM2_t + BDEPO_t + BSBI_t + BKURS_t + BINF_t + \varepsilon_t$$

Dengan: $\prod = \sum^4_{i=1} A_i - I$ dan $\Gamma = -\sum^4_{j=i+1} A_j$

Ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji *Trace Statistic* dan *Maximum Eigenvalue*. Apabila nilai hitung *Trace Statistic* dan *Maximum Eigenvalue* lebih besar daripada nilai kritisnya, maka terdapat kointegrasi pada sejumlah variabel, sebaliknya jika nilai hitung *Trace Statistic* dan *Maximum Eigenvalue* lebih kecil daripada nilai kritisnya maka tidak terdapat kointegrasi.

Uji *Vector Auto Regression* (VAR) dilakukan untuk peramalan dari hubungan data runtut waktu, model VAR mengikuti sebagaimana dilakukan Ajayi dan Mougoué (1996), Hermanto (1999), Ansari dan Gang (1999). Pada penelitian ini model VAR digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan simultan antara variabel makro ekonomi sebagai variabel eksogen dengan IHSG sebagai variabel endogen dengan memasukkan unsur waktu (*lag*). Persamaan VAR dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} IHSG_t &= a_{11}IHSG_{t-1} + a_{12}M2_{t-1} + a_{12}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{12}SBI_{t-1} + a_{12}KURS_{t-1} + a_{12}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{11}IHSG_{t-2} + b_{12}M2_{t-2} + b_{12}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{12}SBI_{t-2} + b_{12}KURS_{t-2} + b_{12}INF_{t-2} + c_1 + \varepsilon_{1,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M2_t &= a_{21}IHSG_{t-1} + a_{22}M2_{t-1} + a_{22}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{22}SBI_{t-1} + a_{22}KURS_{t-1} + a_{22}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{21}IHSG_{t-2} + b_{22}M2_{t-2} + b_{22}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{22}SBI_{t-2} + b_{22}KURS_{t-2} + b_{22}INF_{t-2} + c_2 + \varepsilon_{2,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DEPO_t &= a_{21}IHSG_{t-1} + a_{22}M2_{t-1} + a_{22}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{22}SBI_{t-1} + a_{22}KURS_{t-1} + a_{22}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{21}IHSG_{t-2} + b_{22}M2_{t-2} + b_{22}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{22}SBI_{t-2} + b_{22}KURS_{t-2} + b_{22}INF_{t-2} + c_2 + \varepsilon_{2,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SBI_t &= a_{21}IHSG_{t-1} + a_{22}M2_{t-1} + a_{22}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{22}SBI_{t-1} + a_{22}KURS_{t-1} + a_{22}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{21}IHSG_{t-2} + b_{22}M2_{t-2} + b_{22}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{22}SBI_{t-2} + b_{22}KURS_{t-2} + b_{22}INF_{t-2} + c_2 + \varepsilon_{2,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KURS_t &= a_{21}IHSG_{t-1} + a_{22}M2_{t-1} + a_{22}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{22}SBI_{t-1} + a_{22}KURS_{t-1} + a_{22}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{21}IHSG_{t-2} + b_{22}M2_{t-2} + b_{22}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{22}SBI_{t-2} + b_{22}KURS_{t-2} + b_{22}INF_{t-2} + c_2 + \varepsilon_{2,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} INF_t &= a_{21}IHSG_{t-1} + a_{22}M2_{t-1} + a_{22}DEPO_{t-1} + \\ &\quad a_{22}SBI_{t-1} + a_{22}KURS_{t-1} + a_{22}INF_{t-1} + \\ &\quad b_{21}IHSG_{t-2} + b_{22}M2_{t-2} + b_{22}DEPO_{t-2} + \\ &\quad b_{22}SBI_{t-2} + b_{22}KURS_{t-2} + b_{22}INF_{t-2} + c_2 + \varepsilon_{2,t} \end{aligned}$$

Dengan:

$M2_t$: data jumlah uang beredar M2 saat ini

$M2_{t-1}$: data jumlah uang beredar satu periode sebelumnya

$DEPO_t$: data suku bunga deposito1 bulan saat ini

$DEPO_{t-1}$: data suku bunga deposito 1 bulan satu periode sebelumnya
SBI_t : data suku bunga SBI saat ini
SBI_{t-1} : data suku bunga SBI satu periode sebelumnya
$KURS_t$: data kurs IDR/USD saat ini
$KURS_{t-1}$: data kurs IDR/USD satu periode sebelumnya
INF_t : data tingkat inflasi saat ini
INF_{t-1} : data tingkat inflasi satu periode sebelumnya
$IHSG_t$: data Indeks Harga Saham Gabungan saat ini
$IHSG_{t-1}$: data IHSG satu periode sebelumnya
a : konstanta
b dan c : koefisien
ε_t : *error term*

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan simultan antara variabel-variabel penelitian, dilakukan dengan membandingkan nilai $t_{statistik}$ masing-masing variabel penelitian dengan nilai t_{tabel}. Apabila nilai $t_{statistik}$ lebih besar daripada nilai t_{tabel}, maka menunjukkan bahwa variabel penelitian berpengaruh terhadap variabel lain yang diuji, sebaliknya, apabila nilai $t_{statistik}$ lebih kecil daripada nilai t_{tabel}, maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang diuji.

Berdasarkan model regresi uji kausalitas, maka hipotesis yang akan diuji adalah diduga terdapat keseimbangan dan simultan jangka panjang antara variabel inflasi, BI *rate*, suku bunga deposito 1 bulan, jumlah uang beredar (M2), kurs IDR/USD terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia periode 1995-2011

HASIL

Uji Stasioneritas

Hasil pengujian stasioneritas data variabel makro ekonomi dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1., terlihat bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai absolut $t_{statistik}$ ADF yang lebih besar daripada nilai t_{kritis} pada tabel McKinnon pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan kata lain, variabel makro ekonomi dan IHSG telah stasioner pada tingkat *level* atau berintegrasi pada derajat nol (I(0)), dengan tingkat kepercayaan 99%. Pada pengujian selanjutnya, variabel makro ekonomi dan IHSG diikutsertakan dalam pengujian, karena semua variabel penelitian memiliki derajat integrasi yang sama, yaitu derajat nol (I(0)) dengan tingkat kepercayaan 99%.

Uji Keseimbangan Jangka Panjang (*Cointegration Test*)

Hasil pengujian keseimbangan jangka panjang variabel makro ekonomi terhadap IHSG dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pengolahan data seperti terlihat pada pada Tabel 2. memperlihatkan bahwa terdapat empat vektor kointegrasi pada tingkat kepercayaan 1% di mana nilai estimasi *Trace Statistic* dan nilai *Maximum Eigenvalue* lebih besar daripada nilai kritisnya pada tingkat kepercayaan 1%. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang kuat antara variabel makro ekonomi terhadap IHSG selama periode 1995-2011, yang berarti bahwa IHSG tetap stabil selama periode penelitian (Doriyanto, 1999).

Dari hasil uji kointegrasi dapat dihasilkan persamaan kointegrasi setelah dinormalisasikan, menghasilkan parameter jangka panjang sebagai berikut:

$$IHSG = 0{,}002INF + 0{,}329SBI - 0{,}218DEPO1 + 1{,}191M2 - 0{,}441KURS$$

Uji Hubungan Simultan (*Vector Auto Regression*)

Hasil pengujian simultan antara variabel dapat dilihat pada Tabel 3.

PEMBAHASAN

Dari persamaan hasil regresi, dapat diketahui bahwa jumlah uang beredar (M2) memiliki bobot terbesar pertama dalam mempengaruhi IHSG dan memiliki nilai positif dalam vektor terkointegrasi, hasil ini konsisten dengan penelitian Hermanto dan Manurung (2002), Sulistiyo (2004) dan Nugroho (2008), yang menghasilkan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh positif terhadap pasar modal, hal ini dikarenakan uang yang beredar di Indonesia sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan investasi di pasar saham atau obligasi, sehingga kinerja pasar saham semakin membaik.

Tabel 1. Hasil Uji Akar Unit *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) pada tingkat *level*

Variabel	Nilai $t_{statistik}$ ADF	Nilai $t_{kristis}$ tabel McKinnon		
		1%	5%	10%
M2	2,074211	−3,465202	−2,876759	−2,574962
Depo1	−3,046831	−3,463749	−2,876123	−2,574622
BI *rate*	−3,343209	−3,463924	−2,876200	−2,574663
Kurs IDR/USD	−2,570696	−3,463576	−2,876047	−2,574581
Inflasi	−3,302816	−3,462901	−2,875752	−2,574423
IHSG	0,033593	−3,463235	−2,875898	−2,574501

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value	
			5%	1%
None	0,339425	*217,4096	94,15	103,18
At Most 1	0,242554	*135,3099	68,52	76,07
At Most 2	0,185110	*80,30479	47,21	54,46
At Most 3	0,108508	*39,77370	29,68	35,65
At Most 4	0,065886	17,03168	15,41	20,04
At Most 5	0,017703	3,536568	3,76	6,65

Catatan : *signifikan pada tingkat 1%

	Eigenvalue	Max-Eigen Value	Critical Value	
			5%	1%
None	0,339425	*82,09971	39,37	45,10
At Most 1	0,242554	*55,00508	33,46	38,77
At Most 2	0,185110	*40,53109	27,07	32,24
At Most 3	0,108508	22,74201	20,97	25,52
At Most 4	0,065886	13,49512	14,07	18,63
At Most 5	0,017703	3,536568	3,76	6,65

Catatan : *signifikan pada tingkat 1%

Tabel 3. Hasil Uji *Vector Auto Regression*

	INFLASI	SBI	DEPO1	M2	IDR/USD	IHSG
INFLASI(−1)	0,950852	−0,046579	0,102808	−0,004815	−0,083837	−0,021666
	(0,07207)	*(0,03205)	*(0,03424)	*(0,00721)	*(0,04181)	*(0,02274)
INFLASI(−2)	−0,175614	0,025445	−0,108129	0,003383	0,035842	0,014002
	(0,06790)	*(0,03020)	*(0,03227)	*(0,00679)	*(0,03940)	*(0,02143)
SBI(−1)	0,693854	0,964349	0,263171	−1,19E-05	0,074204	−0,058364
	(0,17825)	(0,07927)	(0,08470)	*(0,01783)	(0,10342)	(0,05625)
SBI(−2)	−0,319702	−0,364272	−0,388693	−0,014957	−0,364518	0,056924
	(0,17089)	(0,07600)	(0,08120)	*(0,01709)	(0,09915)	(0,05392)
DEPO1(−1)	−1,005678	0,525883	1,217297	0,001533	−0,192762	0,035658
	(0,16766)	(0,07456)	(0,07967)	*(0,01677)	(0,09727)	(0,05290)
DEPO1(−2)	0,829598	−0,181000	−0,161874	0,017837	0,494853	−0,020775
	(0,19295)	(0,08581)	(0,09168)	*(0,01930)	(0,11194)	(0,06088)
M2(−1)	0,859893	−0,216702	−0,020464	0,818348	0,514084	−0,398125
	(0,79851)	(0,35512)	(0,37942)	(0,07987)	(0,46327)	(0,25196)
M2(−2)	−0,851118	−0,048959	−0,160120	0,184296	−0,528701	0,486246
	(0,80490)	(0,35796)	(0,38246)	(0,08051)	(0,46698)	(0,25398)
IDR/USD(−1)	0,197345	0,324521	−0,054298	0,010310	1,104370	0,040666
	(0,13350)	(0,05937)	(0,06344)	*(0,01335)	(0,07745)	*(0,04213)
IDR/USD(−2)	−0,212188	−0,155943	0,133679	−0,008002	−0,076755	1,120456
	(0,14410)	(0,06409)	(0,06847)	*(0,01441)	(0,08360)	(0,07280)
IHSG(−1)	−0,290683	−0,007766	−0,117007	−0,032945	−0,502821	1,120456
	(0,23072)	(0,10261)	(0,10963)	*(0,02308)	(0,13385)	(0,07280)
IHSG(−2)	0,287019	0,191832	0,234311	0,046271	0,501372	−0,181503
	(0,23991)	(0,10669)	(0,11399)	*(0,02400)	(0,13919)	(0,07570)

Catatan: * signifikan pada tingkat kepercayaan 1% (dengan nilai t_{tabel} 2,576)

Nilai tukar IDR/USD memiliki bobot terbesar kedua dalam mempengaruhi IHSG dan memiliki nilai negatif dalam vektor terkointegrasi, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Lee (1992), Hermanto dan Manurung (2002), Theresia (2002), Sitinjak (2003), Wiyani dan Widjayanto (2004), Abbas *et. al.* (2006), Sa'adah *et. al.* (2006), Murwaningsari (2008), Muharam dan Nuraini (2008), Pratikno (2009) dan Witjaksono (2010) yang membuktikan nilai tukar (kurs) berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham. Pengaruh negatif ini dapat dilihat jika nilai tukar IDR/USD meningkat (rupiah melemah atau terdepresiasi), maka akan menyebabkan harga saham ikut turun. Hal ini terjadi karena pada umumnya pelaku ekonomi memiliki kepercayaan bahwa otoritas moneter akan bereaksi dalam bentuk mempercepat kebijakan yang bersifat restriktif, yang akan mendorong tingkat suku bunga menguat. Ketika suku bunga menguat pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi dengan menjual saham yang dimilikinya secepatnya. Reaksi tersebut akan mendorong harga saham turun sehingga secara otomatis IHSG akan mengalami penurunan.

Demikian sebaliknya, jika nilai tukar IDR/USD mengalami penurunan (rupiah menguat atau mengalami apresiasi), maka nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US$ rendah, hal ini menyebabkan investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di pasar modal, karena mereka optimis bahwa kinerja emiten dapat tumbuh dengan baik seiring dengan menguatnya rupiah. Reaksi investor ini akan menyebabkan harga saham mengalami kenaikan sehingga IHSG juga mengalami peningkatan. Tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Handayani (2007) dan Nugroho (2008) yang menghasilkan nilai kurs berpengaruh positif terhadap indeks harga saham, hal ini diduga adanya intervensi Bank Indonesia untuk menjaga pergerakan nilai kurs IDR/USD sehingga pergerakkan nilai tukar IDR/USD melemah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Nugroho, 2008).

BI *rate* memiliki bobot terbesar ketiga dalam mempengaruhi IHSG dan memiliki nilai positif dalam vektor terkointegrasi, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lee (1992), Theresia (2002), Erawati dan Richard (2002), Sitinjak (2003), Utami dan Rahayu (2003). Kenaikan tingkat suku bunga dapat meningkatkan beban perusahaan untuk memenuhi kewajibannya/utang kepada bank, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan dan akhirnya harga saham pun turun. Kenaikan suku bunga berpotensial mendorong investor mengalihkan dananya ke pasar uang atau tabungan maupun deposito sehingga investasi di lantai bursa turun dan selanjutnya dapat menurunkan harga saham, sedangkan sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun, maka beban perusahaan pun menurun, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan pembagian jumlah dividen kas kepada investor, kemudian harga saham perusahaan pun meningkat. Tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Hermanto dan Manurung (2002), Abbas *et. al.* (2006), Handayani (2007), Murwaningsari (2008), Nugroho (2008) dan Witjaksono (2010) yang menghasilkan suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap pasar saham

Selanjutnya, suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1) memiliki bobot terbesar keempat dalam mempengaruhi IHSG dan memiliki nilai negatif dalam vektor terkointegrasi, hal ini dimungkinkan pada pertengahan tahun 1998 ada kenaikan yang luar biasa terhadap variabel BI *rate*, depo1, maupun nilai tukar rupiah (krisis moneter) yang dikarenakan kejadian-kejadian *non monetary* maupun peristiwa politik (Sudjono, 2005). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wiyani dan Wijayanto (2004), dan Sudjono (2005) yang membuktikan suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap pasar saham.

Inflasi memiliki bobot terkecil dan tidak signifikan dalam mempengaruhi IHSG. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hermanto dan Manurung (2002), Erawati dan Richard (2002), Utami dan Rahayu (2003), Sirait (2004), Widjaja (2004), Jatiningsih (2007), Nugroho (2008), dan Pratikno (2009). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh secara relatif laju inflasi cukup rendah bahkan tidak sampai dua digit, kemungkinan lain banyaknya para spekulan yang terjun di pasar modal tidak memperhatikan besarnya laju inflasi karena saat ini tingkat inflasi cukup rendah Jatiningsih (2007).

Secara simultan penelitian ini konsisten dengan peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa faktor domestik yang mempengaruhi IHSG berupa faktor fundamental, yaitu angka inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar dianggap mempunyai andil terhadap terhadap ekspektasi investor yang akhirnya berpengaruh pada pergerakan indeks (Sudjono, 2005 dalam Pasaribu, 2008 dan dalam Pratikno, 2009).

Dari persamaan kointegrasi sebelumnya, dapat diketahui bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan suku bunga deposito 1 bulan dan kurs IDR/USD, namun memiliki hubungan yang positif atau searah terhadap BI *rate*, jumlah uang beredar (M2) dan angka inflasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa apabila suku bunga deposito 1 bulan dan kurs IDR/USD (yang berarti bahwa kurs rupiah melemah terhadap dollar Amerika) akan mengakibatkan IHSG di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan.

Hubungan yang positif antara suku bunga SBI, jumlah uang beredar (M2) dan inflasi terhadap IHSG memiliki pengertian bahwa apabila suku bunga SBI, jumlah uang beredar (M2) dan inflasi mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan IHSG di Bursa Efek Indonesia, naiknya tingkat inflasi disebabkan adanya kenaikkan jumlah uang beredar, dengan adanya peningkatan dari permintaan masyarakat akan barang sehingga nilai uang akan menurun, di mana pergerakan harga-harga yang secara terus-menerus mendorong terjadinya inflasi.

Turunnya inflasi terjadi akibat membaiknya kondisi ekonomi khususnya awal tahun 2009, di mana tidak terjadi penyebab naiknya inflasi seperti pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terpenuhi dan daya beli yang tidak signifikan mengalami penurunan, oleh sebab itu rendahnya inflasi dapat dikatakan sebagai efek membaiknya kondisi ekonomi baik dalam permintaan maupun penawaran barang yang relatif seimbang.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya Adisetiawan dan Hasminidiarty (2011), suku bunga SBI, jumlah uang beredar (M2) dan tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks harga saham, hal ini dikarenakan ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap risiko investasi saham. Tingkat inflasi tetap digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan terkait dengan kemampuan tingkat inflasi dalam mempengaruhi penurunan daya beli konsumen terhadap suatu produk, sehingga dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Alasan BI *rate* tetap digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan tingkat bunga di beberapa perusahaan dapat digolongkan menjadi biaya, sehingga suku bunga bank mempengaruhi aktivitas ekonomi dan laba perusahaan.

Nilai tukar IDR/USD digunakan dikarenakan terkait dengan biaya ekspor-impor maupun aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh perusahaan. Melemahnya nilai tukar IDR/USD akan menambah beban perusahaan di dalam negeri, karena depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia suram, hal ini dapat terjadi apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat (Sunariyah, 2006 dalam Adisetiawan dan Hasminidiarty, 2011). Hal ini tentunya menambah risiko bagi investor apabila hendak berinvestasi di bursa saham Indonesia. Investor tentunya akan menghindari risiko, sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual dan menunggu hingga situasi perekonomian dirasakan membaik, dengan aksi jual yang dilakukan investor ini akan mendorong penurunan indeks harga saham di Bursa saham (Joesoef, 2007 dalam Adisetiawan dan Hasminidiarty, 2011).

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-2003 mengakibatkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat, karena dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga barang-barang secara umum, sehingga tingkat inflasi semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, maka upaya yang dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia adalah dengan menaikkan suku bunga, hal ini dilakukan Bank Indonesia dengan tujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas yang ada di masyarakat, sehingga uang yang dipegang masyarakat tidak digunakan untuk melakukan konsumsi berlebihan dan juga tidak digunakan untuk melakukan spekulasi valuta asing di pasar uang.

Penurunan BI *rate* yang diikuti dengan penurunan inflasi mendorong keinginan masyarakat untuk lebih cenderung menginvestasikan uang mereka di pasar modal yang akan berdampak pada kenaikan IHSG

hingga mencapai *level* 4.130,80 *point* pada bulan Juli 2011, karena ingin mendapatkan *return* yang lebih tinggi melalui investasi di pasar modal daripada menabungkan uang mereka pada deposito yang memberikan *return* yang rendah.

Selain itu, besarnya pengaruh jumlah uang yang beredar (M2) dan BI *rate* dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan adanya upaya pemerintah untuk menyerap jumlah uang yang beredar (M2) di masyarakat dengan tujuan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak dipergunakan untuk melakukan konsumsi yang berlebihan dan juga tidak digunakan untuk melakukan spekulasi valuta asing di pasar uang, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga SBI, hal ini membuat para investor yang menanamkan dananya di pasar uang mendapatkan *return* yang lebih besar daripada yang mereka perkirakan pada awalnya. Dari kelebihan *return* yang didapat inilah para investor kemudian mencoba untuk menanamkan dananya di pasar modal dalam bentuk saham, sehingga pada akhirnya nilai indeks harga saham di pasar modal meningkat. Hal inilah yang menjelaskan hubungan yang searah antara jumlah uang beredar (M2) dan tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG.

Dari Tabel 3. terlihat bahwa IHSG saat ini dipengaruhi tingkat jumlah uang beredar (M2) selama dua periode sebelumnya, mempengaruhi tingkat inflasi selama dua periode dan nilai kurs IDR/USD satu periode sebelumnya. Kemudian terlihat juga bahwa tingkat inflasi saat ini dipengaruhi suku bunga SBI, suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1), jumlah uang beredar (M2), dan nilai kurs IDR/USD selama dua periode sebelumnya, tetapi tidak mempengaruhi variabel makro ekonomi lainnya. Sedangkan tingkat BI *rate* saat ini suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1), nilai IDR/USD dipengaruhi jumlah uang yang beredar (M2) selama dua periode.

Hasil pengujian dengan menggunakan *Vector Auto Regression* ini juga dapat dilihat bahwa adanya hubungan kausalitas antara suku bunga SBI dengan suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1). Hal ini berarti bahwa suku bunga SBI memiliki pengaruh terhadap suku bunga deposito 1 bulan, demikian pula sebaliknya suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1) juga memiliki pengaruh terhadap suku bunga SBI. Hubungan kausalitas juga terlihat pada hubungan antara IHSG dengan jumlah uang beredar (M2), dan antara tingkat inflasi dengan nilai tukar IDR/USD.

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan nilai koefisien variabel, dapat dilihat bahwa hubungan antara kurs IDR/USD dan inflasi memiliki hubungan yang positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien yang positif. Hal ini berarti bahwa apabila kurs IDR/USD meningkat yang berarti bahwa kurs rupiah melemah terhadap dollar Amerika, maka tingkat akan mengalami peningkatan. Tetapi jika terjadi sebaliknya, karena kurs IDR/USD dan tingkat inflasi memiliki hubungan kausalitas dengan nilai koefisien negatif, sehingga apabila tingkat inflasi mengalami peningkatan, maka kurs IDR/USD akan mengalami penurunan yang berarti menguatnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika.

Hubungan kausalitas juga terlihat pada variabel suku bunga deposito 1 bulan dengan BI *rate*. Suku bunga deposito 1 bulan memiliki hubungan yang positif terhadap BI *rate*, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien yang positif pada BI *rate*. Hal ini berarti bahwa apabila suku bunga deposito 1 bulan mengalami peningkatan, maka BI *rate* akan mengalami peningkatan juga. Namun, BI *rate* memiliki hubungan negatif terhadap suku bunga deposito 1 bulan yang ditandai dengan nilai koefisien yang negatif pada suku bunga deposito 1 bulan. Hal ini menunjukkan apabila BI *rate* mengalami penurunan, maka suku bunga deposito 1 bulan akan mengalami peningkatan.

Hubungan kausalitas juga terlihat pada variabel IHSG dengan jumlah uang beredar (M2). IHSG memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah uang beredar (M2), yang ditunjukkan oleh nilai koefisien yang positif pada IHSG. Hal ini berarti bahwa apabila jumlah uang beredar (M2) mengalami peningkatan, maka IHSG juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya IHSG memiliki hubungan positif terhadap jumlah uang beredar (M2) yang ditandai dengan nilai koefisien yang positif pada jumlah uang beredar (M2). Hal ini menunjukkan apabila IHSG mengalami peningkatan, maka jumlah uang beredar (M2) juga akan mengalami peningkatan.

Tabel 3. juga menunjukkan bahwa variabel penelitian yang signifikan dan memiliki pengaruh terhadap variabel penelitian lainnya sebagian besar berada pada *lag* kedua. Hal ini menunjukkan dampak yang signifikan dari suatu kebijakan moneter membutuhkan waktu (*lag*) untuk mempengaruhi variabel makro ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar

variabel makro ekonomi memiliki pengaruh terhadap variabel makro ekonomi lainnya pada *lag* kedua.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian Sirait (2004), mendukung adanya pola hubungan yang erat antara variabel makro ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan hasil analisis grafik yang ditunjukkan dengan adanya pola yang teratur di antara pergerakan suku bunga dan nilai tukar IDR/USD dengan IHSG. Dalam penelitian Sirait (2004) juga menyebutkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel makro ekonomi terhadap IHSG berdasarkan hasil analisis kointegrasi.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang Sirait (2004). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan jangka panjang dan hubungan simultan antara variabel makro ekonomi yang terdiri atas jumlah uang yang beredar (M2), suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1), BI *rate*, kurs IDR/USD, dan tingkat inflasi terhadap IHSG. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah uang beredar (M2). (M1) terdiri atas uang kartal dan uang giral, sedangkan M2 terdiri atas uang kartal dan uang giral (M1) ditambah uang kuasi. Uang kuasi meliputi semua deposito berjangka (dalam rupiah dan valuta asing) dan tabungan yang terdapat dalam neraca sistem perbankan di Indonesia (Insukindro, 1995). Hal ini berarti (M1) telah bergabung di dalam (M2), sehingga penelitian ini cukup menggunakan variabel (M2) tanpa menyertakan variabel (M1) di dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan periode penelitian yang hampir sama dengan penelitian Sirait (2004). Penelitian Sirait (2004) meneliti keseimbangan dan hubungan simultan variabel makro ekonomi terhadap IHSG periode 1990-2000, di mana penelitian tersebut meneliti kondisi ekonomi makro negara Indonesia sebelum dan pada saat mengalami krisis (1997), sedangkan penelitian ini, pada periode 1995-2011, di mana pada periode tersebut menunjukkan keadaan makro ekonomi Indonesia sebelum dan pada saat mengalami krisis, masa pemulihan negara dari krisis dan bahkan masa setelah mengalami krisis.

Penelitian Sudjono (2005), menggunakan metodologi perhitungan yang cukup banyak, seperi uji stationeritas (*Unit Root Test*), uji hubungan kausalitas antar variabel penelitian (*Granger Causality Test*), uji kointegrasi (*Cointegration Test*), uji *Vector Auto Regression* (VAR) dan uji *Error Corection Model* (ECM) hanya mengetahui keseimbangan dan hubungan simultan antar variabel penelitian. Sementara pada penelitian ini menggunakan tiga pengujian untuk mengetahui keseimbangan dan hubungan simultan antar variabel penelitian, yaitu : uji stationeritas (*Unit Root Test*), uji keseimbangan jangka panjang (*Cointegration Test*) dan uji hubungan simultan antar variabel makro ekonomi terhadap IHSG dengan menggunakan uji *Vector Auto Regression* (VAR), dengan menggunakan metodologi penelitian yang lebih ringkas, penelitian ini dapat memberikan hasil analisis yang sama, yakni mengetahui keseimbangan dan hubungan simultan antar variabel penelitian.

KESIMPULAN

Keseimbangan jangka panjang antara variabel makro ekonomi (jumlah uang beredar, suku bunga deposito 1 bulan, BI *rate*, kurs IDR/USD, dan tingkat inflasi) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat empat vektor pada variabel makro ekonomi yang terkointegrasi terhadap IHSG pada tingkat kepercayaan 1%. Vektor yang terkointegrasi ini membuktikan bahwa terjadi keseimbangan jangka panjang yang sangat kuat antara variabel makro ekonomi terhadap Indeks IHSG. Di samping itu, pengujian ini juga membuktikan bahwa variabel makro ekonomi yaitu jumlah uang beredar (M2), BI *rate*, suku bunga deposito 1 bulan (DEPO1), dan nilai tukar IDR/USD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG.

Hubungan IHSG yang berlawanan arah dengan tingkat suku bunga deposito 1 bulan dan kurs IDR/USD, namun memiliki hubungan positif atau searah terhadap BI *rate*, jumlah uang beredar (M2) dan tingkat inflasi memiliki pengertian bahwa apabila tingkat inflasi, BI *rate* dan kurs IDR/USD mengalami kenaikan (yang berarti bahwa kurs rupiah melemah terhadap dollar Amerika) akan mengakibatkan IHSG di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan.

Hubungan simultan jangka panjang antara variabel penelitian, diuji dengan *Vector Auto Regression* (VAR). Hasil dari pengujian ini menunjukkan adanya

hubungan kausalitas (saling keterkaitan) antara variabel kurs IDR/USD dengan tingkat inflasi, suku bunga SBI dengan suku bunga deposito 1 bulan, dan antara IHSG terhadap jumlah uang beredar (M2). Dengan kata lain, kelima variabel makro ekonomi ini menunjukkan adanya hubungan simultan yang saling keterkaitan antara variabel-variabel penelitian secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adisetiawan, R., dan Hasminidiarty. 2011, Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Makro ekonomi dan Mikroekonomi Terhadap Risiko Investasi Saham. *Jurnal Ekonomi*, 26(2): 159-174.

Ajayi, R. A., and M. Mougoué. 1996. On the Dynamic Relation Between Stock Prices and Exchange Rates. *Journal of Financial Research*, 21(2): 193-207.

Anoraga, Panji. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Semarang: PT. Rineka Cipta.

Ansari, M. L., and Gang, L. N. 1999. Liberalization Policy: Fits & Start's or Gradual Change in India. *Comparative Economic Studies*, 51(1): 24-46.

Antolis and Dossugi. 2008. Pengaruh Fluktuasi IHSG, Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Imbal Hasil Unitlink Berbasis Saham. *Jounal of Applied Finance and Accounting*, 1(1): 141-163.

Bank Sentral Indonesia. 2012. *Suku Bunga SBI, Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Kurs Nilai Transaksi – Mata Uang : Dolar Amerika Serikat (USD)*, 3 Januari 2012, http://www.bi.go.id/web/id/moneter/.

Doriyanto, Triatmo. 1999. Stabilkah Permintaan Uang di Indonesia Sebelum dan Selama Krisis?. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 4(2): 19-23.

Erawati, Neny dan Llewelyn, Richard. 2002. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi untuk menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1): 98-107.

Gujarati, Damodar N., 1995, *Basic Economoetric* (3rd edition). Singapore: McGraw-Hill Book Co.

Hermanto, B. 1999. Pasar Modal: Harga Tidak Mencerminkan Informasi. *Usahawan*, 27(2): 53-55.

----------., dan Manurung, Adler. 2002. Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Kurs Dollar Amerika, Jumlah Uang Beredar (M2), Pembelian Bersih Investor Asing di BEJ terhadap IHSG di BEJ Periode 1998-Maret 2002. *Usahawan*, 33(2): 112-127.

Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.

Iswardono. 1997. *Uang dan Bank*. Yogyakarta : BPFE, Yogyakarta

Jatiningsih, Oksiana. 2007. Pengaruh Variabel Makro ekonomi terhadap IHSG di BEJ. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 5(1): 18-25.

Lee, S. B. 1992. Causal Relations Among Stock Return, Interest Rates, Real Activity, and Inflation. *Journal of Business Finance and Accounting*, 17(2):55-70.

Muharam, Harjun., Nuraini, M. S. Zuraedah. 2008. Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Saham Dow Jones Industrial Average terhadap IHSG di BEJ. *Jurnal MAKSI*, 8(1): 24-42.

Murwaningsari, Etty. 2008. Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Deposito dan Kurs terhadap IHSG beserta Prediksi IHSG (Model GARCH dan ARIMA). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 23(3): 178-195.

Nopirin. 1992. *Ekonomi Moneter*, Buku I dan II. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta

Nugroho, Heru. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Jumlah Uang Beredar terhadap Indeks LQ45 periode 2002-2007*. Tesis MM, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pasaribu, Pananda, *et. al.*, 2009. Pengaruh Variabel Makro ekonomi terhadap IHSG. *Jurnal Universitas Indonesia*

Pratikno, Dedy. 2009. *Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, SBI, dan Indeks Dow Jones terhadap Pergerakan IHSG di BEI*. Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Sa'adah, Siti and Panjaitan. 2006. Interaksi Dinamis antara Harga Saham dengan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1): 46-62.

Sirait, Hisar. 2004. Analisis Kointegrasi Variabel Ekonomi Makro dan Bursa Asing terhadap Indeks Saham Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, 11(1): 173-188.

Sitinjak, Elyzabeth, *et. al.*, 2003. Indikator-indikator Pasar Saham dan Pasar Uang yang Saling Berkaitan ditinjau dari Pasar Saham sedang Bullish dan Bearish. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 3(3): 156-177.

Sulistiyo, M. Herman. 2004. *Perilaku Dinamis Antara IHSG dengan Nilai Tukar Rupiah terhadap Beberapa Negara Asia sebagai Dampak dari Krisis Ekonomi dengan Metode VAR/VECM.* Tesis, FE-Universitas Indonesia.

Sudjono. 2005. Analisis Keseimbangan dan Hubungan Simultan Antara Variabel Ekonomi Makro terhadap Indeks Harga Saham di Bursa Efek Jakarta dengan Metode VAR (Vector Autoregressive), dan ECM (Error Correction Model). *Jurnal Ekonomi Teleskop*, 4(7): 101-116.

Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Theresia, Puji Rahayu. 2002. Analisis Pengaruh Nilai Tukar dan Suku Bunga terhadap IHSG di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 22(1): 294-312.

Utami, Mudji dan Rahayu, Mudjilah. 2003. Peranan Profitabilitas, Suku Bunga,Inflasi, dan Nilai Tukar dalam mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 5(1): 123-131.

Valadkhani, Abbas., Chancharat, Surachai., and Havie, Charles. 2006. *The Interplay Between the Thai and Several Other International Stock Markets.* Available: www.ideas.repec.org.

Widjaja, Emilia., 2004, Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Risiko Saham (Studi Kasus pada Saham-saham Ketegori LQ45 tahun 2001-2002). *Kinerja: Ekonomi dan Bisnis, Atmajaya,* 46(1): 55-67.

Witjaksono, Ardian Agung. 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG di BEI periode 2000-2009.* Tesis MM Universitas Diponegoro Semarang.

Wiyani, W dan Wijayanto, A. 2004. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito dan Volume Perdagangan Saham terhadap Harga Saham. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(3): 56-73.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 85–94
ISSN 1411-514X

Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita

Saparuddin M.
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Gedung R, UNJ, Jl. Rawamangun Muka I, Jakarta
E-Mail: itunk77@gmail.com/itunk_30@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to review and analyze the influence of GDP, investment, education and training, and government policies on the growth of small and medium enterprises. Subsequently, this research aims to review and analyze the effect of GDP, investment, small and medium enterprises, and employment opportunities on per capita income. The next purpose of this research is to review and analyze the influence of GDP, investment, small and medium enterprises on employment opportunities. This research is categorized descriptive and verifying research. The method used is survey method and it uses simultaneous equation model in the period of 6 years in 13 districts in South Sulawesi. The results showed that (a) GDP, investment, education and training, and government policies significantly affect the growth of small and medium enterprises; (b) GDP, investment, small and medium enterprises, and employment opportunities significantly affect per capita income; and (c) GDP, investment, and small and medium enterprises significantly affect the employment opportunities.

Keywords: education and training, small and medium industries, employment opportunities, per capita income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: mengkaji dan menganalisis pengaruh PDRB, investasi, pendidikan dan pelatihan, dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah, mengkaji dan menganalisis pengaruh PDRB, investasi, industri kecil dan menengah, dan kesempatan kerja terhadap pendapatan per kapita, mengkaji dan menganalisis pengaruh PDRB, investasi, industri kecil dan menengah terhadap kesempatan kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif dengan metode survey dan persamaan simultan, jangka waktu 6 tahun dengan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) PDRB, investasi, pendidikan dan pelatihan, dan kebijakan pemerintah signifikan mempengaruhi pertumbuhan industri kecil dan menengah; b) PDRB, investasi, industri kecil dan menengah, dan kesempatan kerja signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita; dan c) PDRB, investasi, dan industri kecil dan menengah, signifikan mempengaruhi kesempatan kerja.

Kata Kunci: pendidikan dan latihan, industri kecil dan menengah, kesempatan kerja, pendapatan per kapita.

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa sebab yang membuat sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat bertahan di masa krisis. Salah satunya, karena sektor ini tidak tergantung pada bahan baku impor dalam proses produksinya, sehingga biaya produksinya tidak terpengaruh oleh merosotnya nilai rupiah terhadap dollar, sebaliknya jika produknya diekspor, keuntungan yang diperoleh dapat bertambah. Sektor industri kecil dan menengah tidak mendapat pinjaman dari mata uang asing. Sumber dana industri kecil dan menengah umumnya berasal dari dalam negeri. Berbeda dengan sektor industri besar, sebagian masih tergantung pada bahan baku impor, sehingga, depresiasi rupiah mempunyai pengaruh yang sangat besar pada pembengkakan biaya produksinya. Demikian juga, sumber dana sektor industri besar sebagian diperoleh dari pinjaman luar negeri, sehingga penurunan nilai rupiah terhadap dollar mempengaruhi peningkatan biaya bunga yang ditanggung perusahaan.

Melihat kenyataan tersebut betapa posisi industri kecil dan menengah sangat penting untuk memperkokoh perekonomian nasional, namun industri kecil dan menengah tersebut masih memperoleh posisi *marginal*, karena perhatian pemerintah lebih banyak pada industri besar. Kenyataan ini membuat industri besar telah berkembang pesat sedang industri kecil dan menengah perkembangannya lebih lambat. Kesenjangan ini tanpa disadari telah memunculkan gejala kecemburuan sosial dan ada kecenderungan mengarah pada konflik sosial. Untuk mengurangi kesenjangan itu pemerintah dan para pengusaha besar telah berupaya membantu industri kecil dan menengah melalui program kemitraan.

Mengingat populasi terbesar dari unit usaha yang berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja adalah industri kecil dan menengah, maka fokus pembahasan selanjutnya akan ditujukan pada industri kecil dan menengah. Tinjauan terhadap keberadaan industri kecil dan menengah diberbagai sektor ekonomi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi dasar pemahaman kita terhadap kekuatan dan kelemahannya, selanjutnya potensinya sebagai motor pertumbuhan perlu ditelaah lebih dalam agar kita mampu menemu kenali persyaratan yang diperlukan untuk pengembangannya.

Industri kecil dan menengah secara nasional selama kurun waktu 2 tahun menunjukkan kontribusi sebesar 55,62% terhadap PDB nasional dibandingkan dengan industri besar yang hanya berkontribusi sebesar 44,08%. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri di mana industri kecil dan menengah pada tahun 2006 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 83.233.793 orang, jauh lebih banyak penyerapannya dibandingkan dengan industri besar yang hanya menyerap tenaga kerja sebesar 3.745.832 orang. Tahun 2007 penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah mengalami peningkatan menjadi 84.109.940 orang, sementara industri besar hanya mampu menyerap 3.953.212 orang saja.

Iklim investasi belum mampu mendorong investasi pada sektor industri kecil dan menengah, meskipun industri kecil dan menengah merupakan kelompok industri yang paling efisien penggunaan investasinya dan umumnya dengan jeda waktu investasi yang relatif pendek. Fenomena ini mengindikasikan industri kecil dan menengah akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika investasi diarahkan pada skala industri kecil dan menengah. Meningkatnya investasi pada skala industri kecil dan menengah diharapkan mampu meningkatkan daya saing IKM, melalui peningkatan penggunaan teknologi yang lebih baik.

Peran sektor industri kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, kontribusinya masih relatif kecil, namun bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB maka sektor IKM memperlihatkan peran yang cukup besar. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sulawesi Selatan pada tahun 2004 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,87 persen, kemudian naik menjadi 6,37 persen dari seluruh pekerja pada tahun 2005, dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,27 persen pada tahun 2004, dan 14,04 persen pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, sektor industri Provinsi Sulawesi Selatan menyerap tenaga kerja sebesar 9,42 persen, kemudian naik menjadi 10,84 persen dari seluruh pekerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,55 persen pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 23,56 persen pada tahun 2005 (BPS Sulsel, 2008:21).

Sementara dalam hal perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, maka pemerintah ikut campur tangan untuk mengatur dan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, terutama untuk melindungi pekerja dari eksploitasi pengusaha. Pekerja yang bekerja di sektor industri, terutama yang berstatus sebagai buruh pada umumnya merasakan bahwa tingkat upah yang diterima relatif rendah, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya. Pekerja yang merasakan bahwa upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah hanya pekerja yang masih berstatus lajang. Walaupun upah minimum pekerja senantiasa mengalami perbaikan dan penyesuaian dari tahun ke tahun yang disertai dengan upah sundulan yang didasarkan pada masa kerja, namun masih selalu berada lebih rendah dari tingkat kebutuhan hidup minimum. Kontribusi sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan bagi pekerja relatif cukup besar.

Pendapatan per kapita di sektor industri kecil dan menengah sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita secara keseluruhan di Sulawesi Selatan, hal ini menjadikan sektor industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Menurut Hubeis (1997:78) bahwa negara selalu memiliki keterlibatan langsung yang signifikan dalam ekonomi melalui kepemilikan banyak usaha besar yang strategis. Bahkan setelah krisis ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan untuk menjadi pemain utama dalam berbagai sektor penting (infrastruktur, sektor keuangan, industri) yang berdampak pada pengembangan IKM.

Dalam upaya meningkatkan output industri kecil dan menengah, investasi atau sumber dana untuk membiayai semua aktivitas perusahaan sangat diperlukan baik untuk perluasan kapasitas produksi maupun pengembangan usaha yang telah ada sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Menurut Rosyidi (1983:45), "investasi adalah bagian dari output yang diwujudkan dalam bentuk penambahan modal alat-alat kapital atau barang-barang modal". Dengan kata lain investasi dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi melalui penambahan mesin, gedung, dan sebagainya.

Implikasi dari *new growth theory* dalam jangka panjang adalah investasi sangat penting dan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong percepatan peningkatan output baik barang maupun jasa, di mana pertumbuhan output ini mendorong pula munculnya industri-industri baru baik yang skalanya kecil, menengah, maupun besar dalam suatu negara. Dampak investasi terhadap output dapat pula ditelusuri dari pendapat Barro dan Sala-i Martin (1992:36), yang mengatakan bahwa pengeluaran produktif pemerintah akan berkorelasi positif terhadap peningkatan output barang jasa yang dihasilkan oleh usaha-usaha produksi skala kecil, menengah, maupun besar.

Kuncoro (2000:69) mengemukakan bahwa pembinaan dan pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun disadari bahwa pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Selanjutnya Kuncoro (2000:73) mengemukakan bahwa secara lebih spesifik, masalah mendasar yang dihadapi pengusaha kecil menengah adalah (1) kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar; (2) kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan; (3) kelemahan di bidang organisasi, dana, dan manajemen sumber daya manusia; (4) keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar industri kecil dan menengah (sistem informasi pemasaran); (5) iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan; (6) pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi.

Menurut Boebningar dalam Isono Sadoko (1995:90), kebijakan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan industri kecil dan menengah adalah (1) terciptanya iklim kebijakan yang positif, tergantung pada kemampuan negara dalam menerjemahkan tujuan pembangunan; (2) memberikan kesempatan formal dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan; (3) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Pola kebijakan lainnya, yang dapat dipakai sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil, adalah seperti yang ditawarkan Hafsah (1999:47), meliputi: 1) kebijakan makro ekonomi, yang memberi ruang gerak secara optimal kepada usaha kecil dan usaha besar, 2) kebijakan investasi dan permodalan, 3) kebijakan pengembangan kelembagaan usaha kecil, 4) kebijakan pengembangan kelembagaan kemitraan usaha antara usaha besar dan usaha kecil, dan 5) kebijakan penerapan peraturan perundangan yang mendukung kemitraan usaha.

Eugene dan Morce (1965: 90) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) tipe kebijakan pemerintah yang sangat menentukan pertumbuhan IKM, yaitu: (1) kebijakan *do nothing policy* pemerintah apapun alasannya sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan IKM begitu saja, (2) kebijakan memberi perlindungan (*protection policy*) terhadap IKM: kebijakan ini bersifat melindungi IKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi, (3) kebijakan berdasarkan ideology pembangunan (*developmentalist*): kebijakan ini memilih industri yang potensial (*picking the winner*) namun tidak diberi subsidi dan, (4) kebijakan yang semakin popular adalah apa yang disebut "*market friendly policy*" dengan penekanan pada pilihan *brood based*, tanpa subsidi dan kompetisi.

Menurut Mintaroem, *et. al.* (2002:15) bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah perlu adanya modal kerja dan investasi, salah satunya dengan melalui pengembangan kredit usaha kecil perbankan, dan sejenisnya. Selain itu juga perlunya kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi industri kecil dan menengah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganlisis (a) pengaruh PDRB, investasi, pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah; (b) pengaruh PDRB, industri kecil dan menengah, investasi, serta kesempatan kerja terhadap pendapatan per kapita; dan (c) pengaruh PDRB, industri kecil dan menengah, serta investasi, terhadap kesempatan kerja.

METODE

Secara garis besar, objek penelitian ini mencakup komponen penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri kecil dan menengah, pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama rentang waktu 2002 hingga 2007.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan verifikatif. Pendeskripsian digunakan terhadap data dari masing-masing variabel yang dilakukan secara terstruktur, faktual dan akurat. Sedangkan sifat verifikatif yaitu meneliti hubungan, keterkaitan dan pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yang diteliti. Dalam kaitan tersebut, akan dilakukan pengujian statistik dan ekonometrik untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Model Pendapatan per Kapita (*Income per Capita*)

Secara empiris Handrimurtjahyo (2007:94), menemukan fakta empiris bahwa pertumbuhan industri kecil dan menengah signifikan (positif) mempengaruhi pendapatan per kapita. Dinamika industri kecil dan menengah diformulasikan sebagai berikut:

$$IP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB_{it} + \alpha_2 IKM_{it} + \alpha_3 INV_{it} + \alpha_4 KK_{it} + \varepsilon_2$$

Dimana *IP* adalah *Income per Capita, PDRB* adalah produk regional bruto, *IKM* adalah industri kecil dan menengah, *INV* adalah investasi, *KK* adalah kesempatan kerja.

Model Kesempatan Kerja

Model kesempatan kerja diformulasikan sebagai berikut:

$$EMPL_{it} = \delta_0 + \delta_1 PDRB_{it} + \delta_2 IKM_{it} + \delta_3 INV_{it} + \varepsilon_2$$

Dimana *EMPL* adalah *employment* (kesempatan kerja), *PDRB* adalah produk domestik regional bruto, *IKM* adalah industri kecil dan menengah, dan *INV* adalah investasi.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Konsep Variabel	Ukuran	Skala
Investasi	Investasi	Nilai Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang Terealisasi	Rupiah	Rasio
Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan untuk IKM	Rupiah	Rasio
Kebijakan Pemerintah	Anggaran Pemerintah untuk IKM	Anggaran Pemerintah untuk IKM	Rupiah	Rasio
Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Output yang dihasilkan oleh IKM Tiap Tahun	Nilai output IKM	Rasio
PDRB	Pertumbuhan Ekonomi	Produksi Barang dan Jasa yang dihasilkan dalam Suatu Periode Waktu Tertentu	Nilai output PDRB	Rasio
Pendapatan per Kapita	Pendapatan per Kapita di Sulawesi Selatan	Pendapatan per Kapita per Tahun	Rupiah	Rasio
Kesempatan Kerja	Kesempatan Kerja di Sektor Perekonomian	Jumlah Tenaga Kerja yang Mampu diserap di Sektor Perekonomian di Sulawesi Selatan	Orang	Rasio

Kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan kepada teori-teori yang mendukung tentang dinamika industri kecil dan menengah, digambarkan dalam skema berikut.

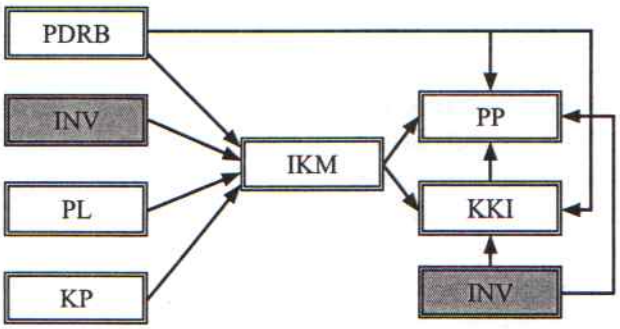

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran pada Gambar 1., hubungan antar variabel penelitian diuji dengan hipotesis sebagai berikut: (1) PDRB, investasi, pendidikan dan pelatihan, dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah; (2) PDRB, industri kecil dan menengah, investasi, dan kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita; dan (3) PDRB, industri kecil dan menengah, dan investasi bepengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut merupakan panel data dalam periode waktu tahun 2002 hingga 2007 yang terdiri atas PDRB, investasi, pendidikan dan pelatihan, kebijakan pemerintah, industri kecil dan menengah, pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menentukan jenis data, yang disesuaikan dengan pendekatan analisis yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Periode pengukurannya digunakan data panel dengan jangka waktu 6 tahun, yakni dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.

HASIL

Pengaruh PDRB, Investasi, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan

Hasil estimasi persamaan regresi data empiris untuk model regresi IKM diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IKM = 2{,}28.10^{+09} + 220{,}5554PDRB + 179{,}9125KP + 21{,}22763PL + 784{,}7411INV$$

$R^2 = 0{,}838950$

Adj. $R^2 = 0{,}832420$

DW-stat = 1,879234

Model yang diperoleh memberikan gambaran perubahan nilai PDRB berbanding lurus dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah di mana setiap peningkatan satu juta rupiah PDRB akan diikuti peningkatan industri kecil dan menengah sebesar 220,5554 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah. Perubahan nilai KP (anggaran pemerintah untuk industri kecil dan menengah) berbanding lurus dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah di mana setiap peningkatan satu juta rupiah anggaran pemerintah untuk industri kecil dan menengah akan diikuti peningkatan industri kecil dan menengah sebesar 179.9125 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai PL (anggaran pendidikan dan pelatihan untuk industri kecil dan menengah) berbanding lurus dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah di mana setiap peningkatan satu juta rupiah anggaran pendidikan dan pelatihan untuk industri kecil dan menengah akan diikuti peningkatan industri kecil dan menengah sebesar 21,22763 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah. Perubahan nilai INV (nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi) berbanding lurus dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah di mana setiap peningkatan satu juta rupiah nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi akan diikuti peningkatan industri kecil dan menengah sebesar 784,7411 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Untuk model pertama (IKM) diperoleh nilai F-statistik (F-hitung) sebesar 105.06884 dengan signifikansi F sebesar 0,00000. Oleh karena nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel sebesar 2,497, sejalan dengan nilai signifikansi yang sangat kecil (0,00000) berarti tingkat kesalahan untuk mengambil kesimpulan menolak H_0 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), sehingga dapat disimpulakan model regresi dengan variabel dependen IKM bermakna.

Pengaruh PDRB, Industri Kecil dan Menengah, Investasi, dan Kesempatan Kerja terhadap Pendapatan per Kapita di Sulawesi Selatan

Hasil estimasi persamaan regresi data empiris untuk model regresi IP diperoleh persamaan regresi:

IP = 318339 + 27969,55(PDRB) + 0.67IKM + 3.30INV + 33.63KK

R^2 = 0,790212

Adj. R^2 = 0,778717

DW-stat = 1,752224

Model yang diperoleh memberikan gambaran perubahan nilai PDRB berbanding lurus dengan pendapatan per kapita di mana setiap peningkatan satu juta rupiah PDRB akan diikuti peningkatan pendapatan per kapita sebesar 27969,55 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai IKM berbanding lurus dengan pendapatan per kapita di mana setiap peningkatan satu juta rupiah industri kecil dan menengah akan diikuti peningkatan pendapatan per kapita sebesar 0,67 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai INV (nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi) berbanding lurus dengan pendapatan per kapita di mana setiap peningkatan satu juta rupiah nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi akan diikuti peningkatan pendapatan per kapita sebesar 3.30 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai EMPL (jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di sulawesi selatan) berbanding lurus dengan pendapatan per kapita di mana setiap peningkatan satu orang akan diikuti peningkatan pendapatan per kapita sebesar 33.63 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Model pertama (IP) diperoleh nilai F-statistik sebesar 70,41038 dengan signifikansi F sebesar 0,00000. Diperoleh nilai F-hitung (F-statistik) lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,497. Hasil yang diperoleh sejalan dengan nilai signifikansi yang sangat kecil (0,00000), berarti tingkat kesalahan untuk mengambil kesimpulan menolak H_0 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), sehingga dapat disimpulakan model regresi dengan variabel dependen PP bermakna.

Pengaruh PDRB, IKM, dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan

Model ketiga yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PDRB, IKM, dan investasi terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Selatan. Hasil estimasi persamaan regresi data empiris untuk model regresi EMPL diperoleh persamaan regresi:

KK = 95559,36 + 0,007528 PDRB + 0,000783 IKM + 0,039965 INV

R^2 = 0, 825005

Adj. R^2 = 0,817910

DW-stat = 1,768726

Model yang diperoleh memberikan gambaran perubahan nilai PDRB berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan, di mana setiap peningkatan satu juta rupiah PDRB akan diikuti peningkatan KK (jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan) sebesar 0,007528 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai IKM berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan, di mana setiap peningkatan satu juta rupiah industri kecil dan menengah akan diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan sebesar 0,000783 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Perubahan nilai INV (nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi) berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan, di mana setiap peningkatan satu juta rupiah nilai investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terealisasi akan diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ekonomi di Sulawesi Selatan sebesar 0,039965 pada saat nilai variabel lainnya dalam model tidak berubah.

Untuk model ketiga (KK) diperoleh nilai F-statistik sebesar 116,28974 dengan signifikansi F sebesar 0,00000. Diperoleh nilai F-hitung (F-statistik) lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,728. Hasil yang diperoleh sejalan dengan nila signifikansi yang sangat kecil (0,00000), berarti tingkat kesalahan untuk mengambil kesimpulan menolak H_0 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), sehingga dapat disimpulakan model regresi dengan variabel dependen KK bermakna.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional dan daerah, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di atas 6% per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan IKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi -yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal.

IKM setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, IKM menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak IKM juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan.

Investasi, pendidikan dan latihan, serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, dan memperluaskan kesempatan kerja, serta industri kecil dan menengah mampu melakukan inovasi.

Terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Pemberdayaan IKM merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan visi Indonesia yang aman, adil dan sejahtera

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mintaroem (2002:15) bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah perlu adanya modal kerja dan investasi, salah satunya dengan melalui pengembangan kredit usaha kecil perbankan, dan sejenisnya. Selain itu juga pelunya kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi industri kecil dan menengah.

Kemudian secara empiris Handrimurtjahyo (2007:94), juga menemukan fakta empiris bahwa pertumbuhan industri kecil dan menengah signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita. Hasil penelitian di atas menunjukkan industri kecil dan menengah signifikan dalam mempengaruhi pendapatan per kapita dan kesempatan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap tema penelitian, tentang dinamika pertumbuhan industri kecil dan menengah, dan dampaknya terhadap pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja, maka dapat ditarik kesimpulan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah. Semakin tinggi PDRB atau pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pertumbuhan industri kecil dan menengah, atau sebaliknya semakin rendah PDRB atau pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah pertumbuhan industri kecil dan menengah. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah. Semakin tinggi investasi maka semakin tinggi pertumbuhan industri kecil dan menengah, atau sebaliknya semakin rendah investasi maka semakin rendah pertumbuhan industri kecil dan menengah. Pendidikan dan latihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah. Semakin tinggi pendidikan dan pelatihan maka semakin tinggi pertumbuhan industri kecil dan menengah, atau sebaliknya semakin rendah pendidikan dan pelatihan maka semakin rendah pertumbuhan industri kecil dan menengah.

PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pendapatan per kapita atau sebaliknya semakin rendah PDRB maka semakin rendah pendapatan per kapita. Industri kecil dan menengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Semakin tinggi industri kecil dan menengah maka semakin tinggi pendapatan per kapita, atau sebaliknya semakin rendah industri kecil dan menengah maka semakin rendah pendapatan per kapita. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Semakin tinggi investasi maka semakin tinggi pendapatan per kapita, atau sebaliknya semakin rendah investasi maka semakin rendah pendapatan per kapita. Kesempatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Semakin tinggi kesempatan kerja maka semakin tinggi pendapatan per kapita atau sebaliknya semakin rendah kesempatan kerja maka semakin rendah pendapatan per kapita.

PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi kesempatan kerja atau sebaliknya semakin rendah PDRB maka semakin rendah kesempatan kerja. Industri kecil dan menengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi industri kecil dan menengah maka semakin tinggi kesempatan kerja, atau sebaliknya semakin rendah industri kecil dan menengah maka semakin rendah kesempatan kerja. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi investasi maka semakin tinggi kesempatan kerja atau sebaliknya semakin rendah investasi maka semakin rendah kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Agmon, T. dan R. Drobnick (ed.), 1994. *Small Firms in Global Competition.* New York: Oxford University Press.

Baltagi, Badi H. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data* (2nd edition). New York: John Willey & Son, Ltd.

Barnum, H. N. and L. Squire. 1979. An Econometric Application of the Theory of the Farm-Household. *Journal of Development Economics*, (6): 79–102.

Biro Pusat Statistik. 2007. *Statistik Indonesia.* Sulawesi Selatan. Biro Pusat Statistik.

Departemen Koperasi dan UKM. 2007. *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah.* Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Devereux, Paul J. 2005. Do Employers Provide Insurance Against Low frequency Shocks? Industry Employment and Industry Wages. *Journal of Labor Economics,* 23(2): 313–340.

F. S. and I. J. Singh. 1974. *A Microeconemic Model of Farm Decisions in an LDC: A Simultaneous Equation Approach. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology*. Ohio: The Ohio University.

Golan, Limor. 2005. Counteroffers and Efficiency in Labor Markets with Asymmetric Information. *Journal of Labor Economics*, 23(2): 373–393.

Gronau, R. 1977. Leisure, Home Production and Work: The Theory of the Allocation of Time Revisited. *Journal of Political Economy*, 85(6): 1099–1123.

Gujarati, N. D. 1997. *Basic Econometrics.*, Singapore: Mc. Graw-Hill Book Company.

Hailuddin, 2006, *Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Akses Industri Kecil Manufaktur terhadap Perkreditan Lembaga Keuangan Perbankan* (*Studi pada Industri Kecil di Lombok Nusa Tenggara Barat*) Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung

Handrimurtjahyo. 2007. *Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Industri Kecil*: Kasus Pada Industri Gerabah dan Keramik Kasongan, Bantul, Yogyakarta.

Herliana. 2001. *Model Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Pengusaha dan pekerja Industri Kecil Kecap di Kabupaten Majalengka: Analisis Dampak kebijakan Harga*. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Hsiao, Cheng. 1995. Analysis of Panel Data, Reprinted-5th. *Econometric Society Monographs*, (11), Cambridge University Press.

James, H. Soltow. 1971. Entrepreneurial Strategy in Small Industry: Belgian Metal Fabricators. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 115(1): 32-64.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2003, *Laporan Akhir Pengkajian Strategis Tahap Lanjut Sentra Bisnis UKM Pasca Dukungan Program Perkuatan.*

Klevmarken, N. Anders. 2004. Estimates of a Labor Supply Function Using Alternative Measures of Hours of Work. *Journal Institute for The Study of Labor*.

Kristian Stokke, 1994 *Dynamic Growth or Pauperization? Small-Scale Industries in Hambantota District*, Swedish Society for Anthropology and Geography.

Mangkuprawira, S. 1985. *Alokasi Waktu dan Kontribusi Kerja Anggota Rumah Tangga dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus di Dua Tipe Desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Munasinghe, Lalith. and O'Flaherty, Brendan. 2005. Specific Training Sometimes Cuts Wages and Always Cuts Turnover. *Journal of Labor Economics*, 23(2).

Nelson, Robert., 2001, *Economics as Religion*. University Park PA, The Pennsylvania State University Press.

Pakasi, C. B. D. dan B. M. Sinaga. 1999. Dampak Kebijakan Harga Input dan Output terhadap Aktivitas Ekonomi rumahtangga Industri kecil Alkohol di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1): 34–49.

Panggabean, Riana. 2002. *Membangun Paradigma Baru dalam Mengembangkan UKM*. Jakarta: Dep. Kemetrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pemda Provinsi Sulewesi Selatan. 2004. *Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan*.

Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1991. *Econometric Models and Economic Forcasts* (3rd edition). New York: Third Edition. McGraw-Hill Inc.

Rahardjo, Dawam. 1996. *Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, dalam aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah* (*Studi Kasus Asean*). Jakarta: LP3ES.

Ranis, Gustav. 2004. Human Development And Economic Growth. Economic Growth Center Yale University. *Center Discussion Paper*, (887).

Rifai, Muhamad dan Soebiantoro. 2006. Dampak Kebijakan Pemerintah dan Pembinaan Usaha Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Lamongan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.

Rifai. 2006. Dampak Kebijakan Pemerintah dan Pembinaan Usaha Kecil terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Lamongan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi FE Universitas Malang*.

Sawit, M. H. 1994. Analisis Permintaan Pangan: Bukti Empiris Teori Rumahtangga Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi*, 13(2).

Sinaga, B. M. 1997. *Pendekatan Kuantitatif dalam Agribisnis*. Jurnal Sosial Ekonomi, 10(1): 48–64.

Singh, I., L. Squire and J. Strauss. 1986. *Agricultural Household Models: Extension, Application and Policy*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Suroso, Agus. 1995, *Peranan Lembaga Keuangan Formal dan Non-Formal dalam Pengembangan Industri Kecil* (*Suatu Survey di Provinsi Jawa Tengah*). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Syarif, Muhammad. 2007. Karakteristik Dinamis Pekerja Sektor Industri: Analisis Produktivitas Dan Fungsi Upah Pekerja Pada Industri Udang Beku Di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Unhas*, 4(1): 1-12.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. Kesiapan pekerja dalam Peningkatan Kualitas Hasil Industri/Jasa Menghadapi Persaingan Pasar Bebas. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, XLIV(3).

Wiboochutikula, 2001. *Small and Medium enterprises in Thailand.* The World Bank, Washington DC.

Wirasasmita, Yuyun. 2000. *Micro Economic Aspects of Small Scale Tradisional Family Enterprise,* Bandung: Wacana Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Guru Besar Universitas Padjadjaran.

Yotopoulus, P. A. and L. J. Lau. 1974. On Modeling the Agricultural Sector in Developing Economies. *Journal of Development Economics*, (1): 105–127.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 95–104
ISSN 1411-514X

Analisis Penawaran Tenaga Kerja Dosen PTN di Luar Tugas Pokok PNS

Madris
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.9. Makassar 90245
E-Mail: madriskandar@gmail.com

ABSTRACT

People's choice either to work or not theoretically is determined by the level of salary prevailing in the market, non labor income and degree of education as well as work experience of theirs. Lecturers have also work opportunities outside their main duty as civil servant (PNS). This research aims to know the influence of main work load, salary and functional allowance, work retention, chance for pursuing further education, performance and additional income on the labor supply of lecturers outside their main duty as civil servant. This research utilizes prime data with sample of lecturers as many 220 persons with minimum degree of education is post graduate (S2) and class IIIc. This sample is chosen by employing purposive sampling method. By utilizing regression analysis, the result obtained shows that among the six variables influencing labor supply of lecturers working as civil servants at government owned universities, there are four variables which have significant influence; they are main work load, salary or functional allowance, performance and additional income. The chance to get further education as well as work retention do not have significant influence on the use of spare time of lecturers at government owned universities outside their main duty as civil servant in the city of Makassar.

Keywords: civil servant, labor supply as lecturer.

ABSTRAK

Pilihan bekerja atau tidak secara teoritis ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku di pasar kerja, *non labor income* dan pendidikan serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Dosen secara individu memiliki penawaran tenaga kerja di luar tugas pokoknya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja pokok, gaji dan tunjangan fungsional, retensi kerja, pendidikan lanjutan, kinerja, serta upah kerja tambahan terhadap penawaran tenaga kerja dosen di luar pekerjaan pokok sebagai PNS. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi adalah dosen PTN yang berpendidikan minimal S2 dan golongan IIIc, sampel sebesar 220 responden, dipilih secara *purposive sampling*. Dengan menggunakan model analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara enam variabel yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dosen PTN di luar tugas sebagai PNS, terdapat empat variabel yang memilki pengaruh yang signifikan, yakni beban kerja pokok, gaji/tunjangan fungsional, kinerja dosen, serta upah kerja tambahan. Kesempatan menempuh pendidikan lanjutan, dan retensi kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan waktu luang dosen PTN di luar tugas pokok sebagai PNS di Kota Makassar.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), penawaran tenaga kerja dosen.

PENDAHULUAN

Dosen sebagai pekerja profesional, khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dituntut meningkatkan kinerjanya melalui empat aspek, yakni (1) melaksanakan pendidikan dan pengajaran, (2) melaksanakan penelitian, (3) melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan (4) unsur penunjang kegiatan dosen (lihat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999. Di samping itu, sebagai pegawai negeri sipil juga dituntut loyalitas, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, dan lain-lain yang kesemuanya tercermin dalam DP3 dosen yang dinilai setiap tahun. Hal ini mungkin dapat menggambarkan bahwa tenaga kerja dosen relatif berbeda dengan profesi lain, baik di lingkungan pegawai negeri sipil maupun di lingkungan BUMN dan BUMD.

Dari keempat tuntutan kinerja dosen tersebut, memungkinkan dosen dapat melakukan pekerjaan sebagai tenaga edukatif, tenaga riset, tenaga konsultatif dan tenaga atau pejabat struktural, bahkan jabatan politis jika mendapat izin atau restu dari negara atau lembaga tempat mengabdi.

Penawaran tenaga kerja dosen mengajar di luar jam kerja dosen sebagai pegawai negeri sipil tampak bahwa 55,70% dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta berstatus sebagai pengajar tidak tetap. Khusus untuk perguruan tinggi negeri (PTN) terdapat 40,79% dosen berstatus sebagai dosen tidak tetap (BPS, Kota Makassar, 2005).

Jika kita asumsikan, bahwa jam mengajar dosen tetap dengan dosen tidak tetap pada PTN adalah sama dan tidak ada status dosen luar biasa di PTN, maka total jam kerja dosen tetap PTN di luar pekerjaan utama sebagai PNS adalah sebanyak 40,79% dari total waktu mengajar di kampus sendiri. Dapat diperkirakan, bahwa setiap dosen akan menggunakan waktu luang (waktu di luar jam kerja wajib PNS) untuk mengajar di kampus sendiri paling kurang 6 SKS per minggu atau setara dengan 18 jam per minggu. Pekerjaan pokok adalah tugas kerja pokok dosen PNS dari PTN masing-masing, sedang pekerjaan tambahan adalah tugas tambahan dosen di luar tugas kerja pokok PNS, baik dari PTN maupun dari lembaga lainnya.

Ada dua hal yang diputuskan oleh individu dalam teori penawaran tenaga kerja. Pertama, apakah ikut dalam kegiatan pasar kerja (bekerja) atau tidak ikut dalam kegiatan pasar kerja (tidak bekerja). Kedua, keputusan untuk menentukan berapa banyak waktu yang disediakan untuk kegiatan pasar kerja (jumlah jam kerja) bila memutuskan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Pada umumnya seseorang akan bekerja bila tingkat upah di pasar kerja adalah sama atau lebih tinggi dari pada *reservation wage*-nya, yaitu upah minimal yang mendorong pemilik tenaga kerja bersedia memasuki pasar kerja dengan menawarkan sejumlah jam kerjanya.

Secara konseptual, penggunaan waktu untuk bekerja (kegiatan ekonomi) di sisi lain merupakan jumlah jam kerja yang ditawarkan di pasar kerja atau penawaran tenaga kerja individual (*individual labor supply*). Terkait dengan konsep tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji permasalahan sejauh mana pengaruh upah kerja tambahan, kinerja dosen, kesempatan menempuh pendidikan lanjutan, retensi kerja, beban kerja pokok, dan gaji/tunjangan fungsional terhadap penawaran tenaga kerja (jam kerja) dosen di luar pekerjaan pokok sebagai PNS.

METODE

Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tenaga edukatif (dosen) yang berpendidikan lanjutan Magister ke atas dan memiliki pengalaman kerja dengan pangkat terakhir lektor ke atas serta mengabdi pada PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sebagai pekerjaan utama. Hal ini menjadi hal terpenting, mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pengalokasian waktu kerja dosen di luar tugas utama sebagai PNS, yakni mengajar, membimbing, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTN tempat mereka mengabdi.

Pengambilan data dilakukan dengan metode survey, yakni dengan memilih sampel secara proporsional di antara populasi yang ada berdasarkan karakteristik pendidikan, dan pengalaman kerja (golongan/kepangkatan) dosen. Data hasil survey tersebut, merupakan data *cross-section*. Berdasarkan jumlah populasi dosen 1.718 orang diambil sampel

sebanyak 220 orang (12,80%), masing-masing 155 dosen Unhas dan 65 dosen UNM. Sebanyak 163 orang berpendikan S2 dan selebihnya 57 orang berpendidikan S3. Penentuan responden berdasarkan karakteristik sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada kuota tertentu.

Model Analisis

Persamaan regresi yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

(1) $Y_1 = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \mu_1$

(2) $Y_2 = \lambda_0 + \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \mu_2$

(3) $Y_3 = \gamma_0 + \gamma_1 Y_1 + \gamma_2 Y_2 + \gamma_3 X_1 + \gamma_4 X_2 + \mu_3$

(4) $Y_4 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_2 + \beta_3 Y_3 + \mu_4$

(5) $Y_5 = \alpha_0 + \alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2 + \alpha_3 Y_3 + \alpha_4 Y_{4+} \alpha_5 X_1 + \alpha_6 X_2 + \mu_5$

Dimana:

X_1 = Beban kerja pokok pokok diukur dengan jam kerja per minggu.

X_2 = Gaji/tunjangan fungsional dosen sebagai PNS per bulan.

Y_1 = Retensi kerja diukur dengan retensi kerja sebagai PNS (tahun).

Y_2 = Pendidikan lanjutan, yakni kesempatan menempuh pendidikan lanjutan diukur dengan lama masa studi (tahun).

Y_3 = Kinerja dosen diukur dengan total satuan kredit kenaikan pangkat/golongan dosen dalam satu tahun (dua semester) terakhir.

Y_4 = Upah kerja tambahan per jam kerja.

Y_5 = Jam kerja tambahan per minggu.

Kemudian α_i, β_i, γ_i, λ_i, dan θ_i, masing-masing adalah koefisien regresi yang menjelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lain secara fungsional.

HASIL

Beban kerja pokok diukur dengan jam kerja dosen, yakni kewajiban kerja sebagai pegawai negeri sipil per minggu. Satu satuan beban kerja pokok sama dengan 60 menit, jika jawaban responden berupa jumlah SKS (satuan kredit semester), maka satu SKS setara dengan 1 × 3 × 45 menit = 135 menit atau 2 jam 15 menit. Dengan rincian bahwa untuk 1 SKS akan digunakan 45 menit mempersiapkan bahan ajar, 45 menit mengajar (tatap muka di kelas) dan 45 menit berikutnya untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian, jika seorang dosen mendapat tugas 12 SKS, maka beban kerja pokok dalam hitungan kerja penuh (60 menit) adalah (12 SKS × 3 × 45)/60 menit, sama dengan 27 jam kerja per minggu atau 5,4 jam kerja per hari (lima hari kerja).

Berdasarkan formulasi beban kerja pokok dosen, maka dari 220 responden yang ada terdapat 60,46% dosen mendapat beban kerja pokok kurang dari 27 jam per minggu atau kurang dari 5,4 jam per hari (lima hari kerja) dan atau 12 SKS per minggu. Selebihnya 39,54% mendapat jam kerja 27 jam atau lebih per minggu (Tabel 1.).

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Jam Kerja sebagai PNS dan di Luar Tugas sebagai PNS per Minggu, di Kota Makassar

Jam Kerja per Minggu	Jumlah Dosen	Persentase
Beban kerja pokok sebagai PNS:		
< 27	133	60,46
≥ 27	87	39,54
di luar Tugas PNS:		
< 27	149	67,7
≥ 27	71	32,3
Total	220	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2007

Jika dibandingkan beban kerja pokok sebagai PNS dengan jam kerja tambahan (jam kerja di luar tugas PNS), maka menunjukkan bahwa rata-rata beban kerja pokok relatif lebih rendah daripada jam kerja tambahan, yakni antara 23,69 dengan 24,72 jam kerja per minggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi jam kerja dosen di luar tugas pokok sebagai PNS relatif lebih tinggi dibanding dengan beban kerja pokok dosen sebagai PNS. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah upah kerja tambahan relatif tinggi atau justru beban kerja pokok dosen relatif rendah, sehingga dosen banyak menawarkan jasa di luar tugas PNS?

Kemudian jika jam kerja ditotalkan, maka total jam kerja dosen per minggu sebesar 48,41 jam. Angka tersebut berada di atas total jam kerja normal karyawan/pegawai lainnya, yakni sebesar 40 jam per minggu (lima hari kerja). Ada kecenderungan bahwa dosen memiliki tipe pekerja keras (*work holic*), atau sebuah keterpaksaan karena tuntutan hidup.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Gambar 1., maka terlihat bahwa di antara 17 hubungan variabel secara fungsional, hanya 6 hubungan yang tidak signifikan (tidak memiliki tanda *).

PEMBAHASAN

Jam kerja tambahan dalam model SEM dipengaruhi oleh upah kerja tambahan, kinerja dosen, kesempatan menempuh pendidikan lanjutan, retensi kerja, gaji/tunjangan fungsional dan beban kerja pokok. Masing-masing variabel bebas tersebut akan dibahas secara parsial, baik dalam bentuk pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 1.

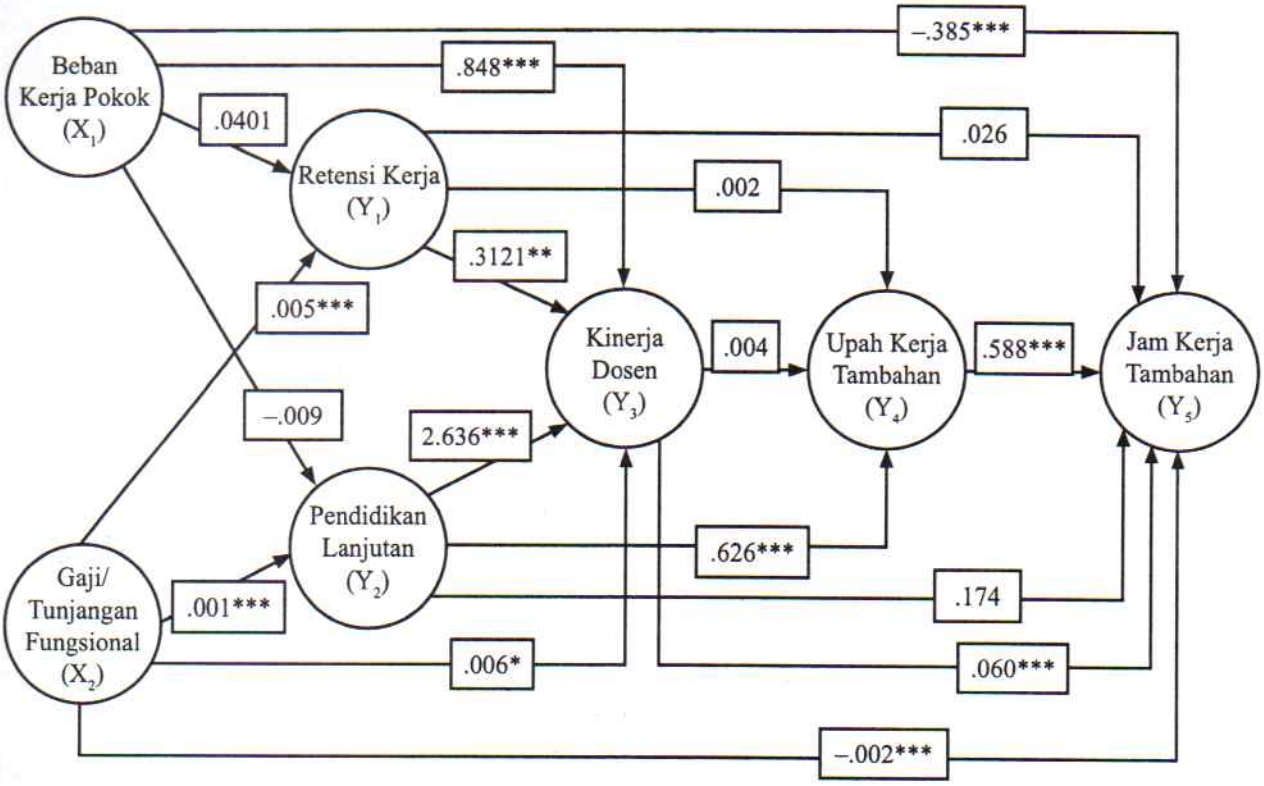

Keterangan:
Tanda panah (→): Arah pengaruh antar variabel.
*) Signifikansi pada tingkat signifikansi 10%
**) Signifikansi pada tingkat signifikansi 5%
***) Signifikansi pada tingkat signifikansi 1%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2007

Gambar 1. Hasil Estimasi: Pengaruh Langsung Masing-masing Variabel Bebas dalam Model SEM

Pengaruh Beban Kerja Pokok terhadap Jam Kerja Tambahan

Becker (1976) membagi waktu dalam 24 jam menjadi tiga bagian, yakni waktu untuk konsumsi (*consumption time*), waktu untuk pengembangan SDM (*time for investment in human capital*) dan waktu untuk bekerja (*time for work*). Kemudian terkait dengan teori penawaran tenaga kerja pembagian waktu hanya terbagi dua bagian, yakni waktu untuk bekerja dan waktu bukan untuk kerja (*leisure time*).

Jika konsep ini dikaitkan dengan beban kerja pokok dalam kaitannya dengan jam kerja tambahan, maka beban kerja pokok dapat dikategorikan sebagai waktu yang digunakan bukan untuk bekerja (*non maket activities*) atau kegiatan rumah tangga (*household activities*). Berdasarkan konsep tersebut, maka dihipotesiskan bahwa beban kerja pokok berpengaruh negatif terhadap jam kerja tambahan.

Telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan teoritis, bahwa tingkah laku penawaran tenaga kerja didasarkan pada konsep biaya alternatif (*opportunily cost*), sebab adanya pilihan seseorang untuk bekerja atau tidak bekerja ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku di pasar kerja (*shadow wage*), *non labor income*, pendidikan, dan pengalaman kerja yang dialami oleh masing-masing tenaga kerja (Becker, 1976; Smith, 1980 dan McConnell, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa beban kerja pokok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jam kerja PNS pada tingkat signifikansi 1%, sebesar –0,385230. Artinya, semakin tinggi beban kerja pokok, maka kesempatan dosen untuk bekerja di luar beban kerja pokok (pekerjaan tambahan) semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa jika jam kerja tambahan meningkat, maka dosen akan mengurangi waktu luangnya untuk kegiatan *leisure time* misalnya istirahat, olah raga, rekreasi, belajar, beribadah, dan lain-lain.

Jika beban kerja pokok diproksi dengan jumlah anak kurang dari 6 tahun yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga, maka hasil penelitian memperkuat hasil penelitian sebelumnya, yakni beban kerja pokok berpengaruh negatif terhadap jam kerja tambahan. Beberapa hasil studi empiris sebelumnya seperti Fergus (1995), Connely dan Graff (1996) dan Del-Boca (2002) menemukan bahwa jumlah anak kurang dari 6 tahun yang dimiliki berpengaruh negatif terhadap kesempatan wanita masuk ke pasar kerja.

Hal yang sama juga oleh peneliti lain seperti Klevmarken (2004), Bonin (2002), Connely (1996), dan Nurland (1993) di mana pada prinsipnya menemukan bahwa semakin tinggi beban kerja seseorang, maka akan berpengaruh negatif terhadap jam kerja yang ditawarkan pekerja di pasar kerja.

Implikasi dari hasil penelitian ini, jika beban kerja pokok meningkat, maka cenderung akan mengurangi penawaran tenaga edukatif di pasar kerja (jam kerja tambahan), tetapi jika dosen tetap mempertahankan jam kerja tambahan, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, dosen akan mengurangi *leisure time*, hal ini dapat berdampak pada kurangnya alokasi waktu luang untuk kegiatan pengembangan SDM dalam rangka peningkatan mutu modal manusia (*human capital*) atau dosen semakin tidak ada waktu tersisa untuk pengembangan mutu sosial manusia (*social capital*). Kemungkinan kedua adalah komitmen organisasional dosen akan semakin luntur, kepuasan kerja menurun dan berdampak terhadap stres.

Kedua hal tersebut dapat dieliminasi dengan intervensi kebijakan pemerintah melalui perbaikan sistem gaji/tunjangan fungsional, sebab gaji/tunjangan fungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran tenaga edukatif di luar tugas pokok PNS (jam kerja tambahan) pada tingkat signifikansi 5%.

Pengaruh Gaji/Tunjangan Fungsional terhadap Jam Kerja Tambahan

Smith (1980) dan McConnell (1999) mengemukakan bahwa total pendapatan (*full income*) terdiri atas pendapatan karena bekerja (*labor income*) dan pendapatan bukan karena bekerja (*non labor income*).

Oleh karena penawaran tenaga kerja yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah jam kerja tambahan, maka gaji/tunjangan fungsional dianggap sebagai *non labor income*, setara dengan pendapatan anggota keluarga lainnya, deposito, sewa rumah, keuntungan perusahaan dan bentuk *transfer payment* lainnya.

Secara teoritis (McConnell, 1999) mengemukakan bahwa semakin tinggi *non labor income*, maka dorongan untuk mengkonsumsi barang non pasar (*leisure time*) semakin tinggi, sehingga mengurangi konsumsi untuk kegiatan pasar (*time for work*). Kegiatan pasar adalah kegiatan yang terkait dengan moneter, yakni kegiatan yang mendapat balas jasa berupa gaji, upah, honor, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 1., menunjukkan bahwa gaji/tunjangan fungsional (dipandang sebagai *non labor income*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jam kerja tambahan pada tingkat signifikan 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi gaji/tunjangan fungsional yang diterima oleh dosen, maka akan cenderung mengurangi penawaran jam kerja dosen di luar kegiatan utama sebagai PNS yang diukur dengan jam kerja tambahan (hipotesis diterima).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya, Gronau (1977) menemukan bahwa meningkatnya penghasilan suami cenderung menurunkan jam kerja istri, di mana pendapatan suami merupakan *non labor income* bagi istri. Demikian juga hasil penelitian Klevmarken (2004), bahwa tingkat pendapatan (*virtual income*) berpengaruh negatif terhadap jam kerja, baik laki-laki maupun perempuan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah beban kerja pokok cenderung akan mengurangi jam kerja tambahan, kecuali jika ada perbaikan gaji/tunjangan fungsional, sehingga tugas pokok dosen dapat lebih optimal, lebih profesional dan lebih konsen terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatan fungsional.

Rencana dan target Universitas Hasanuddin misalnya, bahwa dosen harus memiliki "Sertifikat Mengajar" sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar dosen di samping memiliki kemampuan mengajar secara reguler, juga sebagai *tutor* adalah hal yang amat penting, tetapi jika hal tersebut tidak diimbangi dengan balas jasa yang lebih proporsional dan lebih manusiawi, maka kemampuan dosen tersebut akan lebih banyak digunakan pada jam kerja tambahan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi PTN ke depan jika benar-benar PTN harus dijadikan sebagai Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHP), di mana PTN diberi kewenangan untuk mencari sumber-sumber dana sendiri untuk membiayai pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pengaruh Retensi Kerja terhadap Jam Kerja Tambahan

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Becker (1976) dan Smith (1980), bahwa pengalaman kerja seseorang akan berdampak positif terhadap permintaan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja memiliki pilihan berapa jam kerja yang ditawarkan di pasar kerja. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa masa kerja (pengalaman kerja) PNS berpengaruh positif terhadap jam kerja tambahan sebesar 0,02602 (sesuai dengan hubungan teoritis), meskipun tidak signifikan (Gambar 1.).

Jika retensi kerja diproksi dengan umur, maka pengaruh positif tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya antara lain Bonin (2002), Euwals (1999), dan Sugiharso (1996), menemukan bahwa pada umur muda hubungan antara jam kerja dengan umur positif, kemudian berubah menjadi negatif pada umur tua setelah mencapai titik maksimum. Model ini adalah model *universal* penawaran tenaga kerja yang dikaitkan oleh umur tenaga kerja.

Kecenderungan retensi kerja berpengaruh positif terhadap jam kerja memberi indikasi bahwa dosen belum melewati titik belok maksimum penawaran tenaga kerja menurut umur, artinya umur dosen masih relatif muda, tetapi data menunjukkan terbalik di mana 86,82% responden memiliki umur 40 tahun ke atas. Kondisi ini dimungkinkan karena gaji/tunjangan fungsional relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak, kebutuhan investasi di bidang pengembangan karir (pendidikan) serta pengembangan SDM keluarga dosen. Dengan demikian, mendorong dosen untuk bekerja lebih lama di luar beban kerja pokok dosen, meskipun umur rata-rata di atas 40 tahun (relatif tua) dan masa kerja dominan di atas 15 tahun. Anggapan yang menyatakan bahwa dosen mengalokasikan waktu luang di pasar kerja tambahan bukan karena upah kerja tambahan tinggi, tetapi dimungkinkan karena jam tanggungan rumah tangga dosen memaksa untuk menambah jam kerja tambahan menjadi alasan yang lebih relevan.

Tidak signifikannya pengaruh retensi kerja terhadap jam kerja tambahan kembali mengindikasikan bahwa di pasar tenaga kerja edukatif (jam kerja tambahan) tidak berbeda nyata antara dosen yunior dengan dosen senior. Terkesan ada indikasi terjadinya persaingan tidak sehat antara dosen senior dengan yunior. Pasar kerja tenaga edukatif di luar beban kerja pokok terkesan mengedepankan hubungan emosional (*like and dislike*), hubungan kekerabatan dan bentuk-bentuk nepotisme lainnya ketimbang masalah kompetensi dan profesionalisme.

Pemberlakukan aturan baku yang lebih ketat tentang persyaratan pangkat/golongan, dan kompetensi, termasuk sertifikasi dosen adalah suatu langka yang cukup bijaksana.

Pengaruh Pendidikan terhadap Jam Kerja Tambahan

Ditinjau dari segi permintaan tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka mutu SDM semakin baik, sehingga permintaan semakin meningkat. Namun, dari sisi penawaran tenaga kerja, semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi produktivitas marjinal dan semakin tinggi upah per jam kerja, sehingga pendapatan semakin tinggi. Pendapatan tinggi akan mendorong *leisure time* semakin meningkat dan tentu saja akan menurunkan jam kerja asumsi efek pendapatan lebih tinggi daripada efek subtitusi.

Jadi dari sisi permintaan, semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung berdampak positif terhadap jam kerja, sebaliknya dari sisi penawaran, semakin tinggi pendidikan cenderung berdampak negatif pada penawaran tenaga kerja.

Jika penelitian ini dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, maka ada indikasi bahwa tenaga kerja edukatif dari PTN masih sangat diminati di pasar kerja. Ada dua kemungkinan hal tersebut terjadi, pertama adalah kualitas kerjanya semakin baik sebagai dampak dari pendidikan yang semakin meningkat. Kedua, balas jasa yang diberikan (upah) oleh pengguna jasa relatif murah per satuan waktu tertentu. Kondisi tersebut didukung oleh data di mana tingkat upah kerja tambahan relatif lebih rendah daripada upah/tunjangan fungsional.

Sebaliknya, jika hasil penelitian ini dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, maka memberi indikasi bahwa dosen belum mencapai titik jenuh dalam memanfaatkan waktu luang dalam kegiatan ekonomi tambahan (jam kerja tambahan). Hal tersebut dimungkinkan karena *non labor income* (gaji/tunjangan fungsional) yang dimiliki relatif rendah termasuk keinginan mengembalikan biaya pendidikan secara langsung dan *opportunity cost* yang hilang dalam rangka penyelesaian pendidikan lanjutan.

Pengaruh pendidikan yang tidak signifikan tersebut, dimungkinkan karena pasar kerja dosen di luar kegiatan pokok dosen pada masing-masing tingkat pendidikan S2, S2 plus dan S3 memiliki pangsa pasar tersendiri atau terjadi pasar tenaga kerja yang tidak kompetitif berdasarkan tingkat pendidikan, sehingga tidak harus antri menunggu peluang alternatif terakhir berdasarkan tingkat pendidikan.

Implikasinya akan terjadi ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan dunia usaha (jenis pekerjaan), sehingga tenaga edukatif kurang berminat menyelesaikan pendidikan tinggi setingkat Doktor (S3). Suatu kebijakan yang cukup strategis ketika sebuah PTN memberlakukan aturan bahwa yang dapat mengajar program Sarjana (S1) atau Magister (S2) hanya dosen yang memiliki ijazah Magister (S2) atau Doktor (S3) dalam rangka mendorong mutu pengajaran dan alumni PTN yang lebih berkualitas.

Pengaruh Kinerja Dosen terhadap Jam Kerja Tambahan

Dari sisi permintaan tenaga kerja, peluang karir yang jelas akan berdampak pada motivasi kerja, dan motivasi kerja yang tinggi akan berdampak pada kinerja yang lebih tinggi. Melalui kinerja (prestasi kerja) permintaan tenaga kerja meningkat. Kemudian dari sisi penawaran tenaga kerja peluang karir akan berdampak positif terhadap jam kerja. Bagi individu yang memiliki kebutuhan yang tinggi akan pengembangan karirnya, maka akan berdampak pada motivasi kerja yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan menawarkan jasa di pasar kerja (retensi kerja) lebih lama.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kinerja dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap jam kerja tambahan pada tingkat signifikansi 1% (hipotesis diterima). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung tinjauan teoritis pasar tenaga kerja, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan.

Kemudian dari sisi permintaan, memberi indikasi bahwa semakin tinggi kinerja seseorang, maka diyakini produktivitas marjinalnya semakin tinggi, sehingga peluang kerja di luar tugas pokok sebagai PNS semakin tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi kinerja dosen maka semakin tinggi jam kerja tambahan.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, memberi indikasi bahwa dosen yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai suatu peluang karir (pangkat/golongan fungsional atau struktural) tertentu akan berdampak pada penggunaan waktu luang untuk kegiatan ekonomi di luar tugas pokok PNS yang semakin tinggi, sehingga kinerja dosen berdampak positif terhadap jam kerja tambahan.

Implikasinya, dosen yang memiliki kinerja tinggi, dari sisi permintaan akan semakin tersedia peluang kerja yang lebih baik, masalahnya tergantung pada jumlah jam kerja yang bersedia dipasarkan di pasar kerja tambahan. Jika mekanisme pasar berjalan dengan baik (*perfect competition*), maka akan tercapai tingkat kepuasan kerja maksimum (optimum), yakni ketika *Value Marginal Physical Product of Labor* sama dengan *Wage* (VMPPl = W).

Pengaruh Upah Kerja Tambahan terhadap Jam Kerja Tambahan

Seperti yang telah dikemukakan pada tinjauan teoritis, bahwa upah memiliki pengaruh positif dan atau negatif terhadap penawaran tenaga kerja individual. Dengan kata lain, ketika upah naik maka jam kerja meningkat, sebaliknya kemungkinan yang lain pada saat upah naik justru jam kerja yang ditawarkan menurun.

Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja, jika efek pendapatan (*income effect*) lebih rendah daripada efek substitusi (*substitution effect*). Sebaliknya, kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan berkurangnya jam kerja, jika *income effect* lebih tinggi daripada *substitution effect* (McConnell, 1999).

Jika tinjauan teoritis dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa upah kerja tambahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jam kerja tambahan pada tingkat signifiksi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa efek pendapatan (*income effect*) lebih rendah daripada efek substitusi (*substitution effect*), dengan kata lain pengaruh kenaikan upah kerja tambahan terhadap jam kerja tambahan lebih tinggi daripada dampak *non labor income* (gaji/tunjangan fungsional) terhadap penawaran tenaga kerja edukatif (jam kerja tambahan). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Klevmarkin (2004) di mana pada hari kerja jika upah naik, maka jam kerja akan naik.

Hasil penelitian ini memberi indikasi bahwa penawaran tenaga kerja edukatif pada PTN (Unhas dan UNM sebagai sampel), bahwa upah kerja tambahan merupakan faktor yang relatif dominan pengaruhnya dibandingkan dengan variabel lainnya dalam model penawaran tenaga kerja (Gambar 1.). Model penawaran tenaga kerja edukatif dari hasil penelitian ini memiliki pola yang bersifat universal didukung oleh landasan teoritis dan beberapa studi empiris sebelumnya.

Implikasi dari hasil penelitian ini, bahwa jika upah kerja tambahan (*labor income*) lebih tinggi daripada gaji/tunjangan fungsional (*non labor income*), maka dosen akan tetap cenderung memposisikan kesempatan kerja pokok (beban kerja pokok) sebagai alternatif terakhir, kecuali jika ada aturan yang mengikat dan memilki sanksi administrasi yang termuat dalam statuta PTN yang bersangkutan.

Analog dengan hal tersebut di atas, jika program-program ekstensi (program S1, reguler sore), program studi Magister (S2) reguler dan non reguler (*executive class*) dan program studi Doktor (S3) menggunakan standar upah kerja tambahan lebih rendah dari upah kerja tambahan di luar program tersebut, maka cenderung akan mendapatkan pelayanan jasa dosen yang relatif kurang memadai dibanding dengan kesempatan kerja lainnya sebagai dampak dari tingkat balas jasa yang relatif rendah. Ada fenomena pada program pascasarjana, ketika dosen mempunyai peluang kerja yang lebih baik, maka komitmen organisasional luntur, paling tidak dalam jangka waktu singkat.

Fenomena tersebut adalah hal yang normal saja, sebab dosen adalah manusia yang rasional. Dosen berada pada posisi tarik-menarik antara idealisme intelektual sebagai pendidik dengan sebagai pekerja komersial, seperti layaknya bentuk profesi lainnya yang selalu menggeliat di tengah arus kapitalisme pada era neo liberalisme dewasa ini.

Kemudian jika hasil penelitian ini dikaitkan dengan rencana pemerintah menjadikan PTN sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP), di mana PTN dikelola secara otonomi, dan pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada PTN yang bersangkutan, maka tantangan ke depan adalah penawaran tenaga kerja edukatif (jam kerja tambahan) sangat ditentukan oleh tingkat upah pada PTN yang bersangkutan. Jika BHP diberlakukan, maka hal tersebut akan berimplikasi pada sumber-sumber pendanaan PTN secara otonom.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fungsi kinerja dosen, beban kerja pokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen yang memberi indikasi bahwa dosen memiliki kompetensi kerja yang relatif tinggi. Implikasinya adalah penambahan jam kerja masih akan berdampak positif terhadap kinerja.

Beban kerja pokok berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan menempuh pendidikan lanjutan. Pengaruh beban kerja pokok terhadap retensi kerja juga menunjukkan tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa beban kerja pokok belum berdampak serius terhadap potensi pengunduran diri sebagai dosen.

Pengaruh gaji/tunjangan fungsional terhadap kinerja dosen adalah positif dan signifikan. Hal ini memberi indikasi bahwa kinerja dosen sangat tergantung pada gaji/tunjangan fungsional yang diterima secara berkala setiap bulan. Pengaruh gaji/tunjangan fungsional terhadap retensi kerja juga menunjukkan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Kemudian gaji/tunjangan fungsional yang tinggi akan berdampak pada stres rendah, komitmen organisasional dan kepuasan kerja tinggi. Gaji/tunjangan fungsional juga menunjukkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan menempuh pendidikan lanjutan. Ini berarti bahwa bagi dosen PTN ada bagian gaji/tunjangan fungsional mereka yang dialokasikan untuk pengembangan diri melalui pendidikan formal lanjutan.

Retensi kerja dan kesempatan menempuh pendidikan lanjutan adalah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Karenanya penelitian ini mendukung asumsi dan prediksi teori *human capital.*

Berdasarkan analisis fungsi upah kerja tambahan, hanya faktor pendidikan lanjutan yang berpengaruh signifikan pada analisis fungsi upah kerja tambahan. Ini mengungkapkan bahwa tidak ada cara lain untuk memperbaiki penghasilan kerja tambahan dosen, kecuali dengan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan.

Dari analisis fungsi penawaran tenaga kerja dosen dengan menggunakan SEM, ditemukan bahwa meningkatnya beban kerja pokok dosen cenderung akan menurunkan jam kerja tambahan selama gaji/tunjangan fungsional juga mengalami kenaikan. Di luar dari cara ini dosen akan cenderung tidak loyal terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok di PTN tempat mengabdi.

DAFTAR PUSTAKA

Addison, John T and Pedro Portugal, 1989. Job Displacement, Relative Wage Changes and Duration of Unemployment. *Journal Labor Economics,* 7: 281-302.

Angrist, Joshua and Victor Lavey, 2001. Does Teacher Training Affect Pupil Learning? Evidence from Mached Comparisons in Jerussalem Public Schools. *Journal Labor Economics,* 19: 241-369.

Bach, George Leland, *et. al.*, 1987. *Economics: Analysis, Decision Making, and Policy* (11th edition). USA: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J.

Baker, Michael, Dwayne Banjamin and Shuchita Stanger, 1999. The Hings and Lows of the Minimum Wage Effect: A Time Series Cross-Section Study of the Canadian Law. *Journal Labor Economics,* Vol. 17: 318-350.

Becker, Gary S. 1976. *The Allocation of Time and Goods Over Time, in The Economic Approach to Human Behavior.* Chicago: The University Chicago Press.

Beegle, Kathleen. 2003. The Labor Market Effects of Disability Discrimination Laws. *The Journal of Human resources,* 38: 806 -859.

Beglay, Thomas M. and Josep M. Czajka, 1993. Panel Analysis of The Moderating Effects of Commitment on Job Statisfaction, Intent to quit, and Healt Following Oganizational Change. *Journal of Applied psychology,* 78(4): 552-556.

Belzil, Chiristian, 2000. Job Creation and Job Destruction, Worker Reallocation, and Wages. *Journal Labor Economics,* 18: 183-203.

Bonin, Holger, *et. al.*, 2002. Household Labour Supply Effect of Low-Wage Subsidies in Germany. *Journal Institute for The Study of Labour.*

Connely, Rachel and Deborah S. De Graff. 1996. Women's Employment and Child Care in Brazil. *Journal Economic Development and Change*, 44(3).

Del-Boca, Daniel, 2002. The Effect of Child Care and Part Time Opportunities on Participation and Fertility Decisions in Italy. *Journal Institute for the Study of Labor.*

Dickens, Richard and Alan Manning, 1999. The Effects of Minimum Wages on Employment: Theory and Evidence from Britain. *Journal Labor Economics,* 17: 1-22.

Euwals, Rob and Van Soest, A, 1999b. Female Labor Supply, Flexibily of Working Hours, and Job Mobility in Netherlands. *Journal Institute for The Study of Labour.*

Fergus D. J. dan Dia Widyawati. 1995. *Dampak Jumlah dan Umur Anak Terhadap Kecenderungan Bekerja Perempuan Menikah: dalam Pasar Kerja dan Produktivitas di Indonesia.* Jakarta: Kantor Menteri Negara/BKKBN.

Gronau, R. 1977. Leisure, Home Production and Work: The Theory of the Allocation ot the Revisited. *Journal of Political Economy,* 85: 1099-1124.

Hellerstein, Judith K. and David, Neumark, 1999. Wages, Productivity, and Worker Charasteristic: Evidence from Plant-Level Production Functions and Wage Equatuion, *Journal Labor Economics,* 17: 409-446. The University of Chicago Press.

Klevmarken, N.Anders, 2004. Estimates of a Labour Supply Function Using Alternative Measures of Hours of Work. *Journal Institute for The Study of Labor*.

McConnell, Campbell R. and Stanley L. Brue. 1999. *Contemporary Labor Economics* (1th edition). Singapore: Mc Graw-Hill International Editions.

Nurland, Faridah, 1993. *Alokasi Waktu dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Etnis Bugis, Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan.* Disertasi Doktor, Program Pascasarjana KPK IPB-Unhas, Makassar: tidak diterbitkan.

Smith J. P., 1980. *Famela Labor Supply: Theory and Estimation*. Editor James P. Smith. Prenceton, New Jersey.

Sugiharso, 1996. Karakteristik Pengusaha Kecil di Indonesia: Analisis Fungsi Penawaran dan Permintaan. *Jurnal Ekonomi UKI*, VI.

Terrell, Katherine, 2004. Legal Minimum Wage and the Wages of Formal and Informal Sector Workes in Costa Rica. *Journal Institute of the Study of Labor.*

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 105–115
ISSN 1411-514X

Determinan dan Strategi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi

Caska
Pusat Penelitian Kependudukan
Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau
Jl. HR. Subrantas KM 12,5 Pekanbaru Riau Indonesia 28293
E-Mail: riodirgantoro@yahoo.com

ABSTRACT

This research is purposed to (1) describe the growing of cooperative business cluster; (2) the factors are determining the growing of cooperative business cluster; (3) development strategy of cooperative business cluster. This research used descriptive method. The results shows: first, the leading bisnis sector of cooperative business clusters are planting palm, trading of basic needs and input goods, credit, transportation, and CPO factory. Second, determining factors of cooperative business cluster growing are innovation of member; low cost and differentiation product; competitive price and specialization; and displacement. Third, development strategy of cooperative business cluster are market driven, inclusive, collaborative, strategic, value creating, and government policy.

Keywords: cooperative business cluster, market driven, inclusive, collaborative, palm.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Gambaran tumbuhnya klaster bisnis koperasi; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya klaster bisnis koperasi; dan (3) Strategi pengembangan klaster bisnis koperasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis statistika deskriptif dan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, klaster bisnis koperasi yang tumbuh yaitu: pembibitan kelapa sawit, perdagangan sembako, obat-obatan, pupuk, simpan pinjam, transportasi, penyediaan bahan bakar minyak, dan usaha pabrik pengolahan kelapa sawit. Kedua, tumbuhnya klaster bisnis koperasi disebabkan faktor-faktor, seperti: inovasi/kreativitas anggota; biaya rendah dan diferensiasi produk; keunggulan harga dan spesialisasi; dan *displacement*. Ketiga, pengembangan klaster bisnis koperasi dapat menggunakan strategi-strategi: *market driven*, *inclusive*, *collaborative*, *strategic*, *value creating*, dan dukungan pemerintah.

Kata Kunci: klaster bisnis koperasi, *market driven*, *inclusive*, *collaborative*, kelapa sawit.

PENDAHULUAN

Pengertian klaster dalam banyak literatur didefinisikan beragam dan banyak jenis-jenis klaster. Menurut Porter (2008) klaster dapat dibagi menurut adopsi teknologi anggotanya, yaitu: (1) klaster teknologi (kelompok dengan sadar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern) dan (2) klaster *know-how* (anggota kelompok menggunakan pengalaman dan pengetahuan turun-temurun).

Asia Development Bank (ADB) membagi klaster menurut dinamika anggotanya menjadi (1) klaster dinamis (*viable*) dan (2) klaster tidur (*dormant*). Sementara literatur-literatur lainnya kebanyakan membagi klaster menjadi (1) klaster regional (lebih menitikberatkan pada pengelompokkan usaha dalam satu wilayah dengan batasan yang jelas, atau (2) klaster bisnis (menitik beratkan pada jejaring kerja sama antar perusahaan untuk saling berbagi kompetensi dan sumber daya).

Dalam penelitian ini klaster yang dimaksud adalah dalam pengertian terakhir, yaitu klaster bisnis khususnya yang bergerak di bidang agribisnis kelapa sawit yang menitikberatkan pada jaringan kerja sama antar perusahaan untuk berbagi kompetensi dan sumber daya, sehingga terjadi sinergi yang saling menguntungkan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau, karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan, karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas yang mencapai 1.676.982 hektar pada tahun 2008, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2009). Luas areal kelapa sawit akan terus berkembang untuk masa-masa akan datang, karena tingginya minat masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS).

Saat krisis keuangan global terjadi di Amerika pada akhir tahun 2008, petani kelapa sawit di Provinsi Riau mengalami dampak langsung, yaitu berupa penurunan harga tandan buah segar (TBS) dari Rp 1.250,00 menjadi Rp 400,00 per kilogram (hasil survei lapangan, tahun 2009). Hal ini dapat dimaklumi karena produksi kelapa sawit Indonesia khususnya kelapa sawit dari daerah Riau merupakan bahan baku ekspor CPO ke beberapa negara yang mengalami krisis keuangan global. Ekses dari penurunan harga tersebut berdampak kepada semua aspek kehidupan petani dan pengusaha agribisnis kelapa sawit terutama menurunnya pendapatan, menurunya daya beli, dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit salah satunya membangun kelembagaan perkebunan yang kokoh dan mandiri melalui revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku usaha pada agribisnis kelapa sawit (kelompok tani, asosiasi petani dan gabungan asosiasi petani kelapa sawit, koperasi petani kelapa sawit dan dewan minyak sawit, serta organisasi lain) melalui inovasi kelembagaan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005). Melalui inovasi kelembagaan ini diharapkan dapat melakukan program diversifikasi produk turunan dan peningkatan daya saing. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan diversifikasi produk dan peningkatan daya saing melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pendekatan ini sangat tepat karena UKM dapat dilakukan secara masal berdasarkan potensi yang dimiliki para pelaku agribisnis kelapa sawit setempat.

Usaha Kecil dan Menengah yang melakukan sebuah kerja sama dalam bentuk klaster akan mendapatkan berbagai manfaat, yaitu: (1) kerja sama horizontal, misalnya bersama UKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai (*value chain*) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil secara individual, dan dapat memperoleh input pembelian curah, serta mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan dan menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order

skala besar; (2) integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata rantai pasokan), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal; (3) kerja sama antar perusahaan juga memberikan kesempatan tumbuhnya ruang belajar secara kolektif untuk meningkatkan kualitas produk dan pindah ke segmen pasar yang lebih menguntungkan; dan (4) jaringan bisnis di antara perusahaan, penyedia jasa layanan usaha (misalnya institusi pelatihan, sentra teknologi, dan lain-lain) dan perumus kebijakan lokal, dapat mendukung pembentukan suatu visi pengembangan lokal bersama dan memperkuat tindakan kolektif untuk meningkatkan daya saing UKM (Sri Lestari Hs, 2009).

Dengan memperhatikan berbagai manfaat dari kerja sama dalam bentuk klaster bisnis, maka pengembangan UKM dalam bentuk klaster bisnis akan dapat menjadi alat yang baik untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UKM dalam mengatasi persaingan dalam suatu lingkungan pasar yang semakin kompetitif.

Dengan memfasilitasi penumbuhan sentra ke klaster diharapkan sebagian sentra telah mulai mengembangkan dirinya dengan melakukan kerja sama dan interaksi yang lebih terarah untuk mengembangkan daya saing produknya dan menumbuhkan ciri-ciri klaster. Penumbuhan sentra ke klaster ini dibuat dengan keyakinan bahwa dalam klaster unit usaha cenderung lebih efisien, sehingga meningkatkan daya saing produk sentra.

Penelitian ini lebih diarahkan pada dinamika transformasi sentra ke klaster di sektor agribisnis kelapa sawit. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan: (1) luasnya area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk di sekitarnya; (2) menurut hasil kajian sebelumnya, sentra-sentra yang bergerak di sektor agribisnis ini memiliki kesiapan dan peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi klaster bisnis; dan (3) pengembangan sentra ke klaster merupakan salah satu wahana untuk memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah: (1) bagaimana efektivitas penumbuhan klaster bisnis koperasi pada sentra-sentra usaha yang bergerak di sektor agribisnis kelapa sawit?; (2) faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi penumbuhan klaster bisnis koperasi yang berbasis agribisnis kelapa sawit?; dan (3) bagaimana pola dan strategi penumbuhan klaster bisnis koperasi berbasis agribisnis kelapa sawit?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan potret efektivitas dari penumbuhkan klaster bisnis, mensintesis pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan masukan bagi penyusunan program penumbuhan klaster bisnis koperasi, dan mengusulkan rekomendasi tindakan dan kebijakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penumbuhan klaster bisnis koperasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar. Kabupaten tersebut dijadikan objek penelitian dengan pertimbangan: (a) kabupaten tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau merupakan bagian dari pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit; dan (b) Kabupaten Kampar dikembangan perkebunan plasma kelapa sawit dengan perusahaan negara sebagai inti.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sentra usaha yang melakukan agribisnis kelapa sawit yang berhasil berevolusi menjadi klaster agribisnis kelapa sawit.

Responden penelitian ini adalah anggota sentra agribisnis kelapa sawit (petani dan pengusaha agribisnis kelapa sawit) dan klaster agribisnis kelapa sawit (pengurus/pengelola koperasi) sebanyak 60 responden.

Klaster yang dijadikan sampel dipilih dengan cara *purposive* di antara daerah/lokasi penelitian yang telah ditentukan dengan kriteria: (1) merupakan sentra agribisnis kelapa sawit, (2) menghasilkan produk yang

berhubungan dengan pengolahan produk agribisnis kelapa sawit, (3) memiliki salah satu karakteristik sentra dinamis, dan (4) terjangkau dan mungkin untuk diliput dalam batas waktu pelaksanaan penelitian.

Responden anggota klaster dipilih mengikuti metode *purposive* karena dalam klaster bisnis, anggota klaster tidak melaksanakan kegiatan yang seragam dan memiliki aktivitas yang saling berhubungan untuk melengkapi rantai pemasok/rantai nilai produk klaster. Dengan demikian, pemilihan sampel anggota klaster akan menggunakan metode *purposive* setelah memperhatikan peta klaster dan peta rantai pasokan yang dibuat. Kriteria pemilihan yang digunakan adalah (1) kegiatannya berhubungan dengan dinamika penumbuhan dan pengembangan klaster koperasi berbasis agribisnis kelapa sawit, (2) berdomisili atau memiliki kegiatan yang berhubungan dengan klaster yang diamati di daerah penelitian, (3) dapat dijangkau dan mungkin diliput dalam batas waktu pelaksanaan penelitian, dan (4) bersedia menjadi responden penelitian. Jika responden/perusahaan anggota klaster yang terpilih tidak dapat/tidak bersedia menjadi responden, maka responden akan dialihkan ke perusahaan lain dari jenis kategori yang serupa dalam klaster yang sama.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif tetap merupakan analisis yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini. Data diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan disajikan berdasarkan kesamaan karakteristik, yaitu dibandingkan untuk memahami fenomena yang kontras, atau diolah agar mudah digunakan untuk pengolahan analisis statistika deskriptif maupun statistika inferensial.

Analisis Faktor

Analisis faktor digunakan untuk menarik garis batas antara sentra yang dipersepsikan berhasil dan yang gagal berkembang menjadi klaster bisnis. Informasi hasil analisis ini memberi pengetahuan tentang faktor dominan yang mendukung keberhasilan pengembangan klaster bisnis koperasi berbasis agribisnis kelapa sawit.

HASIL

Perkembangan Klaster Bisnis Koperasi di Kabupaten Kampar

Gambaran tentang tumbuhnya klaster bisnis koperasi yang dapat meningkatkan daya saing, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 1. sampai dengan Tabel 8.

Tabel 1. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Efisiensi Biaya di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Efisiensi Biaya	Frekuensi	Persentase (%)
Klaster Bisnis Koperasi Inefisiensi	17	28,3
Klaster Bisnis Koperasi Efisiensi	43	71,7
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Tabel 1. dapat dilihat efisiensi biaya dibandingkan pesaing klaster untuk aspek volume produksi, daerah pemasaran produk, dan omzet penjualan pasar lokal, regional, maupun ekspor menunjukkan bahwa 71,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori efisien dan sisanya 28,3% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori tidak efisien.

Tabel 2. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Keunggulan Harga di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Keunggulan Harga	Frekuensi	Persentase (%)
Klaster Bisnis Koperasi Tidak Unggul	16	26,7
Klaster Bisnis Koperasi Unggul	44	73,3
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Tabel 2. dapat dilihat keunggulan harga dibandingkan pesaing klaster untuk aspek keuntungan usaha dan struktur biaya menunjukkan bahwa 73,3% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori

unggul dan sisanya 26,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori tidak unggul.

Tabel 3. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Identitas Produk Klaster di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Identitas Produk Klaster	Frekuensi	Persentase (%)
Klaster Bisnis Koperasi Tidak Dikenal	25	41,7
Klaster Bisnis Koperasi Dikenal	35	58,3
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Tabel 3. dapat dilihat identitas produk klaster menunjukkan bahwa 58,3,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori masyarakat di sekitar klaster mengenal nama, produk, merek produk yang dihasilkan klaster dan sisanya 41,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori masyarakat di sekitar klaster tidak mengenal nama, produk, merek produk yang dihasilkan klaster.

Tabel 4. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Spesialisasi di Kabupaten Kampar

Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui Spesialisasi di Kabupaten Kampar	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak terjadi Spesialisasi	24	40,0
Terjadi Spesialisasi	35	60,0
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Tabel 4. dapat dilihat munculnya spesialis usaha pada aktivitas pembentukan rantai klaster dilihat dari aspek jumlah lini produk; *product depth* dan cakupan produk sebelum dan sesudah model; produk yang dibuat sebelum klaster; produk yang dibuat setelah klaster; produk sesudah klaster dalam rangka mengisi rantai pasokan klaster bahwa 60% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori terjadi spesialisasi dan sisanya 40% klaster bisnis koperasi yang terbentuk dalam kategori tidak terjadi spesialisasi.

Tabel 5. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Deadweight* di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Deadweight*	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak terjadi *Deadweight*	22	36,7
Tidak *Deadweight*	38	63,3
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Tabel 5. dapat dilihat sebaran responden terhadap pembentukan klaster bisnis koperasi melalui *deadweight* di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa 63,3% klaster bisnis koperasi yang terbentuk terjadi *deadweight* dan sisanya 36,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk tidak terjadi *deadweight*.

Pengukuran *deadweight* dilakukan dengan membandingkan antara koperasi yang memperoleh perkuatan dengan koperasi yang tidak memperoleh perkuatan. Perbandingan ini memberikan 3 kemungkinan hasil: (1) *Pure deadweight*. Jika tanpa program ternyata perusahaan tetap menjalankan/ mencapai tujuan program, maka program disebut sebagai *pure deadweight*; (2) *Partially deadweight*. Jika tanpa program, perusahaan tetap memulai menjalankan tujuan program secara terbatas atau dalam bentuk yang lain; dan (3) *Zero deadweight*. Jika tanpa program perusahaan sama sekali tidak dapat berjalan. Pelaksanaan program yang *pure deadweight* adalah pemborosan.

Tabel 6. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Additionality* di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Additionality*	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak terjadi *Additionality*	21	36,0
Tidak *Additionality*	39	65,0
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat sebaran responden terhadap pembentukan klaster bisnis koperasi melalui *additionality* di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa 65% klaster bisnis koperasi yang terbentuk terjadi *additionality* dan sisanya 35% klaster bisnis koperasi yang terbentuk tidak terjadi *additionality*.

Additionality didefinisikan sebagai "apakah sebuah dukungan mendorong *private investment* yang tadinya tidak ada/tidak mungkin". *Additionality* dapat berada pada input, output, atau *behavioral*. *Input additionality* menjawab pertanyaan apakah koperasi menjadi berbelanja lebih banyak akibat adanya program pemerintah? *Output additionality* menjawab pertanyaan apakah aktivitas output meningkat akibat adanya program pemerintah? (misalnya jumlah inovasi, paten, pekerjaan, pengusaha baru, dan sebagainya), sedangkan *behavioral additionality* menjawab pertanyaan adakah perubahan permanen pada perilaku perusahaan akibat bantuan program pemerintah? (termasuk menjadi lebih efisien dalam mentransformasikan input menjadi output). Sebuah program yang efektif akan memberikan efek *additionality* kepada objek programnya.

Tabel 7. Sebaran Responden Terhadap Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Displacement* di Kabupaten Kampar

Pembentukan Klaster Bisnis Koperasi Melalui *Displacement*	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak terjadi *Displacement*	20	33,3
Tidak *Displacement*	40	66,7
Total	60	100,0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2010.

Merujuk pada Tabel 7. dapat dilihat sebaran responden terhadap pembentukan klaster bisnis koperasi melalui *displacement* di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa 66,7% klaster bisnis koperasi yang terbentuk terjadi *displacement* dan sisanya 33,3% klaster bisnis koperasi yang terbentuk tidak terjadi *displacement*.

Tabel 8. Klaster Bisnis Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
Bangkinang	1	0,8
Bangkinan Seberang	7	5,8
Salo	5	4,2
Bangkinang Barat	6	5,0
Kampar	3	2,5
Kampar Timur	5	4,2
Kampar Utara	3	2,5
Rumbiao Jaya	6	5,0
Tapung	21	17,5
Tapung Hilir	8	6,6
Tapung Hulu	5	4,2
Kampar Kiri Hulu	5	4,2
Kampar Kiri	10	8,3
Kampar Kiri Tengah	8	6,6
Gunung Sahilan	5	4,2
Perhentian Raja	2	1,6
Siak Hulu	4	3,3
Tambang	8	6,6
Koto Kampar	8	6,6
Jumlah	120	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2010.

Berdasarkan Tabel 8. menunjukkan bahwa tumbuhnya klaster bisnis koperasi yang bergerak dalam agribisnis kelapa sawit sebagian besar terdapat di Kecamatan Tapung sebanyak 17,5%; diikuti secara berturut turut oleh Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 8,3%; dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung Hulir, Kecamatan Tambang serta Kecamatan Koto Kampar masing-masing sebanyak 6,6%. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat kecamatan tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi yang Bergerak di Bidang Agribisnis Kelapa Sawit

Tahap pertama dalam analisis faktor adalah menilai variabel mana yang dianggap layak untuk dimasukan dalam analisis selanjutnya. Jika sebuah variabel mempunyai kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, maka variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya, variabel dengan korelasi yang lemah dengan variabel lain cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu.

Uji kelayakan faktor dalam penelitian ini menggunakan KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin. Measure of Sampling Adequacy*) *and Bartlett's Test of Sphericity*.

Tabel 9. Hasil Perhitungan KMO *and Bartlett's Test*

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.427
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	34.043
	Df	21
	Sig.	.036

Sumber: Hasil Analisis Data, 2010.

Berdasarkan perhitungan dengan tingkat probabilitas pada taraf signifikan 5% ternyata angka signifikansi lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak. Nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) sebesar 0,427 lebih besar dari 0,05, sehingga variabel tersebut dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya, jumlah varians dari suatu variabel mula-mula yang dapat dijelaskan oleh faktor yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan *Communalities*

	Initial	*Extraction*
Efisiensi Biaya	1.000	.541
Keunggulan Harga	1.000	.771
Identitas Produk Klaster	1.000	.641
Spesialisasi	1.000	.645
Deadweight	1.000	.819
Additionality	1.000	.860
Displacement	1.000	.825

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: Hasil Analisis Data, 2010.

Variabel efisiensi biaya sebesar 0,541, hal ini berarti sekitar 54,1% varians dari variabel efisiensi biaya dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk; variabel keunggulan harga sebesar 0,771 berarti sekitar 77,1% varians dari variabel keunggulan harga dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk; variabel identitas produk klaster sebesar 0,641 berarti sekitar 64,1% varians dari variabel identitas produk klaster dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk; variabel spesialisasi sebesar 0,645 berarti sekitar 64,5% varians dari variabel spesialisasi dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk; variabel *deadweight* sebesar 0,819 berarti sekitar 81,9% varians dari variabel *deadweight* dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, variabel *additionality* sebesar 0,860 berarti sekitar 86% varians dari variabel *additionality* dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk dan variabel *displacement* sebesar 0,825 berarti sekitar 82,5% varians dari variabel *displacement* dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

Component matrix hasil proses rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa sekarang *loadings factor* yang dahulunya kecil semakin diperkecil, dan faktor *loadings* yang besar semakin diperbesar.

Variabel *deadweight*: korelasi antara variabel *deadweight* dengan faktor-1 yang sebelum rotasi adalah 0,731, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,768. Variabel *additionality*: korelasi antara variabel *additionality* dengan faktor-1 yang sebelum rotasi adalah 0,525, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,89.

Variabel efisensi biaya: korelasi antara variabel biaya dengan faktor-2 yang sebelum rotasi adalah 0,365, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,702. Variabel identitas produk klaster: korelasi antara variabel identitas produk klaster dengan faktor-2 yang sebelum rotasi adalah 0,355, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,791.

Variabel keunggulan harga: korelasi antara variabel keunggulan harga dengan faktor-3 yang sebelum rotasi adalah 0,432, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,816. Variabel spesialisasi: korelasi antara variabel spesialisasi dengan faktor-3 yang sebelum rotasi adalah 0,584, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,691. Variabel *displacement*:

korelasi antara variabel *displacement* dengan faktor-4 yang sebelum rotasi adalah 0,357, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,891.

Tabel 11. *Component Matrix*[a]

Variabel	Component			
	1	2	3	4
Efisiensi Biaya	.457	.365	–237	.378
Keunggulan Harga	.283	.318	.432	–.635
Identitas Produk Klaster	.520	.355	.042	.492
Spesialisasi	–.544	–.090	–.584	.009
Deadweight	.731	–.530	.024	–.061
Additionality	–.525	.341	.612	.306
Displacement	–.110	–.692	.454	.357

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. *4 components extracted.*

Tabel 12. *Rotated Component Matrix*[a]

Variabel	Component			
	1	2	3	4
Efisiensi Biaya	–.108	.702	–.051	–.184
Keunggulan Harga	–.004	–.154	.816	–.285
Identitas Produk Klaster	.004	.791	.118	.031
Spesialisasi	.050	–.310	–.691	–.264
Deadweight	–.768	.157	.262	.368
Additionality	.891	.000	.122	.229
Displacement	.014	–.161	–.063	.891

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. *Rotation converged in 6 iterations.*

PEMBAHASAN

Secara umum klaster bisnis koperasi yang tumbuh di Kabupaten Kampar dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu klaster bisnis primer kelapa sawit dan klaster bisnis sekunder kelapa sawit. Klaster bisnis primer kelapa sawit biasanya menjalankan bisnis pembibitan kelapa sawit, perdagangan pemenuhan sembako, obat-obatan, pupuk, simpan pinjam, angkutan kelapa sawit, dan penyediaan bahan bakar minyak. Pengelolaan klaster bisnis primer sebagian besar dimiliki oleh koperasi. Klaster bisnis sekunder kelapa sawit menjalankan usaha pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang sebagian besar dimiliki dan kelola oleh pihak swasta dan PTP (BUMN).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi yang Bergerak di Bidang Agribisnis Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil perhitungan *component matrix* dari tujuh variabel yang diprediksi mempengaruhi penumbuhan klaster bisnis koperasi, maka ketujuh variabel telah direduksi menjadi hanya terdiri empat faktor, yaitu (1) faktor-1 terdiri atas variabel *deadweight* dan variabel additionality; (2) faktor-2 terdiri atas variabel efisensi biaya dan variabel identitas produk klaster; (3) faktor-3 terdiri atas variabel keunggulan harga dan variabel spesialisasi; dan (4) faktor-4 hanya terdiri atas variabel *displacement*.

Faktor pertama, terdiri atas variabel *deadweight* dan variabel *additionality*. Jika akan diberi nama, faktor tersebut dapat dinamakan faktor inovasi/ kreativitas anggota koperasi. Hal ini berarti tumbuhnya klaster bisnis koperasi di Kabupaten Kampar disebabkan oleh: (a) koperasi mampu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada kebutuhan program dari anggotanya bukan yang menjalankan program-program titipan pihak luar anggota; dan (b) koperasi dapat merangsang aktivitas anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kreatif dan produktif.

Faktor kedua, terdiri atas variabel efisensi biaya dan variabel identitas produk klaster. Jika akan diberi nama, faktor tersebut dapat dinamakan faktor biaya rendah dan diferensiasi produk. Hal ini berarti tumbuhnya klaster bisnis koperasi di Kabupaten Kampar disebabkan karena koperasi mampu meningkatkan efisiensi biaya dan adanya identitas produk klaster.

Faktor ketiga, terdiri atas variabel keunggulan harga dan variabel spesialisasi. Jika akan diberi nama, faktor tersebut dapat dinamakan faktor harga rendah dan spesialisasi pemasaran produk. Hal ini berarti tumbuhnya klaster bisnis koperasi di Kabupaten Kampar disebabkan karena koperasi mampu memberikan keunggulan harga dan spesialisasi pemasaran produk.

Faktor keempat, hanya terdiri atas variabel *displacement*. Hal ini berarti tumbuhnya klaster bisnis koperasi di Kabupaten Kampar disebabkan karena koperasi mampu untuk tidak menghasilkan *displacement*. *Displacement*, yaitu efek negatif dari bantuan proyek pemerintah terutama terjadi ketergantungan (tidak tumbuhnya inovasi dari anggota koperasi).

Strategi Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang Berbasis Agribisnis Kelapa Sawit

Klaster bisnis terdiri dari kelompok perusahaan yang memiliki kompetensi yang berbeda, namun berhubungan dengan lokasi dalam sebuah wilayah tertentu, di mana melalui sebuah bentuk interaksi tertentu di antara mereka dan melalui sebuah lembaga usaha bersama, yang mungkin juga dibentuk bersama organisasi lain, meningkatkan daya saing, spesialisasi dan identitas mereka dalam menghadapi persaingan usaha.

Beberapa karakteristik umum yang melekat pada konsep klaster, yaitu karakteristik klaster dapat dilihat dari sisi proses internal yang terjadi atau dari sisi eksternal, sebagai hasil proses internal tersebut. Dari sisi internal, terdapat empat karakteristik yang dapat diperhatikan, yaitu: (1) adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/*spatial*, (2) adanya interaksi antar perusahaan, (3) kombinasi sumber daya dan kompetensi antar perusahaan yang berinteraksi, dan (4) pembentukan dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung yang berfungsi membantu klaster secara keseluruhan.

Dari sisi internal, karakteristik klaster dimulai dengan ciri adanya konsentrasi unit usaha yang sejenis dan atau saling mendukung dalam satu wilayah yang relatif berdekatan baik secara geografis maupun secara transportasi ekonomis. Kedekatan *spatial* ini kemudian diikuti oleh interaksi antar perusahaan untuk mendukung produk sentra. Interaksi dan komitmen ini kemudian diikuti dengan kemauan mengkombinasikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu, terkadang pengusaha perlu membentuk satu atau lebih institusi bersama.

Dari sisi eksternal, terdapat tiga elemen yang dapat diperhatikan, yaitu: (1) *economic specialization*, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan, (2) *competitiveness*, atau daya saing yang lebih baik dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik, dan (3) *identity*, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster ataupun yang di luar klaster.

Tingkat keberhasilan klaster bisnis koperasi dapat diukur dengan: (1) terciptanya kemitraan dan jaringan yang baik, ditandai dengan adanya kerja sama antar perusahaan, hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut ketersediaan sumber daya, pembiayaan dan fleksibilitas serta proses pembelajaran bersama antar perusahaan; (2) adanya inovasi, riset dan pengembangan. Inovasi secara umum berkenaan dengan pengembangan produk atau proses, sedangkan riset dan pengembangan berkenaan dengan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; (3) tersedianya sumber daya manusia (tenaga kerja) yang handal. Dengan sumber daya manusia yang handal, keberadaan kapital maupun kelembagaan dapat dijalankan dengan baik; (4) terspesialisasinya aktivitas usaha perusahaan di dalam klaster (homogen) yang saling membantu antar sub sistem, namun tidak menimbulkan ketergantungan antar perusahaan karena terciptanya persaingan yang sehat antara perusahaan sejenis; (5) lokasi yang sesuai, lokasi klaster yang dimaksud adalah memiliki tujuan untuk mengukur keberlanjutan dari aktivitas industri yang ada di lokasi tersebut. Faktor yang terkait dengan lokasi klaster ini adalah ketersediaan sumber daya (input = bibit, pupuk atau obat-obatan, tenaga kerja) dan lahan, biaya transportasi, harga faktor lokal, kemungkinan produksi dan subtitusi, struktur pasar, kompetisi dan informasi. Tujuan akhirnya adalah tercapainya suatu efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutan dalam pengelolaan untuk menghasilkan komoditi unggulan dari klaster tersebut.

Pola dan strategi pengembangan klaster bisnis koperasi yang berbasis agribisnis kelapa sawit harus lebih menekankan pada (1) *market driven*, selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan klaster bisnis koperasi, (2) *inclusive*, mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja, tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung untuk bekerja sama dengan klaster bisnis koperasi, (3) *collaborative*, selalu

menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu daerah dari seluruh *stakeholder*; (4) *strategic*, membantu *stakeholder* menciptakan visi strategis daerah yang menyangkut ekonomi, (5) *value creating*, mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah daerah.

Di samping pola dan strategi tersebut, keberhasilan terbentuknya klaster bisnis koperasi perlu mendapatkan dukungan pemerintah baik berupa kebijakan (*policy*) maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang berkembang.

KESIMPULAN

Tumbuhnya klaster bisnis koperasi yang bergerak dalam agribisnis kelapa sawit sebagian besar terdapat di Kecamatan Tapung diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung Hulir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Koto Kampar.

Klaster bisnis koperasi yang tumbuh di Kabupaten Kampar, yaitu: 1) klaster bisnis primer yang menjalankan bisnis pembibitan kelapa sawit, perdagangan pemenuhan sembako, obat-obatan, dan pupuk, simpan pinjam, angkutan kelapa sawit, penyediaan bahan bakar minyak; 2) klaster bisnis sekunder yang menjalankan usaha pabrik pengolahan kelapa sawit.

Dari tujuh variabel yang diprediksi mempengaruhi penumbuhan klaster bisnis koperasi yang mempengaruhi diteliti, dengan proses *factoring* direduksi menjadi hanya empat faktor, yaitu: 1) faktor inovasi/kreativitas anggota koperasi; 2) faktor biaya rendah dan diferensiasi produk; 3) faktor harga rendah dan spesialisasi pemasaran produk; 4) faktor *displacement*, yaitu efek negatif dari bantuan proyek pemerintah terutama terjadi ketergantungan (tidak tumbuhnya inovasi dari anggota koperasi).

Strategi pengembangan klaster bisnis koperasi yang berbasis agribisnis kelapa sawit harus lebih menekankan pada: (1) *market driven*, selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan klaster bisnis koperasi; (2) *inclusive*, mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja, tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung untuk bekerjasama dengan klaster bisnis koperasi; (3) *collaborative*, selalu menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu daerah dari seluruh *stakeholder*; (4) *strategic*, membantu *stakeholder* menciptakan visi strategis daerah yang menyangkut ekonomi; (5) *value creating*, mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah daerah. Di samping pola dan strategi tersebut, keberhasilan terbentuknya klaster bisnis koperasi perlu mendapatkan dukungan pemerintah baik berupa kebijakan (*policy*) maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang berkembang.

Strategi yang perlu dilakukan oleh klaster bisnis koperasi dalam menghadapi persaingan usaha, yaitu: pertama, strategi biaya rendah dan diferensiasi produk. Kedua, strategi harga rendah dan spesialisasi pemasaran produk. Dalam mengembangkan strategi *market driven*, yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa setiap orang berhak atas informasi pasar. Seperti disebutkan oleh Cravens (1998) bahwa pelaksanaan strategi sangat tergantung kepada pertisipasi setiap orang dalam proses pelaksanaan suatu strategi. Seberapa besar partisipasi klaster bisnis koperasi dalam menghadapi persaingan usaha sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang dapat diakses oleh setiap klaster bisnis koperasi yang ada di Kecamatan Kampar, termasuk informasi mengenai pasar, teknologi dan bagaimana meningkatkan daya kreasi dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2005. *Prospek dan Pengembangan Kelapa Sawit*, Jakarta.

Caska, Almasdi Syahza, Henny Indrawati. 2009. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Nenas Sebagai Upaya Percepatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Eksekutif STIE IBMT Surabaya*, (6)1.

Caska. 2010. Strategi Penduduk Miskin Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Permintaan Kredit di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi FE UNTAR Jakarta*, (XV) 3.

Cravens, David. 1998. Implementation Strategies in the Market-Driven Strategy Era. *Journal of the Academy of Marketing Science*, (26) 3: 237-241.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2009. *Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.*

Fajar, Nur Agung. 2004. Peran Strategik Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. *Jurnal Ekonomi Politik Kementerian Koperasi dan UKM.*

Lestari, Sri. Hs. 2009. Kajian Efektivitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis. *Jurnal Ekonomi Politik Kementerian Koperasi dan UKM.* Januari.

Porter, Michael E. 2008. *The Cooperative Advantage of Nations*. Simon & Schuster Inc, New York.

Sumarno dan Caska. 2010. *Strategi Penduduk Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi*. Laporan Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Riau Pekanbaru.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 116–127
ISSN 1411-514X

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur *Audit*

Deddy Supardi
Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP
Jalan PHH. Mustopa No. 68 Bandung
E-Mail: supardideddy@yahoo.com

ABSTRACT

Premature sign-off and under reporting audit time are two of the negative behaviours that may result from time budget pressures. The objectives of this research are: first, is internal auditor to do premature sign-off and second testing the significant influence of audit program, time budget pressure, evaluation of performance internal auditor, review and supervision, and professional judgement on premature sign-off audit procedures. The sample used were the internal auditor working in various of companies. Sample were randomly selected using questionaires are many as 93. Logistic regression is used in investigating the hypotheses. The results of this research show that premature sign-off influence by time budget pressure, evaluation of performancer and professional judgement.

Keywords: premature sign-off, time budget pressure.

ABSTRAK

Penghentian prematur prosedur *audit* dan tidak melaporkan waktu *audit* yang sebenarnya merupakan dua perilaku negatif yang dihasilkan dari tekanan *budget* waktu. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, apakah internal *auditor* melakukan penghentian prematur prosedur *audit*, dan kedua menguji pengaruh signifikan program *audit*, tekanan *budget* waktu, evaluasi kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi, serta pertimbangan profesional terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu internal *auditor* yang bekerja pada beberapa perusahaan. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan kuesioner sebanyak 93. Untuk menguji hipotesis digunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian prematur prosedur *audit* dipengaruhi oleh tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja, dan pertimbangan profesional.

Kata kunci: penghentian prematur, tekanan *budget* waktu.

PENDAHULUAN

Setiap badan usaha mempunyai tujuan, salah satu tujuannya adalah memperoleh laba. Pencapaian tujuan ini harus memperoleh dukungan dari setiap fungsi *corporate*. Pimpinan *corporate* tidak saja memerlukan dukungan penuh dari setiap fungsi, tetapi juga memerlukan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal entitas lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa ketiga golongan tujuan dapat dicapai. Ketiga golongan tujuan tersebut, yaitu reliabilitas informasi keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan.

Ketiga golongan tujuan tersebut dapat dicapai, dengan mengkonstruksi lima komponen sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penetapan risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Pemantauan dimaksud dapat dilakukan oleh *internal auditing*. *Internal auditing* merupakan aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang didesain untuk memperbaiki dan memberi nilai tambah pada operasi organisasi. *Internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance* (IIA, 2004).

Aktivitas *internal auditing* di antaranya mengevaluasi risiko yang berhubungan dengan organisasi, operasi dan sistem informasi mencakup: 1) reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi, 2) efektivitas dan efisiensi operasi, 3) pengamanan aset, dan 4) kepatuhan terhadap perundang-undangan, regulasi dan kontrak (IIA, 2004). Dalam melaksanakan tugas tersebut, *internal auditing* mengembangkan rencana untuk setiap perikatannya mencakup tujuan, luasnya, waktu dan alokasi sumber daya. Salah satu implementasi perencanaan *audit*, *internal auditing* menetapkan *budget* waktu untuk mengorganisir waktu yang ditetapkan, prosedur *audit* yang dilakukan, dan siapa yang melaksanakan prosedur *audit*.

Di samping itu *budget* waktu, diperlukan untuk mengevaluasi kinerja *auditor*. Kenyataannya *budget* waktu dianggap sebagai tekanan oleh internal *auditor*, karena harus melaksanakan *audit* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur prosedur *audit* dan tidak melaporkan waktu yang sebenarnya. Hal ini merupakan perilaku negatif yang disebabkan oleh tekanan *budget* waktu. Pengaruh negatif tekanan *budget* waktu atas sikap perilaku *auditor* merupakan dokumen dalam literatur *auditing* (Alderman dan Deitrick, 1982; Kelley dan Margheim, 1980; dan Azad, 1994)

Penelitian sebelumnya (Azad, 1994) berpendapat bahwa penggunaan *budget* waktu dalam *auditing* merupakan alat pemantauan dalam mencapai tujuan *audit*, tetapi di sisi lain menimbulkan suatu tekanan bagi *internal auditor*, sehingga mengabaikan *budget* waktu dengan cara penghentian prematur prosedur *audit* dan tidak melaporkan waktu yang sebenarnya.

Awalnya kebutuhan *auditing* dilakukan oleh *auditor* independen yang disebabkan keterpisahan antara pemilik (prinsipal) dengan pengelola (agen), sehingga diharapkan mengurangi informasi asimetris dan biaya agensi (Fama dan Jensen, 1983). Dalam perkembangannya, *auditing* juga dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Kebutuhan jasa *internal auditing* semakin dirasakan penting, karena kompleksitas bisnis dan transaksi, serta keterbatasan manajemen dalam memantau aktivitas bisnis.

Internal auditing menurut IIA (2004) merupakan aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang didesain untuk memperbaiki dan memberi nilai tambah pada operasi organisasi. *Internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara yang sistematis dan disiplin untuk mengavaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*. *Internal auditing* merupakan media pemantauan, apakah komponen pengendalian intern telah berfungsi sebagaimana mestinya (Giese, 1991).

Program *audit* merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti *audit* sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen. Program *audit* mencakup prosedur *audit* untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencatat informasi selama *audit* berlangsung. Program *audit* ini harus disetujui sebelum diimplementasikan dan jika ada perubahan harus disetujui pula (IIA, 2004).

Informasi yang diperoleh selama *audit* berlangsung harus dipandang cukup memadai, dapat dipercaya, relevan dan berguna sesuai dengan tujuan *audit*. Bukti *audit* tersebut selanjutnya harus dianalisis dan dievaluasi sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan. Kemudian bukti *audit* harus didokumentasikan sebagai suatu bukti bahwa *audit* telah dilakukan. Penyusunan dan pengembangan program *audit* harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti prosedur *audit* apa yang dilakukan, besarnya sampel, pos yang dipilih dan waktu *audit*.

Untuk mencapai tujuan *audit*, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian *audit* harus ditetapkan dalam *budget* waktu. *Budget* waktu diperlukan untuk memantau pelaksanaan *audit* dan menilai kinerja, baik *internal auditor* maupun departemen *internal auditing*. Implementasi *budget* waktu ternyata membawa dampak negatif, karena *budget* waktu dianggap sebagai suatu tekanan oleh *internal auditor*, sehingga menimbulkan perilaku *auditor* yang kurang etis dan melanggar standar profesional, yaitu penghentian prematur prosedur *audit*. Cook dan Kelley (1998) mengidentifikasi tekanan *budget* waktu merupakan faktor utama yang mendorong penghentian prematur prosedur *audit* yang harus dilakukan.

Jika *budget* waktu telah ditetapkan, maka *budget* waktu tersebut menjadi ukuran kinerja dalam mencapai tujuan *audit* dan *internal auditor* mengharapkan dapat mencapai *budget* waktu tersebut. Tak semestinya penekanan pada pencapaian *budget* waktu dapat menimbulkan tekanan bagi internal *auditor*. Perilaku negatif *internal auditor* sama dengan yang dilakukan oleh *external auditor*, seperti penghentian prematur prosedur *audit* dan tidak melaporkan waktu sebenarnya. Studi yang dilakukan (Buchman dan Tracy, 1982; Alderman dan Deitrick, 1982; Lightner, *et. al.*, 1983; Azad, 1994; Cook dan Kelley, 1998), berpendapat bahwa tekanan *budget* waktu mempunyai pengaruh signifikan dalam disfungsional perilaku *auditor* untuk mengurangi atau menghentikan prosedur *audit* yang menyebabkan pelanggaran terhadap standar *auditing* dan menyebabkan perilaku yang tidak etis.

Praktik penghentian prematur prosedur *audit* banyak dihadapi oleh *auditor*. Waggoner dan Cashell (1991) menemukan bahwa hanya 23% dari respondennya yang melakukan penghentian prematur prosedur *audit*. Praktik ini terjadi ketika *auditor* mendokumentasikan prosedur *audit* secara lengkap, namun mengabaikan beberapa prosedur *audit* yang disyaratkan, tetapi memberikan pendapatnya (Shapeero, *et. al.*, 2003). Perlakuan ini dilakukan karena *auditor* merasa tertekan dengan adanya *budget* waktu dalam penyelesaian *audit*. Soobaroyen dan Chengahbaroyan (2005) juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengetatan *budget* waktu, semakin tinggi pula praktik penghentian prematur prosedur *audit*.

Dimensi tekanan yang dihadapi oleh *auditor* selaian tekanan *budget* waktu, yaitu tentang independensi *auditor* (Ahson dan Anandarajan, 2004; Lord, 1992; Johson dan Kaplan, 1991; Farmer, *et. al.*, 1987; Panny dan Reckers, 1980), tekanan manajemen (Bazerman, *et. al.*, 1997; Knapp, 1985), agresivitas *client* (Sack dan Tangreti, 1987), lingkungan kompetisi, kondisi keuangan dan *review audit* (Cockburn, 1992; Willet dan Page, 1996; Walker, 1999). Perilaku pengurangan kualitas *audit* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh *auditor* selama melakukan *audit* dengan mengurangi ketepatan dan keefektifan akumulasi bukti *audit*. Perilaku ini muncul karena adanya dilema antara biaya *audit* dan kualitas *audit* yang dihadapi *auditor* (Kaplan, 1995).

Untuk menghadapi berbagai tekanan dalam pelaksanaan *audit*, departemen *internal auditing* menetapkan dan menjaga sistem untuk memantau dan memberikan keyakinan bahwa program kerja *internal auditing* dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dalam memberikan rekomendasi untuk manajemen. Penilaian kinerja diperlukan untuk menelaah kinerja aktivitas *internal auditing* dan secara periodik dilakukan *self assessment* atau dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga yang memahami tentang standar dalam praktik *internal auditing* (IIA, 2004).

Pengaruh perilaku disfungsional *internal auditor* dihasilkan dari tekanan *budget* waktu atas kualitas *audit* merupakan masalah signifikan. Perilaku disfungsional *internal auditor* merupakan bukti dari berbagai tindakan negatif, seperti: penghentian prematur atas prosedur *audit* tanpa melakukan melakukan langkah-langkah *audit* yang seharusnya, berarti yang bersangkutan melakukan kelalaian, membatasi dan atau mengurangi cakupan *audit* di bawah tingkat yang diharapkan, tidak melaporkan waktu sebenarnya yang dilakukan, mengurangi penjelasan dan presentasi dari

auditee, gagal menginvestigasi isu-isu yang relevan, gagal untuk menindaklanjuti rekomendasi *audit* dan tindakan-tindakan penting lainnya. Dalam penelitian ini tindakan-tindakan negatif tersebut disebut dengan *filtering of time* atau pengurangan waktu *audit*.

Pengurangan waktu *audit* merupakan masalah dalam kualitas internal *audit*. Pengaruh buruk atas kualitas internal *audit* tidak terbatas pada entitas itu sendiri. Kegagalan kualitas *audit* juga dapat diperlakukan untuk *auditor* independen yang dapat menambah risiko bagi eksternal *auditor*. Misalnya, dalam skandal keuangan, kasus *fraud* sebelumnya dan diikuti dengan bertambahnya kewajiban pengungkapan profesi *auditing*, juga dengan isu-isu *fraud* yang dilakukan oleh *corporate* merupakan tanggung jawab *auditor* untuk dapat mendeteksi masalah tersebut.

Dengan memahami keterbatasan bisnis entitas, rendahnya kualitas *audit* menimbulkan kerugian baik terhadap efisiensi maupun efektivitas internal *audit*. Dalam hal efisiensi, seringkali internal *auditor* melakukan *audit* keuangan sama seperti yang dilakukan oleh *auditor* independen. Menurut standar *auditing*, *auditor* independen harus mengevaluasi pekerjaan *internal auditor* yang dapat mengurangi lingkup pemeriksaan.

External auditor dalam melakukan *audit* dapat mempertimbangkan luasnya *audit* berdasarkan efektivitas aktivitas *internal auditing* seperti dijelaskan oleh Berry (1984) bahwa *external auditor* mempercayakan pada pekerjaan *internal auditing* sebagai mitra untuk mengurangi biaya klien. Juga dapat membantu *auditor* independen dalam mengurangi waktu *audit*. Klien dapat menerima luasnya gabungan pekerjaan jasa *auditor* dalam hal biaya *audit* (Brawn dan Karan, 1986). Penelitian yang dilakukan oleh Ward dan Robertson (1980) menyimpulkan bahwa luasnya pekerjaan *auditor* independen tergantung pada pekerjaan internal *auditor* mempunyai korelasi positif dengan kualitas fungsi internal *auditing*. Lemahnya kualitas internal *audit* yang disebabkan oleh tekanan *budget* waktu dapat menambah biaya eksternal *audit*.

Untuk mengurangi disfungsional perilaku *internal auditor* yang tidak etis dan melanggar standar profesional, penugasan kepada *internal auditor* mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan keahliannya untuk dapat mencapai tujuan *audit*. Demikian pula pelaksanaannya memerlukan *review* dan supervisi atasannya untuk memberikan keyakinan apakah prosedur *audit* telah dilaksanakan dan apakah informasi yang diperolah merupakan informasi yang cukup dan kompeten.

Kecukupan *review* dan supervisi yang memadai mampu mendeteksi perilaku disfungsional, seperti penghentian prematur prosedur *audit*, Malone dan Robert (1996) menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan prosedur *review* dan supervisi semakin tinggi pula dapat mendeteksi penghentian prematur prosedur *audit* dan semakin rendah *auditor* melakukan praktik disfungsional tersebut.

Internal auditor dalam melaksanakan *audit*nya seringkali menggunakan kemahiran jabatannya, yaitu pertimbangan profesional, di antaranya dalam hal mengumpulkan dan mengevaluasi kecukupan informasi yang diperoleh. Ketajaman pertimbangan profesional diperoleh awalnya dari pendidikan, pelatihan dan dilanjutkan dari pengalamannya. Pengalaman *audit* yang dimiliki *auditor* ikut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil.

Dalam hal *auditing*, ditemukan bahwa *auditor* ahli menggunakan strategi hanya untuk informasi relevan sebagai dasar pertimbangannya, sementara *auditor* pemula informasi relevan dan tidak relevan bersama-sama digunakan dalam pertimbangannya (Biggs dan Mock, 1983). Namun demikian, pertimbangan profesional sering dihadapkan pada kenyataan pembatasan waktu *audit* dan penilaian kinerja, sehingga berpengaruh terhadap kemungkinan melakukan disfungsional penghentian prematur prosedur *audit* atau sebaliknya dengan penggunaan pertimbangan profesional dapat mengurangi praktik penghentian prematur prosedur *audit*.

Untuk memenuhi *budget* waktu yang telah ditetapkan, ternyata internal *auditor* kadang-kadang membawa pekerjaannya ke rumah dan tidak melaporkan waktu yang sebenarnya (Azad, 1994). Hal ini dilakukan terkait dengan evaluasi kinerja *auditor*, apakah internal *auditor* mampu melaksanakan *audit* sesuai dengan *budget* waktu. Di lain pihak *budget* waktu menimbulkan disfungsional perilaku *auditor*. Selanjutnya Azad (1994) melaporkan bahwa

penghentian prematur prosedur *audit* terjadi karena langkah *audit* yang dianggap tidak perlu atau tidak material, hanya menganggap kecukupan bukti diperoleh dengan cara wawancara, kendala *budget* waktu, kurangnya supervisi, ketidaksukaan terhadap pekerjaan tertentu, kurangnya pengetahuan teknis dan mengharapkan penilaian kinerja yang lebih baik. Penghentian prematur prosedur *audit* terjadi pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian intern, pengujian persediaan, pengujian aset tetap, pengujian biaya dan pemahaman pengakuan pendapatan.

Pada penelitian Suryanita *et. al.* (2007) dapat dibuktikan hubungan yang signifikan antara *time pressure* dan prosedur *review* terhadap penghentian prosedur audit. Hasil dari penelitian Suryanita membuktikan bahwa *time pressure* berhubungan positif dengan penghentian prosedur audit, sehingga semakin besar *time pressure* yang dihadapi oleh *auditor*, maka semakin besar pula kecenderungan *auditor* melakukan perilaku penghentian prosedur audit. Sedangkan prosedur *review* berhubungan negatif terhadap perilaku penghentian prosedur audit, sehingga semakin rendah prosedur *review*, maka perilaku penghentian prosedur audit semakin rendah.

Raghunathan (1991) mengungkapkan bahwa 55% responden pernah melakukan penghentian prematur dan praktik ini paling umum terjadi pada tahap prosedur analitis. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi dalam tim *audit*, banyaknya penggunaan *judgement internal auditor* dan karena tekanan *budget* waktu.

METODE

Objek penelitian adalah penghentian prematur prosedur *audit*, program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja *internal auditor* dan pertimbangan profesional dalam praktik *internal auditing* pada beberapa perusahaan yang memiliki departemen *internal auditing* di daerah Bandung. Sampel penelitian dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel secara *random* sederhana. Kuesioner yang dikirim sebanyak 150, tetapi yang kembali dan digunakan hanya sebanyak 93 (62%).

Variabel dependen, yaitu penghentian prematur prosedur *audit*. Variabel ini bersifat dikotomi. Penghentian prematur prosedur *audit* bernilai 1, jika pernah melakukan penghentian prematur prosedur *audit*, dan bernilai 0, jika tidak.

Variabel independen, yaitu: program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi, dan pertimbangan profesional yang dikembangkan dari Azad (1994). Variabel independen diukur dengan ordinal dengan menggunakan skala *likert's* dari hitungan 1 (sangat tidak setuju) sampai hitungan 5 (sangat setuju). Untuk tujuan penelitian ini data ordinal diubah menjadi interval melalui bantuan statistik dengan menggunakan *method of successive interval.*

Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi logistik adalah dengan melakukan beberapa tahap, yaitu: (1) Uji *Hosmer and Lemeshow*, yaitu untuk menilai kelayakan model regresi logistik; (2) Uji *Iteration History*, yaitu untuk menilai keseluruhan model dengan mengukur hubungan *iteration history* dengan membandingkan nilai awal –2 *log likelihood* dengan nilai akhir –2 *log likelihood*; (3) Uji Multikolonieritas, yaitu untuk menguji apakah ada gejala kolinier yang kuat di antara variabel biasnya dengan menghitung *correlation matrix*; (4) Uji Klasifikasi, yaitu untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari suatu model dalam memprediksi probabilitas variabel dependen.

Hipotesis penelitian yang ditetapkan adalah bahwa: (a) program *audit* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*, (b) tekanan *budget* waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*, (c) penilaian kinerja internal *auditor* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*, (d) *review* dan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*, (e) pertimbangan profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

Untuk menguji hipotesis menggunakan model analisis regresi logistik yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Dimana:

Y	= Penghentian prematur prosedur *audit*
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, ..., \beta_5$	= Koefisien regresi
X_1	= Program *audit*
X_2	= Tekanan *budget* waktu
X_3	= Penilaian kinerja *internal auditor*
X_4	= *Review* dan supervisi
X_5	= Pertimbangan profesional

HASIL

Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 93 *internal auditor* yang bekerja di bagian *internal auditing* dari berbagai jenis perusahaan. Untuk mengetahui penghentian prematur prosedur *audit* yang dilakukan oleh *internal auditor* dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Penghentian Prematur Prosedur *Audit*

	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Persentase Kumulatif
Ya	23	24,7	24,7	24,7
Tidak	70	75,3	75,3	100,0
Jumlah	93	100,0	100,0	

Berdasarkan Tabel 1. ditemukan bahwa *internal auditor* yang menjadi responden penelitian melakukan penghentian prematur prosedur *audit* sebanyak 23 (24,7%) dan sisanya tidak melakukan penghentian prematur prosedur *audit*.

Perhitungan frekuensi, minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian (Tabel 2.) menunjukkan bahwa penghentian prematur prosedur *audit* memiliki nilai terendah 0,00 dan nilai tertinggi 1,00 *review* 0,2796 dan standar deviasi 0,45122. Nilai *review* sebesar 0,2796 lebih kecil dari 0,45 yang berarti yang paling sering muncul adalah 0 yang merupakan kode untuk *auditor* yang tidak melakukan penghentian prematur prosedur *audit*. Variabel program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi serta pertimbangan profesional keseluruhannya nilai lebih besar dari nilai standar deviasi, ini berarti *internal auditor* melakukan penghentian prematur prosedur *audit* yang disebabkan oleh variabel-variabel program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja *internal auditor*, *review* dan supervisi serta pertimbangan profesional.

Kelayakan model dinilai dengan menggunakan Uji *Hosmer* dan *Lemeshow*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 15,153 dengan signifikansi sebesar 0,056. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model penelitian ini dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Pengujian *Iteration History* (Tabel 3.) menunjukkan indikasi bahwa –2LL menurun dari 110,214 menjadi 79,754 dengan memasukkan variabel ke dalam konstanta. Penurunan nilai menjadi 79,754 menunjukkan model regresi yang baik atau model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	*Min*	*Max*	*Review*	*Std. Deviation*
Penghentian prematur prosedur *audit*	93	,00	1,00	,2796	,45122
Program *audit*	93	3,20	10,22	7,0347	1,18223
Tekanan *budget* waktu	93	8,36	20,82	15,1950	2,01339
Penilaian kinerja Internal *auditor*	93	16,92	43,31	35,4226	3,90305
Review dan Supervisi	93	6,00	19,56	15,6458	1,66858
Pertimbangan profesional	93	6,79	18,05	10,6176	1,50756
Valid N (listwise)	93				

Tabel 3. *Iteration History* (a, b, c, d)

Iteration		*–2 Log likelihood*	*Coefficients*					
		Constant	Program *audit*	Tekanan *budget* waktu	Penilaian kinerja IA	*Review* dan Supervisi	Pertimbangan Profesional	*Constant*
Step	1							
		84,363	–1,586	–,074	,520	–,112	,109	–,417
	1							
	2	80,121	–2,739	–,124	,760	–,161	,164	–,573
	3	79,759	–3,413	–,145	,856	–,176	,189	–,631
	4	79,754	–3,532	–,148	,869	–,178	,193	–,639
	5	79,754	–3,534	–,148	,869	–,178	,193	–,639
	6	79,754	–3,534	–,148	,869	–,178	,193	–,639

a *Method: Enter*
b *Constant is included in the model.*
c *Initial –2 Log Likelihood*: 110,214

Tabel 4. *Correlations*

		Program *Audit*	Tekanan *Budget* Waktu	Penilaian Kinerja IA	*Review* dan Supervisi	Pertimbangan Profesional
Program *Audit*	*Pearson Correlation*	1	,105	,108	,298(**)	–,226(*)
	Sig. (2-tailed)		,315	,302	,004	,029
	N		93	93	93	93
Tekanan *Budget* Waktu	*Pearson Correlation*		1	,447(**)	,314(**)	,335(**)
	Sig. (2-tailed)			,000	,002	,001
	N			93	93	93
Penilaian Kinerja IA	*Pearson Correlation*			1	,357(**)	,218(*)
	Sig. (2-tailed)				,000	,036
	N				93	93
***Review* dan Supervisi**	*Pearson Correlation*				1	,271(**)
	Sig. (2-tailed)					,009
	N					93
Pertimbangan Profesional	*Pearson Correlation*					1
	Sig. (2-tailed)					
	N					93

** *Correlation is significant at the* 0.01 *level* (2-*tailed*).
* *Correlation is significant at the* 0.05 *level* (2-*tailed*).

Tabel 5. Hasil Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.(p-value)	Exp(B)
Step 1(a)	Program *audit*	–,148	,273	,296	1	,587	,862
	Tekanan *budget* waktu	,869	,213	16,683	1	,000*	2,386
	Penilaian kinerja internal *auditor*	–,178	,091	3,830	1	,050*	,837
	Review dan supervisi	,193	,219	,780	1	,377	1,213
	Pertimbangan profesional	–,639	,212	9,051	1	,003*	,528
	Constant	–3,534	4,038	,766	1	,382	,029

a *Variable(s) entered on step* 1: Program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi, pertimbangan profesional.

b. * signifikan pada tingkat 0,05

Tabel 4. menunjukkan perhitungan korelasi antara variabel. Korelasi variabel program *audit* dengan tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi, dan pertimbangan profesional masing-masing sebesar 0,105, 0,108, 0,298 dan 0,226. Korelasi variabel tekanan *budget* waktu dengan penilaian kinerja internal *auditor*, *review* dan supervisi dan pertimbangan pofesional masing-masing sebesar 0,447, 0,314 dan 0,335. Variabel penilaian kinerja *internal auditor* dengan *review* dan supervisi dan pertimbangan profesional masing-masing sebesar 0,357 dan 0,218. Variabel *review* dan supervisi dengan pertimbangan profesional sebesar 0,271.

Uji Klasifikasi menunjukkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa model secara benar mengklasifikasikan sebesar 81,7% dari responden yang disurvey. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik yang ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 40,2%, yang berarti variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil pengujian regresi logistik disajikan dalam Tabel 6. dan dapat dituliskan model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = -3{,}534 - 0{,}148\ X_1 + 0{,}869\ X_2 - 0{,}178\ X_3 + 0{,}193\ X_4 - 0{,}639\ X_5 + \epsilon$$

Intrepretasi persamaan tersebut adalah probabilitas internal *auditor* melakukan penghentian prematur prosedur *audit* dan tidak melakukan penghentian prematur prosedur *audit* diprediksi oleh program *audit*, tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja *internal auditor*, *review* dan supervisi serta pertimbangan profesional, Koefisien α bertanda negatif menunjukkan bahwa sampel cenderung ke arah nilai 0, yaitu tidak melakukan penghentian prematur prosedur *audit*. Berdasarkan pengamatan 93 sampel yang melakukan penghentian prematur prosedur *audit* sebanyak 23 dan yang tidak melakukan penghentian prematur prosedur *audit* sebanyak 70.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa program *audit* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit* dari Tabel 6. menunjukkan bahwa program *audit* sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi -0,148 dengan tingkat signifikan sebesar 0,587 yang lebih besar dari α (0,05), karena nilai sig. (0,587) > α (0,05) berarti hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama, berarti program *audit* tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tekanan *budget* waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit* dari Tabel 6. menunjukkan bahwa tekanan *budget* waktu sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi 0,869 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05), karena nilai sig. (0,000) < α (0,05)

berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua, berarti tekanan *budget* waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penilaian kinerja internal *auditor* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit* dari Tabel 6. menunjukkan bahwa penilaian kinerja *internal auditor* sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi –0,178 dengan tingkat signifikan 0,050 yang lebih kecil dari α (0,1), karena nilai sig. (0,050) < α (0,1) berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga, berarti penilaian kinerja *internal auditor* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *review* dan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit* dari Tabel 6. menunjukkan bahwa *review* dan supervisi sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi 0,193 dengan tingkat signifikan 0,377 yang lebih besar dari α (0,05), karena nilai sig. (0,377) > α (0,05) berarti hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat, berarti *review* dan supervisi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa pertimbangan profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit* dari Tabel 6. menunjukkan bahwa pertimbangan profesional sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi -0,639 dengan tingkat signifikan 0,003 yang lebih kecil dari α (0,05), karena nilai sig. (0,003) < α (0,10) berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat, berarti pertimbangan profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data deskriptif dan hasil penelitian ternyata dalam pelaksanaan *internal audit* terdapat praktik penghentian prematur prosedur *audit* sebesar 24,7%. Hal ini sesuai dengan pendapat Waggoner dan Cashell (1991). Praktik ini dilakukan disebabkan oleh: adanya prosedur *audit* yang tidak diperlukan, kurangnya pengetahuan teknis tertentu, karena kurangnya supervisi, keterbatasan *budget* waktu, tidak menyukai pekerjaan, keinginan memperoleh evaluasi kinerja yang menguntungkan, kesalah pahaman tanggung jawab profesional dan bukti *audit* yang diperoleh hanya cukup dari hasil penjelasan *auditee*. Hal ini sesuai dengan pendapat Shapeero, *et. al.*, 2003; Soobaroyen dan Chengabroyan, 2005. Data deskriptif menunjukkan rangkaian penghentian prematur prosedur *audit* secara berurutan dalam hal: (a) pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern, (b) perhitungan fisik persediaan, penggajian dan persediaan lainnya, dan (c) kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Program *audit* diakui sebagai pedoman dan pengarahan dalam pelaksanaan *audit* yang memuat berbagai prosedur *audit* yang seharusnya dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian *audit*, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa program *audit* sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi -0,148 dengan tingkat signifikan sebesar 0,587 yang lebih besar dari α (0,05), karena nilai sig. (0,587) > α (0,05) berarti hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama, berarti program *audit* tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini menunjukkan makna bahwa dengan program *audit* yang terarah dan terpadu dapat mencegah adanya praktik penghentian prematur prosedur *audit*.

Budget waktu *audit* diperlukan agar *audit* efisien dan efektif, dan sebagai dasar estimasi biaya, alokasi pekerjaan untuk masing-masing *auditor* dan evaluasi kinerja *auditor*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan *budget* waktu sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi 0,869 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05), karena nilai sig. (0,000) < α (0,05) berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua, berarti tekanan *budget* waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini menunjukkan kenyataan *budget* waktu menyebabkan tekanan yang dihadapi oleh *auditor* yang menyebabkan penghentian prematur prosedur *audit*, hal ini sependapat dengan hasil penelitian Ahson dan Anandarajan (2004), serta hasil penelitian Soobaroyen dan Chengabroyan (2005).

Untuk menunjukkan keberadaan fungsi *internal auditing* yang berperan sebagai penasehat manajemen dalam pengendalian operasi bisnis dan pencapaian tujuan bisnis memerlukan penilaian

kinerja baik departemen *internal auditing* maupun kinerja *auditor*. Untuk menunjukkan kinerja tersebut, ternyata *auditor* mengorbankan prosedur *audit* yang seharusnya dilakukan tanpa memperhatikan risiko yang menyebabkan perilaku negatif. Perilaku negatif ini dilakukan dengan cara penghentian prematur prosedur *audit* yang berpotensi mengurangi standar *audit* dan mengurangi efisiensi dan efefktivitas *audit*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja internal *auditor* sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi –0,178 dengan tingkat signifikan 0,050 yang lebih kecil dari α (0,1), karena nilai sig. (0,050) < α (0,1) berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga, berarti penilaian kinerja internal *auditor* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini sesuai dengan pendapat Azad (1994).

Pelaksanaan *audit* memerlukan *review* dan supervisi oleh atasannya untuk mengetahui apakah prosedur *audit* telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi kecukupan bukti-bukti *audit*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *review* dan supervisi sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi 0,193 dengan tingkat signifikan 0,377 yang lebih besar dari α (0,05), karena nilai sig. (0,377) > α (0,05) berarti hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat, berarti *review* dan supervisi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini terjadi disebabkan karena *review* dan supervisi yang memadai oleh atasannya, dapat menghindari perilaku negatif penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini tidak sependapat dengan Malone dan Robert (1996) dan Walker (1999).

Dalam situasi dan kondisi tertentu, *auditor* seringkali menggunakan pertimbangan profesionalnya. Namun pertimbangan profesional yang berkelebihan menyebabkan perilaku disfungsional. Pertimbangan profesional *auditor* yang belum berpengalaman seharusnya memerlukan konsultasi dengan atasannya, tanpa pengarahan yang secukupnya menyebabkan penghentian prematur prosedur *audit*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan profesional sebagai variabel bebas mempunyai nilai koefisien regresi –0,639 dengan tingkat signifikan 0,003 yang lebih kecil dari α (0,05), karena nilai sig. (0,003) < α (0,10) berarti hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat, berarti pertimbangan profesional mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*. Hal ini sesuai dengan pendapat Raghunathan (1991) dan Bigss *et. al.* (1987).

Berdasarkan data deskriptif hasil penelitian, dalam merespons perilaku disfungsional *auditor* dalam penghentian prematur prosedur *audit*, *internal auditor* mengharapkan: (a) adanya jaringan dan perbaikan komunikasi dalam tim *audit*, (b) menambah variasi penugasan pekerjaan *audit*, tanpa tekanan *budget* waktu, (c) mengizinkan penggunaan pertimbangan profesi kepada staf *internal auditor* dalam batas-batas yang dapat ditolerir, (d) mengizinkan penggunaan pertimbangan profesi dalam semua tahap *audit*, dan (e) memperketat supervisi baik staf baru maupun staf lainnya, sehingga dapat menghindari perilaku disfungsional *auditor* sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan.

Data deskriptif lainnya berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bukti penghentian prematur prosedur *audit* terjadi pada *audit* keuangan, *audit* operasional dan *audit* kepatuhan masing-masing sebesar 5,17%, 3,13% dan 2,90%.

KESIMPULAN

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *internal auditing* telah terjadi penghentian prematur prosedur *audit* dalam jumlah yang kecil. Praktik penghentian prematur prosedur *audit* dilakukan karena adanya prosedur *audit* yang tidak diperlukan, kurangnya pengetahuan teknis tertentu, karena kurangnya supervisi, keterbatasan *budget* waktu, tidak menyukai pekerjaan, keinginan memperoleh evaluasi kinerja yang menguntungkan, kesalah pahaman tanggung jawab profesional dan bukti *audit* yang diperoleh hanya cukup dari hasil penjelasan *auditee*.

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa tekanan *budget* waktu, penilaian kinerja dan pertimbangan profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur *audit*, sedangkan program *audit* serta *review* dan supervisi tidak berpengaruh. Dengan demikian, hipotesis dua, tiga dan lima diterima, dan hipotesis satu dan empat ditolak.

Hal ini bermakna jika *internal auditor* mendapat tekanan *budget* waktu, mengetahui adanya penilaian

kinerja dan penggunaan pertimbangan profesional yang berkelebihan cenderung melakukan penghentian prematur prosedur *audit*. Makna lain hasil penelitian ini, bahwa jika pelaksanaan *audit* mempunyai program *audit* dan adanya *review* dan supervisi yang cukup memadai dapat menghindari perilaku negatif melakukan penghentian prematur prosedur *audit*.

Hasil penelitian ini membuktikan jika internal *auditor* kurang memahami *budget* waktu, penilaian kinerja dan pertimbangan profesional cenderung melakukan perilaku negatif penghentian prematur prosedur *audit*. Masalah penghentian prematur prosedur *audit* berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas *internal auditing*, kelalaian dalam mematuhi standar *auditing* dan melanggar etika *auditing*.

Pelanggaran dan perilaku negatif tersebut dapat dihindari dan dicegah dengan melakukan komunikasi yang lebih baik di antara tim *audit*, menambah variasi penugasan pekerjaan *audit*, pengarahan dan koordinasi tim *audit*, penggunaan pertimbangan profesional kepada semua staf *auditor* dalam semua tahap *audit* dalam batas-batas yang rasional dan memperketat supervisi oleh atasannya baik untuk *auditor* baru maupun kepada semua *auditor*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahson, Umar and A. Anandarajan. 2004. Dimension of Pressures Faced by Auditors and its Impact on Auditor Independence. *Managerial Auditing Journal*, 19(1): 99-116.

Alderman, W. C. and Deitrick, J. W. 1982. Auditor Perceptions of Time Budget Pressures and Premature Sign-offs: Replication and Extension. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 9(2): 21-42.

Azad, N. Ali. 1994. Time Budget Pressure and Filtering of Time Practices in Internal Auditing: A survey. *Managerial Auditing Journal*, 9(6): 17-25.

Bazerman, M., Morgan,K. D., and Loewenstein, G. 1997. The Impossibility of Auditor Independence. *Sloan Management Review*, (Summer): 89-94.

Biggs. S. F dan T. J. Mock. 1983. An Investigation of Auditor Decision Process in the Evaluation of Internal Control and Audit Scope Decisions. *Journal of Accounting Review,* 234-255.

Berry. L. E. 1984. *Coordinating Total Audit Coverage: Trends and Practices*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.

Brawn, P. R. and Karan, V. 1986. One Approach for Assessing the Operational Nature of Auditing Standards: An Analysis of SAS 9. Auditing*: A Journal of Practice and Theory*, 6(1):134-137.

Buchman. T. A and Tracy, J. A. 1982. Obtaining Responses to Sensitive Questions: Conventional Questionnaire Versus Randomized Response Techniques. *Journal of Accounting Research*, 20(2): 263-271.

Cockburn, D. J. 1992. Servant of Three Masters (Auditors). *CA Magazine*, 9(125): 37-39.

Cook, E. and Kelley, T. 1998. *Auditor* Stress dan Time Budget. *CPA Journal*, 58 (7): 83-86.

Fama. E. K and Jensen. M. C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*. 26(6): 301-325.

Farmer, T. A., Rittenberg, L. E., and Trompeter, G. M. 1987. An Investigation of the Impact of Economic and Organizational factors on Auditor Independence. *Auditing: A Journal of Prectice and Theory*, 7(Fall): 1-14.

Giese, M. D. 1991. Auditing the System of Internal Control. *Journal of Internal Auditing*, 6(4): 80-88.

Johnson,V. E. and Kaplan, S. E. 1991. Experimental Evidence on the Effects of Accountability on Auditor Judgements. *Auditing: A Journal of Prectice and Theory*, 10(Supplement): 96-107.

Kaplan, Steven E. 1995. An Examination of Auditor's Reporting Intentiona Upon Discovery of Procedures Prematurely Signed-Off. *Auditing: A Journal of Practice and Theory.*

Kelley. T. and Margheim. L. 1990. The Impact of Time Budget Pressure,Personality, and Leadership Variables on Dysfunctional Auditor Behaviour. *Auditing: A Journal of Practice and Theory,* 9(2): 21-42.

Knapp, M. C .1985. Audit Conflict: An Emperical Study of the Perceived Ability of *Auditor*s to Resist Management Pressure. *The Accounting Review*, 60(April): 202-211.

Lightner. S. M., Leisenring, J. J. and Winters, A. J. 1983. Underreporting Chargeable Time. *Journal of Accountancy*, 155(1): 52-57.

Lord, A. T. 1992. Pressure; *A* Methodological Consideration for Behavioral Research in Auditing. *Auditing: A Journal of Prectice and Theory*,11(2): 89-108.

Malone, Charles F. and Robin, W. Roberts. 1996. Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors. *Auditing: A Journal of Practice and Theory,* 15(2): 49-65.

Panny, K. and Reckers, P. M. J. 1980. The Effect of Gits,Discount, and Client Size on Perceived Auditor Independence. *The Accounting Review*, LV(1): 50-62.

Raghunathan, Bhanu. 1991. Prematur Signing-Off of Audit Precedures: An analysis. *Accounting Horizon,* (2): 71-79.

Sack, R. J. and Tangreti, R. 1987. ESM: Implication for the Profession. *Journal of Accountancy,* 164 (April): 100.

Shapeero, Mike, *et al.*, 2003. Underreporting and Premature Sign-Off in Public Accounting, *Managerial Auditing Journal,* 18(3): 478-489.

Soobaroyen, Teeroven and Chelven, Chengabroyan. 2005. Auditor's Perception of Time *Budget* Pressure, Premature Sign-Off and Under-reporting of Chargeable Time. *International Journal of Auditing,* 10(3): 201-208.

Suryanita, Dody dan Triatmoko, Hanung. 2007, Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 10(1).

Waggoner, Jeri. B. and James D. Cashell. 1991. The Impact of Time Pressure on *Auditor*s' Performance. *The CPA Journal*, 28(2).

Walker, R. H. 1999. Director of Enforcement addresses the Importance of Being Independent auditor: the Issues. *The CPA Journal*, 69(5): 44-50.

Ward, D. D and Robertson, J. C. 1980. Reliance on Internal Auditors. *Journal of Accountancy*, 150(4): 62-73.

Willet, C and Page, M. 1996. A Survey of Time Budget pressure and Irregular Auditing Parctices among Newly Qualified UK Chartered Accountants. *British Accounting Review*, 28(2): 101-120.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 128–138
ISSN 1411-514X

Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Perusahaan *Go Public* Berbasis Pendekatan *Multinomial Logit*

Jaja Suteja
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung
Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 40116
E-Mail: suteja_j@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this research is to provide empirical evidence of the factors that influence the probability of the managers to take part in managerial ownership. The examined factors on this study are consisted of investment opportunity sets, leverage, dividend payout ratio, profitability, growth rate of the firm, size of the firm, value of the firm, equity market value, and institutional ownership. The sample is consisted of 66 firms of which 41 of them had no managerial ownership, 10 firms had medium managerial ownership and 15 firms had high managerial ownership. The data collected is the data in the year 2007 and it is conducted by stratified random sampling. Multinomial Logit Regression is used in order to test the research hypothesis. The research finding indicates that investment opportunity sets, equity market value, size of the firm and institutional ownership are variables that significantly predict the managerial ownership. The result of this research also indicates that investment opportunity set, equity market value, the size of the firm as well as institutional ownership are statistically significant in predicting companies that have no managerial ownership.

Keywords: *managerial ownership, leverage policy, dividend, value of the firm, size of the firm, growth rate of the firm, institutional ownership, multinomial logit regression.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap probabilitas para manajer untuk berpartisipasi dalam kepemilikan manajerial. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari set peluang investasi, *leverage*, rasio pembayaran dividen, profitabilitas, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, nilai pasar ekuitas, dan kepemilikan intitusional. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 66 perusahaan, terdiri dari 41 perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial, 10 perusahaan di antaranya memiliki kepemilikan manajerial sedang dan 15 perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi. Data yang dikumpulkan yaitu selama tahun 2007 dan diambil secara *stratified random sampling*. Regresi *Multinomial Logit* digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel set peluang investasi, nilai pasar ekuitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional adalah variabel yang secara signifikan mempengaruhi kepemimpinan manajerial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa set peluang investasi, nilai pasar ekuitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional signifikan secara statistik dalam memprediksi perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial.

Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kebijakan *leverage*, dividen, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, regresi multinomial.

PENDAHULUAN

Studi empiris Claessens, *et. al.* (2002:2741-2771) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan terbuka, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga masih signifikan. Lebih lanjut Claessens, *et. al.* (2002:2741-2771) menyebutkan bahwa kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 10 perusahaan keluarga di Indonesia, Filipina, dan Thailand hasilnya seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Kepemilikan Saham oleh Keluarga (*Family Held*) 10 Perusahaan Terbuka (Tbk.)

No.	Negara	Persentase Kepemilikan Keluarga
1.	Indonesia	57.70%
2.	Filipina	52.50%
3.	Thailand	46.20%
4.	Malaysia	28.30%

Sumber: Claessens *et. al.* (2002:2741-2771)

Tabel 2. menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih terkonsentrasi pada *blockholders*, sedangkan jumlah saham yang benar-benar dimiliki oleh *public* rata-rata hanya sebesar 27.20% bahkan relatif lebih kecil dalam praktiknya (*Indonesian Capital Market Directory*, 2007).

Tabel 2. Rata-Rata Kepemilikan Saham Perusahaan yang Telah *Go Public*

No.	Nama Kepemilikan	Rata-Rata (%)
1.	Kepemilikan Saham Manajerial	14.55
2.	*Blockholders or Institutional*	58.11
3.	*Cooperatives*	0.14
4.	*Public*	27.20

Sumber: *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), 2007

Jumlah persentase kepemilikan saham manajerial tersebut relatif besar jika dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh koperasi. Hal yang menarik dari tabulasi tersebut adalah rata-rata kepemilikan saham manajerial yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sama yang terjadi di pasar modal asing. Struktur ini menjadi lebih terkonsentrasi jika dilihat dalam kenyataanya, karena para pendiri perusahaan pada umumnya masih memiliki saham perusahaannya melalui anak-anak perusahaannya, sehingga nilai tersebut dalam prakteknya akan lebih tinggi. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan sejumlah perusahaan terbuka di Korea, melalui kelompok *Chaebol*-nya.

Apabila dibandingkan dengan sejumlah pasar modal di negara-negara maju, di mana pada umumnya penelitian empiris mengenai teori keagenan sudah banyak dilakukan, maka struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia sangatlah unik. Pasar modal negara-negara maju, seperti di Amerika Utara dan sejumlah negara Eropa, pemisahan kepemilikan dan pengawasan lazim dilakukan oleh suatu badan yang memiliki independensi kekuasaan yang cukup kuat. Gambar berikut ini menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan perusahaan yang bersifat *diffused ownership structure.*

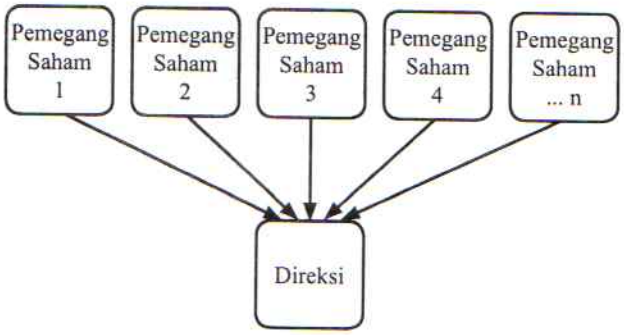

Gambar 1. Struktur Kepemilikan Perusahaan yang Tersebar

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan mampu mengurangi bahkan meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara pengendali perusahaan dan *outside investor,* terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi seperti pada Gambar 2.

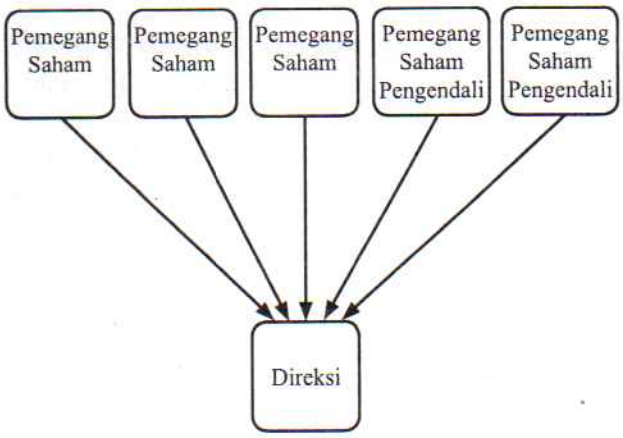

Sumber: Herdinata (2008:22-27)

Gambar 2. Struktur Kepemilikan Perusahaan dengan Pengendali

Gambar 2. tersebut tampak bahwa terdapat sekelompok pemegang saham yang mengontrol atau mengendalikan perusahaan. Arah kebijakan dan strategi perusahaan relatif merepresentasikan arah atau kepentingan para pemegang saham mayoritas, sehingga dalam kondisi kepemilikan saham seperti ini akan meningkatkan probabilitas munculnya ekspropriasi kepentingan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis apakah *IOS, leverage, dividend payout ratio, growth, profitability, value of the firm, market value of the equity and institutional ownership* mampu digunakan untuk memprediksi dan berpengaruh terhadap tingkat kepemilikan saham manajerial. Penelitian ini berbeda dengan sejumlah penelitian lain yang sejenis, terutama dalam masalah: (i) unit analisis penelitian; (ii) variabel dan proksi variabel penelitian; serta (iii) teknik analisis yang digunakan.

Sesuai dengan pendahuluan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh hasil kajian tentang prediksi set peluang investasi, *leverage*, rasio pembayaran dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, nilai perusahaan, nilai pasar ekuitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional terhadap kategori kepemilikan saham manajerial pada perusahaan-perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Memperoleh hasil analisis mengenai besarnya nilai signifikansi set peluang investasi, *leverage*, rasio pembayaran dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, nilai pasar ekuitas, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional terhadap kepemilikan saham manajerial baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada perusahaan-perusahaan di BEI.
3. Memperoleh hasil analisis mengenai besarnya daya klasifikasi model *Multinomial Logit Regression* dalam memprediksi masing-masing kelompok kepemilikan saham manajerial perusahaan-perusahaan yang telah *go public* di BEI.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kepemilikan manajerial perusahaan yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia. Metode deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan setiap variabel penelitian beserta formulasi matematis pembentuk setiap variabel penelitian. Tujuan dari deskripsi variabel penelitian ini adalah untuk mendapatkan kecenderungan arah pergerakan serta pola dari setiap variabel untuk menunjang hasil analisis verifikatif yang dilakukan peneliti.

Sementara itu, metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel atau menguji hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausalitas yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu bukti empiris mengenai model kepemilikan manajerial perusahaan dari perusahaan yang terdaftar dan tetap aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan pendekataan *Multinomial Logit* (MnL). Sekaran (2000:127) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik *hypothesis testing* adalah untuk menetapkan perbedaan antara beberapa kelompok unit penelitian. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia untuk setiap perusahaan yang datanya akan dianalisis. Oleh karena itu, lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Formulasi	Satuan	Skala
I. Variabel Dependen	Persentase nilai saham yang dimiliki oleh direksi perusahaan pada akhir tahun.	*Insider*	$\frac{D\&C}{Shrs_{it}}$	Persen	Rasio
	Saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan *i* pada periode *t*.	$D\&C\,Shrt_{it}$		Lembar Saham	Rasio
	Jumlah total saham yang beredar perusahaan *i* pada periode ke-*t*.	$TotShrt_{it}$		Lembar Saham	Rasio
	Variabel dependen kelompok/ kategori pertama tanpa kepemilikan manajerial.	$Pr(y_i = 1\|x_i) = P_{i1} = \frac{1}{1+exp(x_i'\beta_2)+exp(x_i'\beta_3)}$	$= \frac{\eta_{i1}}{\eta_{i1}+\eta_{i2}+\eta_{i3}}$	Persen	Nominal
	Variabel dependen kelompok/ kategori kedua tanpa kepemilikan manajerial sedang.	$Pr(y_i = 2\|x_i) = P_{i2} = \frac{exp(x_i'\beta_2)}{1+exp(x_i'\beta_2)+exp(x_i'\beta_3)}$	$= \frac{\eta_{i2}}{\eta_{i1}+\eta_{i2}+\eta_{i3}}$	Persen	Nominal
	Variabel dependen kelompok/ kategori ketiga kepemilikan manajerial tinggi.	$Pr(y_i = 3\|x_i) = P_{i3} = \frac{exp(x_i'\beta_3)}{1+exp(x_i'\beta_2)+exp(x_i'\beta_3)}$	$= \frac{\eta_{i3}}{\eta_{i1}+\eta_{i2}+\eta_{i3}}$	Persen	Nominal
II. Variabel Independen					
1. Set Peluang Investasi	Mengukur besarnya investasi pada aset utama perusahaan dibandingkan keseluruhan aset.	*IOS*	$\frac{Book\ Value}{Market\ Value} \times 100\%$	Persen	Rasio
2. *Leverage*	Mengindikasikan jumlah dana yang digunakan untuk mendanai aktiva yang berasal dari sumber pinjaman.	*Lev*	$\frac{Total\ Debt}{Total\ Asset} \times 100\%$	Persen	Rasio
	Jumlah utang jangka panjang perusahaan ke-*i* pada periode ke-*t*.	*Tot Debt*		Rupiah	Rasio
	Jumlah aktiva perusahaan pada periode ke-*t*	$Total\ Assets_{it}$		Rupiah	Rasio
3. Rasio Pembayaran Dividen	Besarnya dividen per lembar saham yang diberikan terhadap *earnings* yang diperoleh untuk per lembar sahamnya.	DPS_t	$\frac{DPS_{it}}{EPS_{it}} \times 100\%$	Rupiah	Rasio
	Dividen dibayarkan untuk setiap lembarnya oleh perusahaan *i* pada periode *t*.	DPS_{it}		Rupiah	Rasio
	Besarnya *earning* pada perusahaan *i* periode *t* untuk setiap lembarnya.	EPS_{it}		Rupiah	Rasio
4. Profitabilitas	Kemampulabaan perusahaan yang dihitung dari perbandingan *Earning After Tax* (EAT) terhadap *Total Equity* (TE).	ROE_{it}	$\frac{EAT_{it}}{TotEquity}$	Persen	Rasio
	Keuntungan bersih perusahaan *i* selama periode *t*.	EAT_{it}		Rupiah	Rasio
	Total modal sendiri perusahaan *i* pada periode *t*.	$Tot\ Equity_{it}$		Rupiah	Rasio

5. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan	Variabel ini mengindikasikan tingkat pertumbuhan kekayaan perusahaan, dihitung dari lag aktiva satu tahun.	*Growth*$_{it}$	$\frac{TA_t - TA_{t-1}}{TA_{t-1}}$	Persen	Rasio
	Total Aktiva perusahaan pada periode *t*.	TA_t		*Rupiah*	*Rasio*
	Total Aktiva perusahaan pada periode *t*–1.	TA_{t-1}		*Rupiah*	*Rasio*
6. Nilai Perusahaan	Merupakan perbandingan antara (nilai pasar ekuitas + *Book value of debt*) dibagi dengan nilai buku dari aktiva (*Book value of Asset*) perusahaan.	*Tobin's Q*	$TQ = \frac{MVE + BVD}{BVA}$	Nominal	Rasio
	Current sock price	*MVE*		Rupiah	Rasio
	Outstanding share	*BVD*		Rupiah	Rasio
	Book value of debt	*BVA*		Rupiah	Rasio
	• *Buying price*			Rupiah	Rasio
	• *Acc depreciation*				
7. Nilai Pasar Ekuitas$_{it}$	Nilai pasar dari ekuitas yang dihitung dari hasil perkalian antara harga saham dengan saham beredar.	*NPE*$_{it}$	*Ln (Closing Price*$_{it}$ × *Total Share Outstanding*$_{it}$)	Logaritma Natural	Rasio
	Harga penutupan tahunan saham yang telah *go public* di BEI.	*Closing Price*$_{it}$		Rupiah	Rasio
	Jumlah saham yang beredar di pasar bursa perusahaan *i* periode-*t*.	*Outstanding Share*$_{it}$		Lembar Saham	Rasio
8. Ukuran Perusahaan	Logaritma dari *Total Sales* perusahaan ke-*i* pada periode ke-*t*.	*Size*$_{it}$	*Ln (Tot.Sales*$_{it}$)	Logaritma Natural	Rasio
	Total penjualan perusahaan *i* pada periode ke-*t*.	*Total Sales*$_{it}$		Rupiah	Rasio
9. Kepemilikan Saham Instusional	Merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi (yayasan, lembaga keuangan Bank dan non Bank dalam dan luar negeri, dan koperasi) atau *blockholders* pada akhir tahun.	*INSTI*$_{it}$	$\frac{Instl_{it}}{TotOutShrt_{it}}$	Persen	Rasio
	Institutional ownership adalah jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga termasuk oleh koperasi.	*Insts Shrs*$_{it}$		Jumlah Lembar Saham	Rasio
	Total outstanding share adalah jumlah saham yang beredar di pasar.	*TotOut Shrti*		Jumlah Lembar Saham	Rasio
10. SBI Rate$_{it}$	Mengindikasikan naik atau turunnya *opportunity cost* pada periode tertentu untuk melakukan aktivitas investasi.	*SBI rate*	*SBI*$_t$	Persen	Rasio

HASIL

Dalam pengujian ini dimaksudkan untuk melihat proporsionalitas tingkat akurasi kesempatan untuk setiap *case* dalam masing-masing kelompok kepemilikan saham manajerial yang telah didefinisikan pada bagian sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari *marginal percentage* untuk masing-masing kelompok dikalikan dengan nilai *benchmark* model dari program dengan nilai rata-rata sebesar 25%. Tabel 4. menunjukkan ringkasan *case processing model.*

Nilai proporsional tingkat akurasi kesempatan untuk setiap kategori dalam model baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 sebesar $0.627^2 + 0.16^2 + 0.213^2 = 0.4641$ atau sebesar 46.41% dengan demikian kriteria proporsionalitas kesempatan untuk setiap kelompok sebesar (1.25 × 46.41%) = 58.01%. Nilai ini kemudian harus dibandingkan dengan persentase daya klasifikasi model penelitian secara keseluruhan yaitu sebesar 76% yang merupakan akumulasi kuadratik dari nilai *marginal percentage* untuk masing-masing kelompok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang dibentuk memiliki daya klasifikasi yang nyata atau bermanfaat.

Tabel 4. *Case Processing Summary*

		N	Marginal Percentage
InsiderY	0	47	62.7%
	1	12	16.0%
	2	16	21.3%
Valid		75	100.0%
Missing		0	
Total		75	
Subpopulation		75[a]	

a. The dependent variable has only value observed in 75 (100.0%) subpopulations.

Sumber: Data diolah

Hasil analisis dengan menggunakan metode *person* menunjukkan bahwa model *fit* (0.963), hal ini mengindikasikan bahwa model yang dirumuskan dalam penelitian layak atau memiliki nilai kebaikan untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kecocokan Model

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	102.642	130	.963
Deviance	87.325	130	.998

Sumber: Hasil olah data

Kose dan Williams (1985:1053-1070) mengemukakan konsep mengenai *demand and supply hypothesis*. *Demand hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan yang dikuasai oleh *insiders* menggunakan hutang dalam jumlah besar untuk mendanai perusahaan. Dengan persentase kepemilikan yang besar, pihak *insiders* ingin mempertahankan efektivitas kontrol terhadap perusahaan.

Berdasarkan Tabel 6. tampak bahwa dengan tingkat signifikansi 5% terdapat 4 (empat) variabel independen yang signifikan secara statistik dan dapat digunakan untuk memprediksi dan membedakan atau mengklasifikasikan (*in distinguishing*) ke dalam kelompok perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki saham manajerial atau Perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial tinggi, variabel tersebut adalah: (i) IOS; (ii) EMV; (iii) Size dan (iv) INSTL. Hasil pengujian regresi *multinomial logit* seperti pada Tabel 6.

Sementara itu model kedua adalah kemampuan model penelitian untuk dapat digunakan dalam memprediksi antara perusahaan dengan kepemilikan tinggi (*reference group*) dengan perusahaan dengan kepemilikan sedang. Model *Multinomial Logit Regression* memiliki daya klasifikasi dan mampu digunakan untuk memrediksi kelompok kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan terdapat 66 unit analisis yang yang dapat digunakan.

Tabel 6. *Parameter Estimates*

InsiderY[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp (B)	90% Confidence Interval for Exp (B) Lower Bound	Upper Bound
0	Intercept	−8.695	4.650	3.496	1	.062			
	IOSX1	−.995	.590	2.842	1	.092	.370	.140	.976
	LevX2	.006	.024	.072	1	.788	1.006	.968	1.047
	DPRX3	.009	.020	.207	1	.649	1.009	.977	1.042
	ROEX4	.059	.054	1.217	1	.271	1.061	.971	1.160
	GrowthX5	.001	.003	.323	1	.570	1.001	.997	1.006
	TobinsQX6	.000	.000	.519	1	.471	1.000	1.000	1.000
	EMVX7	−.659	.369	3.182	1	.074	.517	.282	.950
	SIZEX8	1.173	.444	6.977	1	.008	3.232	1.557	6.711
	INSTLX9	.088	.029	9.026	1	.003	1.092	1.041	1.146
1	Intercept	−8.980	9.316	.929	1	.335			
	IOSX1	1.014	1.973	.264	1	.607	2.757	.107	70.741
	LevX2	.051	.040	1.645	1	.100	1.052	.986	1.124
	DPRX3	−.005	.030	.028	1	.867	.995	.948	1.045
	ROEX4	.084	.062	1.786	1	.120	1.087	.981	1.205
	GrowthX5	−.012	.011	1.033	1	.309	.988	.970	1.007
	TobinsQX6	−.002	.001	1.762	1	.184	.998	.996	1.000
	EMVX7	.613	1.339	.209	1	.647	1.845	.204	16.688
	SIZEX8	−.650	1.405	.214	1	.644	.522	.052	5.269
	INSTLX9	.062	.038	2.609	1	.100	1.064	.999	1.133

a. The reference category is: 2.

Tabel 7. memberikan gambaran kuantitatif mengenai kemampuan model dalam mengklasifikasi kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya variabel Y dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: kelompok 1 (adalah perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial); kelompok 2 (adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial sedang) sementara kelompok 3 adalah kelompok perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial tinggi.

Hasil analisis regresi *Multinomial Logit* untuk model Klasifikasi ditunjukkan oleh Tabel 7. berikut.

Tabel 7. Hasil Daya Klasifikasi Model Penelitian

Observed	Predictied 0	1	2	Percent Correct
0	45	1	1	95.7%
1	6	5	1	41.7%
2	9	0	7	43.8%
Overall Percentage	80.0%	8.0%	12.0%	74.0%

Sumber: Data diolah

Data yang dapat dikumpulkan adalah 75 unit analisis, merupakan laporan keunagan dari subjek penelitian yang memiliki irisan selama periode penelitian selama tahun 2007, dengan demikian subjek penelitian sebanyak 75 perusahaan adalah populasi. Hasil identifikasi terhadap 75 subjek perusahaan sebagai populasi ternyata diperoleh fakta bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham *manajerial* sebanyak 47 perusahaan; 12 sampel perusahaan memiliki komposisi kepemilikan saham sedang dan sisanya adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham tinggi sebanyak 16 perusahaan.

Kelompok pertama, adalah perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham oleh manajemen, dari 47 perusahaan yang ada dan di prediksi tidak memiliki kepemilikan saham ternyata terdapat 45 perusahaan dapat diprediksikan secara tepat tidak memiliki kepemilikan saham manajerial atau sebanyak 95.7% tingkat keakurasian prediksi untuk kelompok 1. Sementara itu, dari 12 perusahaan yang diprediksi memiliki persentase kepemilikan manajerial sedang ($0 < insiders \leq 3.15\%$) ternyata hanya 5 perusahaan saja tepat memiliki komposisi kepemilikan sedang atau hanya sebesar 41.70% saja keakurasian prediksi kelompok 2 ini. Terkahir dari sampel untuk kelompok 3 sebanyak 16 perusahaan ternyata tepat dapat diprediksi sebagai kelompok perusahaan yang memiliki kepemilikan saham tinggi sebanyak 7 perusahaan atau hanya sebesar 43.80% saja.

Sementara itu, Tabel 8. mengindikasikan hasil pengujian model secara serempak. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa masing-masing karakteristik perusahaan dan variabel ekonomi makro berpengaruh terhadap kepemilikan saham manajerial pada perusahaan yang *listed* di BEI signifikan secara statistik. Tabel 8. sekaligus memberikan jawaban terhadap hipotesis pertama penelitian ini yang mengatakan bahwa karakteristik spesifik perusahaan dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap komposisi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan terbuka di Indonesia.

Tabel 8. *Overall Test Fitting Model*

	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	121.228			
Final	70.915	50.313	18	.000

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan *model fitting criteria* mengindikasikan bahwa nilai –2LL pada model final lebih kecil dari –2LL pada model *Intercept Only,* hal ini membuktikan bahwa model dapat diterima, dengan perkataan lain hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Masing-masing variabel karakteristik perusahaan (set peluang investasi, *leverage*, rasio pembayaran dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, nilai pasar ekuitas, kepemilikan institusional) dan variabel tingkat suku bunga SBI berpengaruh baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap kepemilikan saham manajerial perusahaan-perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel set peluang investasi (*investment opportunity sets*) yang diproksi dari perbandingan nilai buku (*book value*) dan nilai pasar (*market price*) aktiva memiliki koefisien regresi positif (8.260) dan signifikan secara statistik pada taraf alfa sebesar 5%. Hasil analisis variabel ini tidaklah mengejutkan, apabila dilihat dari sudut pandang manajemen keuangan, dengan meningkatnya set peluang investasi akan mendorong makin tingginya tingkat kesejahteraan pemilik, dengan semakin meningkatnya kesejahteraan moneter dari para pemilik maka akan mendorong para manajer atau eksekutif menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan dengan harapan meningkatnya kesejahteraan moneter mereka.

Hasil analisis regresi *multinomial logit* menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak signifikan secara statistik. Hasil ini berbeda dengan studi empiris yang dilakukan oleh Mahadwartha (2003) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki koefisien negatif dan memiliki relasional signifikan secara statistik dengan kepemilikan manajerial. Namun demikian, perlu diwaspadai mengenai kebijakan pendanaan melalui utang, perusahaan yang memiliki utang signifikan dihadapkan pada perubahan kondisi ekonomi makro yang *un-controllable.*

Hasil analisis regresi *multinomial logit* menunjukkan bahwa variabel rasio pembayaran dividen ternyata tidak signifikan secara statistik dengan nilai koefisien variabel positif. Dengan tidak signifikannya variabel ini, maka variabel ini pada dasarnya dapat diabaikan dari interpretasi model penelitian kepemilikan saham manajerial. Namun demikian, logika rasional yang dapat dijelaskan dari relasional

rasio pembayaran dividen dengan kepemilikan saham manajerial adalah bahwa secara umum, kondisi perilaku pemilik saham relatif lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya dalam bentuk reinvestasi pada perusahaan dalam bentuk laba ditahan (*retained earnings*).

Profitabilitas adalah rasio yang mengindikasikan seberapa besar sejumlah kapital yang digunakan oleh perusahaan pada periode tertentu dan mampu menghasilkan sejumlah imbal hasil (*return*). Hasil analisis penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak signifikan secara statistik, variabel ini memiliki nilai koefisien positif, berarti semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi kepemilikan saham manajerial.

Kinerja keuangan (*financial performance*) dalam penelitian ini direpresentasikan dengan menggunakan *return on equity* (ROE). Formulasi ini merupakan indikator penting bagi para pemilik perusahaan (*shareholders*). Meskipun demikian, kita harus hati-hati menggunakan formulasi ROE ini, karena rumusan ini tidak merepresentasikan keseluruhan dana yang diinvestasikan (*invested fund*).

Tingkat pertumbuhan perusahaan merefleksikan apakah perusahaan dalam suatu industri berkembang atau tidak. Idealnya perusahaan-perusahaan mengharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah dan besar, begitu juga perusahaan menengah menginginkan menjadi perusahaan besar serta perusahaan besar dapat tetap bertahan dan terus meningkatkan kemampuannya.

Arah koefisien positif dari variabel *Tobin's Q* mengindikasikan bahwa ketika nilai perusahaan meningkat maka ada kecenderungan kepemilikan saham oleh pihak manajemen juga mengalami peningkatan. Hasil analisis variabel ini ternyata berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya, studi empiris Barnhart and Resentei (1998), Luciana dan Meliza (2006), Agus Sartono. (2001) juga Mahadwartha (2003) dan juga beberapa peneliti lainnya menemukan hubungan yang bersifat *non-monotonic* antara kepemilikan saham oleh pihak manajemen dengan kinerja keuangan perusahaan.

Variabel ketujuh dalam penelitian disertasi ini adalah nilai pasar ekuitas (*equity market value*). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel nilai pasar ekuitas yang dihitung dengan menggunakan *logaritma natural* (Ln) hasil perkalian *closing price* dengan *outstanding-share* ternyata signifikan secara statistik pada taraf alfa sebesar 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa vaiabel nilai pasar ekuitas secara parsial memiliki relasional yang signifikan secara statistik terhadap tingkat persentase kepemilikan saham manajerial pada perusahaan-perusahaan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Ukuran perusahaan dalam sejumlah penelitian sering dijadikan sebagai variabel kontrol. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh inkremental (*incremental effect*) dari nilai aktiva atau tingkat penjualan perusahaan. Hasil analisis variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini, signifikan secara statistik pada taraf alfa sebesar 1% dengan arah koefisien positif. Hasil analisis ini konsisten dengan studi empiris yang dilakukan oleh Tandelilin dan Wilberforce (2002) juga studi empiris Harada and Nguyen (2006), namun hasil ini tidak konsisten dengan studi empiris Mahadwartha (2003) juga Luciana dan Meliza (2006).

Variabel kesembilan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham institusional (*institutional ownership*). Variabel ini memiliki nilai *chi-square* sebesar 17.676. Hasil analisis regresi *multinomial logit* menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, variabel kepemilikan saham institusional secara parsial memiliki signifikansi relasional secara statistik terhadap kepemilikan saham manajerial pada perusahaan-perusahaan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Sejumlah studi empiris yang dilakukan menyebutkan bahwa kinerja pasar saham perusahaan yang telah *go public* di pasar modal ternyata hanya sekitar 5% sampai dengan 20% saja dipengaruhi oleh variabel fundamental perusahaan, dan sisanya sebesar 80% sampai dengan 95% dipengaruhi oleh faktor eksternal (Adler, 2004), termasuk di dalamnya berbagai indikator ekonomi makro, seperti inflasi, SBI *rate*, IHSG dan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini, variabel SBI *rate* memiliki kelemahan, karena dalam proses pengolahan data, variabel ini memiliki nilai yang sama untuk setiap *cases*, karena nilai SBI *rate*-nya baik data secara *time series*, maupun untuk data *cross section* pada periode tertentu (tahun) memiliki nilai yang sama, sehingga analisis data ini tidak memberikan nilai keunikan atau *degrees of freedom* dari variabel ini sama dengan nol (*this reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect doesn't increase the degree of freedom*).

Hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa Model *Multinomial Logit Regression* (M_NLR) memiliki daya klasifikasi dan mampu digunakan untuk menduga kelompok kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan terdapat 66 unit analisis yang valid yang dapat digunakan dari 74 unit analisis, di mana delapan di antaranya *missing*.

Analisis persentase kepemilikan saham manajerial secara keseluruhan (*overall percentage*) menunjukkan bahwa dari 75 perusahaan sebagai sampel penelitian, diprediksikan tidak memiliki kepemilikan saham manajerial sebanyak 60 perusahaan sampel atau sebesar 80% (60/75*100%), sementara itu dari 75 populasi perusahaan yang diprediksikan memiliki kepemilikan manajerial sedang sebanyak 6 perusahaan saja hanya sebesar 8% saja atau (6/75*100%) dan terakhir dari 75 sampel perusahaan dan diprediksikan memiliki kepemilikan saham tinggi, hanya ada sebanyak 9 perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan tinggi (*insiders* > 3.15%) atau sebesar 12% (9/75*199%).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan peneliti, model dapat digunakan untuk memprediksi kategori variabel dependen kepemilikan saham manajerial perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Model ini tepat untuk memprediksi perusahaan-perusahaan tanpa kepemilikan saham dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel penelitian dalam disertasi ini memiliki pengaruh terhadap kepemilikan saham manajerial. Secara parsial beberapa variabel signifikan secara statistik di antaranya: variabel IOS, profitabilitas, *growth*, nilai perusahaan, nilai ekuitas perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham institusional.

Pengujian *Parameter Estimate* telah menjawab tujuan penelitian yang kedua dan ketiga, yaitu Model *Multinomial Logit* memiliki daya klasifikasi kelompok kepemilikan saham manajerial pada perusahaan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Hasil analisis Model Klasifikasi (*Classification Model)* menunjukkan bahwa model prediksi dengan menggunakan pendekatan *Multinomial Logit Regression* ternyata dapat digunakan dalam memrediksi kategori variabel dependen kepemilikan saham manajerial perusahaan-perusahaan yang telah terbuka di Pasar Modal Indonesia.

Memperhatikan hasil analisis *multinomial logit* yang telah penulis lakukan, maka beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah para pelaku bisnis dapat mempertimbangkan sejumlah variabel yang dalam penelitian ini ternyata tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik. Hasil analisis menunjukkan terdapat 2 variabel independen tidak bermakna atau signifikan, yaitu: *Leverage* dan DPR. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah variabel yang mampu menjelaskan mengenai kepemilikan saham manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

Akerlof, G., Michael Spence, and Joseph Stiglitz. 2001. Markets With Asymmetric Information. *The Scandinavian Journal Of Economics*, 104(2): 195-211.

Almilia, Luciana Spica dan Meliza, Silvy. 2006. Analisis Kebijakan Dividen Terhadap Prediksi Kepemilikan dengan Teknik Analisis Multinomial Logit. *Jurnal Akuntansi dan Bisinis*, 6(1).

Barnhart, S. W. dan Resentein. 1998. Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Ferformance: An Empirical Analysis. *The Financial Review*, 33: 1-16.

Bathala, C. T., K. P. Moon, and R. P. Rao. 1994. Managerial Ownership, Debt Policy,and the Impact of Instititional Holdings: An Agency Perspective. *Financial Management,* 23(3): 38-50.

Bhattacharya, S. 1980. Nondissipative Signaling Structures & Dividend Policy. *Quarterly Journal of Economics*, 95(1): 1-24.

Brigham, E. F. dan L. C., Gapenski. 2000. *Intermediate Financial Management.* New York: The Dryden Press.

Budi Wibowo, 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan: Kasus Indonesia, *Manajemen Usahawan Indonesia,* XXXV (Mei): 13-21.

Chowdhury, Anup. 2007. Determinants Of Managerials Ownership and The Link Between Ownership And Performance; development of Testable Hypothesis. *BRAC University Journal*, 4(1): 63-74.

Claessens, S., Simeon, D., Joseph, R. H., Fan & Larry, H. P. Lang. 2002. Disentangling The Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. *Journal of Finance,* 57(6): 2741-2771.

Crutchley, Claire and Robert S. Hansen.1989. A Test of The Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage and Corporate Dividends. *Financial Management,* 18: 36-46.

DeAngelo, H. and R. W. Masulis. 1980. Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation. *Journal of Financial Economics*. 8: 3-29.

Harada, K. and Nguyen, Pascal. 2006. *Ownership Concentration, Agency Conflict, and Dividend Policy in Japan*. Graduate School of International Accounting. Japan: Chuo University.

Herdinata, Christian. 2008. *Good Corporate Governance Vs. Bad Corporate Governance: Pemenuhan Kepentingan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas*. The 2nd Conference UKWMS, Surabaya, Indonesian Capital Market Directory, 2004-2008.

Institute for Economic and Financial Research. 2007. *Indonesian Capital Marketing Directory*.

Kose, John and Joseph Williams S. 1985. Dividend, Dillution and Taxes: A Signalling Equilibrium. *The Journal of Finance*, 40(4): 1053-1070.

Mahadwarta, Putu Anom. 2003. Predictability Power of Dividend Policy and Leverage Policy to Managerial Ownership: An Agency Theory Perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(3): 288-297.

Manurung, Adler H. 2004. Teori Struktur Modal: Sebuah Survey. *Manajemen Usahawan*, XXXIII: 20-46.

Sartono, Agus. 2001. Pengaruh Aliran Kas Internal dan Kepemilikan Manajer dalam Perusahaan Terhadap Pembelanjaan Modal: Managerial Hypothesis atau Pecking Order Hypothesis?. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16(1): 54-63.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 139–147
ISSN 1411-514X

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar

Zulki Zulkifli Noor
Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Winaya Mukti
Jl. Turangga Raya no. 25 Bandung
E-Mail: ake_zulkifli@yahoo.com

ABSTRACT

The general objective of this study was to know how far the effect to changing of Rupiah's Exchange Rate to American Dollar by three factor of economic: inflation rate, interest rate and money supply, and also to know its causality link. The evaluations are carried out by several data of inflation rate, interest rate and money supply from that two country. A multiple regression was done to determine how far the effect of the variables above. Some statistical test, that is related to regression, was done too. Also Granger's causality test was done to know the causality link. Based upon data analyzed in this study, there are some conclusions as follow: (1) if inflation rate, interest rate and money supply is used partially, there is no significant influence or effect on changing of exchange rate. (2) in other way, if those factor is integrated in using of analysis, there is quite significant. (3) and the last, for interest rate and money supply have causality relation to changing of exchange rate, but not inflation rate.

Keywords: *inflation, interest rate, money supply, exchange rate.*

ABSTRAK

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh efek terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika oleh tiga faktor ekonomi: tingkat inflasi, tingkat bunga dan jumlah uang beredar, dan juga untuk mengetahui hubungan kausalitasnya. Evaluasi dilakukan oleh beberapa data tingkat inflasi, tingkat bunga dan jumlah uang beredar dari dua negara. Regresi berganda dilakukan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh dari variabel-variabel di atas. Beberapa uji statistik, yang berhubungan dengan regresi, dilakukan juga. Uji kausalitas Granger juga itu dilakukan untuk mengetahui link kausalitas. Berdasarkan data yang dianalisis dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) jika tingkat inflasi, tingkat bunga dan jumlah uang beredar digunakan sebagian, tidak ada pengaruh signifikan atau efek pada perubahan nilai tukar. (2) dengan cara lain, jika dipergunakan faktor yang terintegrasi maka menghasilkan hasil yang cukup signifikan. (3) dan untuk tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar memiliki hubungan kausalitas dengan perubahan nilai tukar, tetapi tingkat inflasi.

Kata kunci: inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar.

PENDAHULUAN

Proses globalisasi menyebabkan kegiatan atau aktivitas ekonomi sekarang menjadi satu kesatuan global (*globally unified*). Perubahan yang terjadi pada ekonomi suatu negara, secara cepat mempengaruhi ekonomi negara lain terutama negara-negara yang menjadi partner ekonomi atau mempunyai hubungan ekonomi yang sangat erat.

Perubahan-perubahan dalam aktivitas ekonomi ini biasanya tercermin dalam perubahan atau fluktuasi nilai mata uang. Tentu saja, konsekuensinya bagi perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan eksportir atau importir akan menghadapi kecemasan depresiasi atau apresiasi. Belum lagi mengantisipasi aktivitas para spekulan mata uang yang kadang cukup signifikan mempengaruhi nilai mata uang.

Secara umum yang mempengaruhi nilai tukar adalah faktor fundamental, faktor teknis, faktor psikologis dan faktor spekulasi, sedangkan secara tidak langsung penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari suatu mata uang dipengaruhi oleh neraca pembayaran (*balance of payment*), tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, peraturan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan sudut pandang teori makroekonomi, ada empat faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, peredaran uang dan neraca pembayaran. Ketiga faktor yang pertama merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi atau menentukan nilai tukar. Neraca pembayaran merupakan faktor yang cukup kompleks, karena mempertimbangkan lebih banyak faktor ekonomi dibanding ketiga lainnya (Miranda S., 1993)

Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan *purchasing power parity theory* (PPP) atau teori kesamaan daya beli. PPP absolut, yang juga disebut *law of one price* (LOP) menyatakan bahwa harga suatu barang atau produk yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula dinilai dalam mata uang yang sama. Jika ada perbedaan harga dalam mata uang yang sama, maka akan ada perubahan permintaan sehingga harga barang juga berubah. Konsekuensinya perubahan harga yang terjadi akan berakibat pada penyesuaian nilai tukar.

Interest Rate Parity Theory (IRP) atau teori IRP adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa mata uang asing dengan pasar uang internasional. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada pasar uang internasional akan cenderung sama dengan *forward rate premium* atau *discount*.

Dalam kenyataannya, korelasi antara tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar tidaklah signifikan, karena dipengaruhi secara simultan oleh kejadian baru dan informasi yang sama (Kulkarni, 2008). Karena setiap kali ada perubahan yang terjadi akan selalu diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan.

Beberapa studi mengenai perilaku pembentukan harga atau inflasi telah banyak dilakukan di beberapa negara, yang umumnya dengan menggunakan pendekatan ekonometrik/makro dan data agregat (Quah and Vahey, 1995; Gali, 1999; Bullard and Keating, 1995). Studi berikutnya memperlengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan mengakomodir beberapa aspek antara lain perilaku pembentukan upah di pasar input, perilaku kegiatan di sektor *wholesale*, serta penekanan analisis pada kekakuan harga (*price rigidity*). Secara umum, kedua studi tersebut menyimpulkan bahwa inflasi di Indonesia lebih disebabkan oleh dorongan biaya (*cost-push*), yang umumnya dipicu oleh kenaikan *administered price*, pajak, upah minimum, dan depresiasi rupiah. Sementara itu, tekanan sisi permintaan tidak begitu kuat, kecuali pada perayaan hari besar keagamaan. Temuan penting lainnya adalah pembuktian mengenai perilaku kekakuan harga yang bersifat *downward rigidity* (Riyatno, 2007).

Dari sisi Bank Indonesia, kuatnya pengaruh tekanan dari sisi penawaran tersebut mengimplikasikan pentingnya penerapan kebijakan moneter. Dalam hal ini, pengaruh kebijakan moneter terhadap struktur biaya dapat dibagi menjadi tiga saluran, yaitu *expected inflation*, nilai tukar, dan suku bunga. Kebijakan yang bersifat ekspansioner dapat menyebabkan terjadinya depresiasi yang pada gilirannya dapat menaikan harga-harga produk *manufacturing* melalui peningkatan harga bahan baku yang diimpor. Kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan ekspektasi inflasi baik secara langsung melalui sisi permintaan agregat maupun secara tidak

langsung melalui peningkatan harga barang-barang *tradable*. Di lain pihak ongkos perusahaan dapat jadi turun melalui penurunan pembayaran bunga atas kredit perbankan. Oleh karena itu, efek bersih suatu kebijakan moneter terhadap struktur ongkos perusahaan sangat tergantung pada besaran efek nilai tukar dan ekspektasi inflasi yang berbanding terbalik dengan efek dari suku bunga. Selain itu, dengan karakteristik *downward rigidity*, Bank Indonesia perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersifat kontraktif (Atmadja, 2002).

Masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana dampak perubahan tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan *money supply* secara parsial yang menyebabkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika? b) Berapa perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang sebenarnya dengan didasarkan pada ketiga faktor secara bersama-sama ditambah dengan faktor perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya? c) Bagaimana hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya?

METODE

Dari beberapa faktor atau indikator ekonomi yang sering digunakan adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan *money supply*. Dari sekian banyak teori, tingkat inflasi mempunyai atau dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang pada pasar uang. Penelitian Achsani *et. al.* (2010) menunjukkan bahwa di negara Asia, inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Begitu pula dengan tingkat suku bunga dan *money supply* yang juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Namun dengan keterbasan dan kekurangan ketiga faktor secara terpisah atau parsial, maka untuk dapat menentukan nilai tukar mata uang yang lebih baik, maka akan dilakukan dengan melakukan penggunaan faktor tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan *money supply*.

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum secara berkelanjutan, yang merupakan salah satu variabel ekonomi makro penting, karena mempengaruhi kesejahteraan penduduk suatu negara. Inflasi yang tinggi mengimplikasikan penurunan daya beli, sehingga kemampuan masyarakat untuk menikmati barang dan jasa semakin berkurang, dengan kata lain kesejahteraan berkurang. Sehubungan dengan itu, para pembuat kebijakan di negara-negara seluruh dunia berusaha sebisa mungkin mengendalikan inflasi (Taylor, 1995).

Menurut Dornbusch-Fisher (1998), dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain, yaitu semakin tingginya biaya memegang uang kartal, sehingga permintaan uang kartal akan berkurang, perubahan nilai riil dari aktiva yang ditetapkan dalam bentuk nominal, terjadinya redistribusi kekayaaan yang besar antar sektor yang ada seperti dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga meningkatnya kemiskinan, dan meningkatkan nilai riil pembayaran pajak. Selain itu menurut Makiw (1999) inflasi menyebabkan beberapa biaya sosial dalam perekonomian baik inflasi yang diharapkan maupun inflasi yang tidak diharapkan, yaitu: penurunan jumlah uang yang dipegang, sehingga menimbulkan *shoeleather cost* dari inflasi; mendorong perusahaan lebih sering mengubah harga, di mana akan menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, menimbulkan distorsi dalam pajak yang dibebankan, menimbulkan ketidaknyamanan hidup dengan seringnya terjadi perubahan harga, terjadinya redistribusi kekayaan antar individu, dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor (Hamdy, 2009).

Terdapat banyak penjelasan mengenai sebab-sebab inflasi dan terdapat banyak pula alternatif model untuk menjelaskan proses inflasi. Pada umumnya disepakati bahwa dalam jangka panjang inflasi merupakan fenomena moneter (Zyblock, 2005). Akan tetapi, hasil penelitian Tang (2008) menunjukkan bahwa di Malaysia inflasi tidak selalu merupakan fenomena moneter. Namun demikian, dalam *horizon* yang relevan dengan kebijakan moneter, inflasi dapat pula disebabkan oleh variabel-variabel lain. Kejutan-kejutan yang meningkatkan permintaan agregat relatif terhadap penawaran agregat dapat memicu inflasi. Kejutan-kejutan terhadap variabel-variabel nominal domestik, seperti upah atau harga-harga impor dapat meningkatkan biaya produksi dan dengan demikian juga meningkatkan inflasi. Selain itu, pergerakan dalam nilai tukar dapat mempengaruhi inflasi melalui harga impor dan melalui pengaruhnya terhadap ekspektasi dan prilaku penetapan harga (*price-setting behaviour*) oleh para pelaku ekonomi.

Metode analisa yang akan digunakan adalah regresi linier berganda, yang di mana akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\%ER = a + b(\%ER_{i-1}) + c(M_{1h} - M_{1f}) + d(i_h - i_f) + e(E_h - E_f)$$

Dimana:

i_h = tingkat suku bunga di Indonesia
i_f = tingkat suku bunga di Amerika Serikat
E_h = tingkat inflasi di Indonesia
E_f = tingkat inflasi di Amerika Serikat
M_{1h} = *money supply* di Indonesia
M_{1f} = *money supply* di Amerika Serikat
$\%ER$ = Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
$\%ER_{i-1}$ = Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar periode sebelumnya

Lalu dilakukan uji durbin watson untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi, sebab dalam asumsi regresi linier adalah tidak terdapatnya autokorelasi. Lalu uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas dapat memberi signifikansi terhadap variabel terikat secara terpisah serta uji F yang dilakukan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Terakhir adalah uji kausalitas (*Granger's Causality test*) untuk melihat ada tidaknya hubungan kausalitas (Gujarati, 1995).

HASIL

PPP, IRP, dan *Money Supply*

Seperti yang telah disebutkan, pendekatan secara teoritis adalah dengan membandingkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara terpisah berdasarkan faktor tingkat suku bunga yang terkait dengan teori *interest rate parity* (IRP), faktor inflasi yang terkait dengan teori *purchasing power parity* (PPP) dan faktor *money supply*

Dengan Pendekatan berdasarkan tingkat inflasi saja, sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1. Seperti dilihat pada Tabel 1., maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada tingkat inflasi saja. Contoh, seperti pada tahun 2009 untuk *quarter* pertama dengan menggunakan teori PPP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 1,46% namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 6,76%. Atau kalau kita tarik mundur pada tahun 2008 *quarter* ketiga, dengan menggunakan teori PPP perubahan nilai tukar seharusnya adalah –2,77%, namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 23,79%.

Lalu dengan pendekatan berdasarkan tingkat suku bunga saja, ada baiknya melihat terlebih dahulu pada Tabel 2. Seperti dilihat pada Tabel 2., maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada tingkat suku bunga saja. Contoh, seperti pada tahun 2009 untuk *quarter* kedua dengan menggunakan teori IRP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 5,47%, namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 15,57% atau kalau kita tarik mundur pada tahun 2008 *quarter* ketiga, dengan menggunakan teori IRP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 7,2% namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar –14,46%.

Lalu dengan pendekatan berdasarkan faktor *money supply* saja, ada baiknya melihat terlebih dahulu pada Tabel 3. Seperti dilihat pada Tabel 3., maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada perubahan *money supply* saja. Contoh, seperti pada tahun 2009 untuk *quarter* kedua dengan menggunakan pendekatan perubahan *money supply*, perubahan nilai tukar seharusnya adalah 7,92% namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 12,57%. Atau kalau kita tarik mundur pada tahun 2008 *quarter* kedua, dengan menggunakan perubahan *money supply*, perubahan nilai tukar seharusnya adalah 0,17%, namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar –23,15%.

Dari ketiga hasil tersebut, maka terlihat bahwa dengan menggunakan ketiga faktor tersebut secara terpisah tidak dapat menentukan perubahan nilai tukar yang terjadi. Banyak perbedaan-perbedaan yang ada antara nilai tukar yang seharusnya dengan nilai tukar yang sebenarnya.

Dari uji-uji yang telah dilakukan serta perhitungan-perhitungan statistik maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\%ER = -1{,}104 + 0{,}140(\%ER_{i-1}) + 1{,}942(M_{1h} - M_{1f}) + 0{,}008(i_h - i_f) + 0{,}344(E_h - E_f)$$

Tabel 1. Perbandingan PPP dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Tahun	Kuartal	Tingkat Inflasi		Eh – Ef	Nilai Tukar Rupiah / 1 US$	Change(%)
		USA	Indonesia			
2006	Q1	1,07	1,96	0,89	2402,0	0,80
	Q2	0,38	0,62	0,24	2431,9	1,24
	Q3	0,38	2,92	2,54	3269,0	34,42
	Q4	0,47	3,01	2,54	5402,5	65,26
2007	Q1	0,19	19,20	19,01	8550,0	58,26
	Q2	0,56	18,30	17,74	14950,0	74,85
	Q3	0,37	20,10	19,73	10850,0	–27,42
	Q4	0,37	4,78	4,41	8000,0	–26,27
2008	Q1	0,37	4,76	4,39	8725,0	9,06
	Q2	1,01	–0,67	–1,68	6705,0	–23,15
	Q3	0,55	–2,22	–2,77	8300,0	23,79
	Q4	0,64	–0,09	–0,73	7100,0	–14,46
2009	Q1	0,99	2,45	1,46	7580,0	6,76
	Q2	1,08	1,04	–0,04	8760,0	15,57
	Q3	0,80	2,24	1,44	8775,0	0,17
	Q4	0,53	2,84	2,31	9675,0	10,26
2010	Q1	0,96	2,94	1,98	9752,0	0,80
	Q2	1,04	0,03	-1,01	11390,0	16,80

Tabel 2. Perbandingan PPP dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Tahun	Kuartal	Tingkat Suku Bunga		Ih - If	Nilai Tukar Rupiah / 1 US$	Change(%)
		USA	Indonesia			
2006	Q1	5,00	11,07	6,07	2402,0	0,80
	Q2	5,00	10,50	5,50	2431,9	1,24
	Q3	5,00	22,00	17,00	3269,0	34,42
	Q4	5,00	20,00	15,00	5402,5	65,26
2007	Q1	5,00	27,75	22,75	8550,0	58,26
	Q2	5,00	58,00	53,00	14950,0	74,85
	Q3	5,00	68,76	63,76	10850,0	–27,42
	Q4	4,50	38,44	33,94	8000,0	–26,27
2008	Q1	4,73	37,84	33,11	8725,0	9,06
	Q2	4,75	22,05	17,30	6705,0	–23,15
	Q3	5,09	13,02	7,93	8300,0	23,79
	Q4	5,31	12,51	7,20	7100,0	–14,46
2009	Q1	5,68	11,03	5,35	7580,0	6,76
	Q2	6,27	11,74	5,47	8760,0	15,57
	Q3	6,52	13,62	7,10	8775,0	0,17
	Q4	6,47	14,53	8,06	9675,0	10,26
2010	Q1	5,59	15,82	10,23	9752,0	0,80
	Q2	4,33	16,65	12,32	11390,0	16,80

Tabel 3. Perbandingan perubahan pada *money supply* dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Tahun	Kuartal	Nilai Tukar Rupiah / 1 US$	Change(%)	Change M1 (%)		M_{1h} M_{1f}
				USA	Indonesia	
2006	Q1	2402,0	0,80	–2,00	–0,82	1,18
	Q2	2431,9	1,24	–0,32	10,04	10,36
	Q3	3269,0	34,42	–0,45	–5,28	–4,83
	Q4	5402,5	65,26	3,57	18,24	14,67
2007	Q1	8550,0	58,26	–1,98	25,44	27,41
	Q2	14950,0	74,85	–0,07	11,41	11,47
	Q3	10850,0	–27,42	–0,41	–6,32	–5,91
	Q4	8000,0	–26,27	4,71	–1,33	–6,04
2008	Q1	8725,0	9,06	–2,13	4,45	6,59
	Q2	6705,0	–23,15	0,07	0,25	0,17
	Q3	8300,0	23,79	–1,00	11,48	12,48
	Q4	7100,0	–14,46	–5,54	5,51	–0,03
2009	Q1	7580,0	6,76	–3,50	0,02	3,53
	Q2	8760,0	15,57	–0,56	7,36	7,92
	Q3	8775,0	0,17	–1,19	1,19	2,38
	Q4	9675,0	10,26	2,25	20,49	18,24
2010	Q1	9752,0	0,80	–0,44	–9,08	–8,64
	Q2	11390,0	16,80	1,33	7,93	6,60

PEMBAHASAN

Uji Durbin-Watson

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, di mana asumsi yang mendasari suatu pengujian di dalam regresi linier harus memenuhi asumsi dasar bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Dalam uji ini diperoleh nilai D = 2,332. Pada tabel Durbin-Watson terdapat dua nilai, yaitu nilai bawah (dl) dan nilai atas (du). Jika nilai D yang diperoleh berada di atas nilai du, maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan jika nilai D berada dibawah nilai dl, maka terjadi autokorelasi. Dengan menggunakan *level of significance* = 0,01 dan k = 4 (jumlah variabel dikurang 1) didapat nilai dl = 0,61 dan du = 1,60. Karena nilai D yang diperoleh adalah 2,332, maka nilai ini terletak di atas nilai du, sehingga dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi dalam regresi ini.

Uji -t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah koefisien-koefisien masing-masing variabel bebas signifikan atau tidak terhadap variabel tak bebas secara terpisah. Dalam uji t harus ditentukan derajat kebebasan (df) yang di mana diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah regresor (variabel). Pada penelitian ini didapat derajat kebebasan adalah 13 (18 – 5 = 13). Dengan *level of significance* = 0,01, dan $t\alpha/2 = 0{,}005$, maka didapat nilai t-tabel adalah 3,012. Dari hasil perhitungan nilai t untuk semua variabel berada di bawah nilai t-tabel, sehingga dari hal ini dapat diartikan bahwa semua variabel bebas, yaitu inflasi suku bunga dan *money supply* tidak signifikan terhadap variabel tak bebas dalam hal ini perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara parsial atau terpisah. Oleh karena itu, harus dilakukan pengujian dalam hal ini uji-F untuk melihat secara bersama-sama cukup signifikan mempengaruhi nilai tukar.

Uji -F

Adapun tujuan dari Uji-F ini adalah seperti disebutkan sebelumnya adalah untuk mengetahui adanya signifikansi terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, jika ketiga variabel bebas digunakan secara bersama-sama. Dalam uji-F ini, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F yang diperoleh dari tabel, maka hipotesis yang dibuat dapat diterima. Dari perhitungan yang ada, diperoleh nilai F adalah sebesar 2,97145 dan nilai F tabel yang diperoleh dengan sedikit tabulasi adalah 14,31. Seperti dilihat, nilai F hitung ternyata lebih kecil dari nilai F tabel, sehingga dapat diartikan bahwa bahwa ada signifikansi terhadap variable tak bebas dalam hal ini perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang disebabkan oleh ketiga faktor bebas secara bersamaan dalam hal ini tingkat inflasi, suku bunga dan *money supply* ditambah dengan perubahan nilai tukar sebelumnya.

Dari persamaan regresi di atas menujukan bahwa perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya menunjukan memiliki hubungan positif, yaitu sebesar 0,140%, sedangkan selisih perubahan *money supply* antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 1,942%. Tingkat suku bunga antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,008% dan tingkat inflasi antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,344%.

Hasil tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori di antaranya adalah teori *Purchasing Power Parity* (PPP *theory*) yang menjelaskan bahwa jika harga barang di luar negeri turun sedangkan harga barang domestik tetap, maka barang impor relatif menjadi lebih murah, sehingga permintaannya akan naik. Kondisi ini akan mendorong mata uang domestik mengalami depresiasi atau mata uang asing mengalami apresiasi. Teori lainnya menjelaskan bagaimana hubungan tingkat suku bunga dengan perubahan nilai tukar yang dapat dijelaskan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam *expected return* dari investasi keuangan. Semakin tinggi suku bunga di suatu negara maka akan meningkatkan *expected return* investasi keuangan di negara tersebut dan akan menyebabkan masuknya aliran dana dari luar negeri, yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan penguatan terhadap nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Hubungan lainnya adalah antara jumlah uang beredar dengan perubahan nilai tukar dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan teori moneter, semakin banyak jumlah uang beredar di suatu negara akan menyebabkan peningkatan harga-harga (inflasi). Pengingkatan inflasi akan menyebabkan mata uang suatu negara mengalami depresiasi. Perubahan yang disebabkan oleh setiap variabel bebas tersebut harus dilakukan secara simultan atau bersama-sama, tidak dapat dilihat dari satu-persatu variabel bebas tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk faktor nilai tukar pada periode sebelumnya, perubahan *money supply*, dan tingkat suku bunga didapat nilai uji-F berturut-turut adalah 6,143 untuk perubahan nilai tukar periode sebelumnya 4,05909 untuk perubahan *money supply*, dan 11,90719 untuk tingkat suku bunga, sehingga dari nilai-nilai tersebut yang di mana berada di bawah nilai F-tabel yang sebesar 14,31, maka dapat diartikan untuk ketiga faktor ini terhadap perubahan nilai tukar terjadi *bilateral causality*, sedangkan untuk faktor inflasi didapat nilai F sebesar 22,38732, sehingga untuk faktor ini tidak terjadi hubungan kausalitas pada arah sebaliknya.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa tingkat inflasi, suku bunga dan jumlah uang beredar mempunyai hubungan positif dengan perubahan nilai tukar, namun dengan pengaruh yang sebagian besar tidak signifikan. Di lain pihak, faktor-faktor di luar variabel bebas ternyata lebih banyak mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika (Madura, 2009). Faktor-faktor lain dapat saja merupakan faktor ekonomi yang tidak diakomodasi dalam penelitian ini atau dapat juga merupakan faktor-faktor non ekonomi, seperti politik, hankam, konsistensi dalam penegakan hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Karena pergerakan nilai tukar mata uang rupiah di Indonesia ternyata bukan merupakan dominasi faktor ekonomi saja, maka tanggung jawab pengendalian nilai tukar bukan hanya berada pada pemegang otoritas moneter ataupun instansi yang bergerak dalam sektor ekonomi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari instansi lainnya (yang beraktivitas di luar bidang ekonomi) dalam menciptakan kondisi yang dapat menunjang proses

pencapaian nilai tukar seperti yang telah ditargetkan. Untuk itu, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah antar lembaga negara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang komprohensif, baik di bidang ekonomi maupun di bidang non ekonomi, hingga terciptanya sinergi.

Lebih lanjut, kebijakan perubahan suku bunga SBI yang kerapkali digunakan oleh bank sentral dengan maksud mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ternyata tidak mampu secara signifikan mempengaruhi perubahan nilai tukar rupiah. Hal ini secara ekonomi antara lain dapat disebabkan, karena adanya kebijakan bank sentral Amerika yang kadangkala juga menggunakan instrumen yang sama (dengan *fedfund*-nya) dalam mempertahankan nilai tukar Dollar Amerika terhadap mata uang asing lainnya, dan karena tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia. Selain itu, juga karena tingkat bunga di pasar uang domestik yang tinggi, yang tercipta karena pengaruh dari tingginya suku bunga SBI, ternyata tidak mampu secara signifikan menarik aliran dana masuk dari luar negeri.

KESIMPULAN

Dari pengujian statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil di mana ketika ketiga faktor yang digunakan secara bersama ditambah faktor perubahan nilai tukar pada periode atau kurun waktu sebelumnya, akan memberikan pengaruh pada perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar periode sebelumnya, perubahan selisih *money supply* Indonesia dan Amerika, selisih terhadap suku bunga antara Indonesia dan Amerika, selisih inflasi Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan dalam nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Dalam penelitian ini, digunakan faktor-faktor yang sangat umum digunakan dan mudah dalam pemahaman, sehingga masa yang akan datang berbeda dengan yang diperkirakan dari persamaan regresi yang diperoleh. Ini disebabkan dalam ekonomi terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain kompleksitas dari masalah ekonomi itu sendiri. Selain itu juga keterbatasan data yang diperoleh, dapat juga membuat penelitian ini, dimasa yang akan datang dapat lebih disempurnakan dengan menambah jumlah data. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal untuk melakukan penelitian-penelitian lain dengan objek-objek penelitian yang lain seperti dengan perubahan nilai tukar Rupiah dan Yen Jepang, atau dengan negara-negara lain yang di mana merupakan mitra bisnis dan ekonomi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achsani, N. A., Fauzi, A. J. 2010. The Relationship between Inflation and Real Exchange Rate: Comparative Study between ASEAN+3, The EU and North America. *European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences*, 18: 69-76.

Atmadja, Adwin Surja. 2002. Analisa Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Setelah diterapkannya Kebijakan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 4(1).

Bortov, E., dan Bodnar, G. M. 1994. Firm Valuation, Earning Expectation and the Exchange Rate Exposure Effect. *Journal of Finance*.

Bullard, J. and Keating, J. W. 1995. The Long Run Relationship between Inflation and Output in Postwar Economics. *Journal of Monetary Economics*, 36:477-496.

Erawati, Neny dan Richrd Llewelyn. 2000. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4.

Gali, Jordi and Gertler, Mark. 1999. Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. *Journal of Monetary Economics*, 44: 195-222.

Goeltom, Miranda S. 1998. Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya. *Buletin Ekonomi Moneter Dana Perbankan*, 1(2) Bank Indonesia, Jakarta.

Gujarati, Damodar N. 1995. *Basic Econometrics. Third Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.

Haryanto, Riyatno. 2007. Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Kurs terhadap risiko sistematik saham perusahaan di BEJ. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. 5(1): 24-40.

Hady, Hamdy. 2009. *Ekonomi Internasional* (Buku Kedua, Edisi Revisi). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ma, C. K., dan Kao, W. 1990. On Exchange Rate Changes and The Distribution of Industry Value. *Journal of International Business Studies*.

Madura, Jeff. 2009. *International Financial Management* (6th edition). USA: South-Western College Publishing.

Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu. 2003. Peranan Profitabiliatas, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5 (2): 123-131.

Quah, Danny and Vahey, Shaun. 1995. Measuring Core Inflation. *The Economic Journal*, 105(432): 1130-1144.

Schiller, Bradley R. 1996. *Essentials Of Economics* (2nd edition). New York: The McGraw-Hill Companies.

Tang, Chor Foon. 2008. Is Inflation always a Monetary Phenomenon in Malaysia?. *Journal of Social Economics*, 29(5): 411-425.

Taylor, Mark, P. 1995. The Economics of Exchange Rates. *Journal of Economic Literature*, XXXVIII (March): 13-47.

Wahana Komputer Semarang. 2002. *10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS 10.01*. Yogyakarta: Andi dan Wahana Komputer.

Zyblock, Myles. 2005. Inflation is always and Everywhere a Monetary Phenomenon. *John Mauldin's "Outside the Box"*, 1(21).

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 148–161
ISSN 1411-514X

Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia

Tete Saepudin
Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung
Jl. Tamansari No. 6–8 Bandung, 40116
E-Mail: tetesaepudin@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objective of the present study is to analyze the influence of the investment growth (capital), the average growth of the skilled-labor and unskilled-labor, the average educational attainment, as well as the government expenditure growth for education on the economic growth of the provinces in IndonesThe present study is descriptive as well as verificative by using pool least squares method. The data used is secondary such as panel data that consist of combination between time-series and cross-section from 26 provinces in Indonesia during period 1994–2008. The research findings indicate that (1) capital growth (investment-investment) is positively and significantly influence on the economic growth, (2) the growth of the skilled-labor is negatively and not significantly influence on the economic growth. (3) the growth of the unskilled-labor is positively and significantly influence on the economic growth (4) educational attainment average is positively and significantly influence on the economical growth and (5) the growth of the government expenditure for education is positively and significantly influence on the economic growth of the provinces in Indonesia.

Keywords: investment, skilled-labor, unskilled-labor, educational attainment average, government expenditure for education.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan investasi (modal), pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian, pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan metode *pool least squares*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa panel data yang merupakan gabungan antara runtut waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*) dari 26 provinsi di Indonesia pada periode 1994–2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan modal (investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (5) pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: investasi, tenaga kerja ahli, tenaga kerja tidak ahli, rata-rata lama sekolah, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

PENDAHULUAN

Suatu negara atau wilayah dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya apabila negara tersebut memiliki faktor-faktor produksi relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas faktor faktor produksi yang dimiliki, baik faktor produksi alam (*resource endowment*) maupun faktor produksi sumber daya manusia (*human resource*).

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antara negara industri dengan negara berkembang bukanlah disebabkan ketiadaan upaya negara berkembang dalam akses teknologi dibanding dengan negara maju, tetapi semata-mata disebabkan oleh kualitas yang rendah dari *human capital* di negara-negara berkembang tersebut. Mankiw *et. al.* (1992) menemukan bahwa 80% perbedaan pertumbuhan perekonomian antar negara adalah disebabkan oleh faktor modal fisik dan modal manusia, sedangkan 20% lagi sisanya karena faktor-faktor lain.

Pembentuk modal manusia (*human capital*) telah menarik perhatian banyak ahli ekonomi yang kemudian memunculkan berbagai model pertumbuhan ekonomi yang memasukkan pendidikan sebagai pengganti pengetahuan yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, meskipun hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung, tetapi melalui proses, di mana pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi, kepada pekerja tersebut. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dari kelompok kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan.

Semakin terdidik tenaga kerja, akan semakin tinggi produksi yang tercipta, dan sekaligus akan semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Penelitian Acemoglu (1998) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun 1970 seorang sarjana (S1) menerima penghasilan rata-rata 55 persen lebih tinggi dari lulusan SMA. Sementara tahun 1995 seorang sarjana menerima penghasilan 62 persen lebih tinggi dari SMA. Dengan demikian peranan pendidikan (baik formal maupun non formal) adalah penting untuk meningkatkan penghasilan. Penemuan teknologi baru (*invention)* dan pengembangan dari teknologi baru (*inovation)* tersebut, akan tercipta/lahir dari tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Kondisi umum sektor pendidikan di Indonesia ditandai oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari jumlah keseluruhan tenaga kerja, sekitar 58% dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) atau kurang, dan hanya 8% saja yang pendidikan tinggi. Disamping itu juga masih rendahnya tingkat angka partisipasi rata-rata pendidikan murni (APM). Di mana pada tahun 2008, tingkat partisipasi rata-rata pendidikan murni 93,99% untuk SD/MI, 66,98% untuk SMP/MTS, 44,75% untuk SMA/MA, dan 10,07 untuk PT (BPS, Indikator Pendidikan, 1994–2008).

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2000 masih 4,99 tahun, sedangkan negara Malaysia 6,80 tahun, Thailand 6,50 tahun, Singapura 7,05 tahun, dan Filipina 8,21 tahun (*World Bank*, 2008). Kalau dilihat dari penduduk usia 15 tahun ke atas, rata rata lamanya sekolah (RLS) penduduk Indonesia tidak serendah itu, di mana pada tahun 1999 saja sudah 6,7 tahun, pada tahun 2002 adalah 7,1 tahun, pada tahun 2005 adalah 7,3 tahun, dan pada tahun 2008 adalah sudah 7,5 tahun (BPS, Indikator Kesra Tahun 2007 dan 2008).

Berdasarkan distribusi wilayah per provinsi rata-rata lama sekolah (RLS) dari tahun 1994 sampai tahun 2008, dengan mengambil beberapa tahun (tahun 1994, 1999, 2004, dan tahun 2008), di mana pada tahun 1994, provinsi yang paling tinggi tingkat pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan angka 9,3 tahun, dan pencapaian terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan nilai rata-rata sebesar 4,8 tahun. Pada tahun 1999 pencapaian tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta

dengan rata-rata 9,7 tahun, dan pencapaian terendah adalah Provinsi NTB dengan rata-rata 5,2 tahun. Pada tahun 2004 sama dengan tahun 1999 pencapaian tertinggi masih Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 10,1 tahun, dan pencapaian terendah adalah Provinsi NTB dengan rata-rata 5,8 tahun. Untuk tahun 2008 pencapaian tertinggi masih tetap juga Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 10,2 tahun, dan pencapaian terendah adalah Provinsi Papua dengan rata-rata 6,3 tahun (BPS, Indikator Kesra, Beberapa Terbitan, Tahun 1996–2008)

Dewasa ini negara-negara berkembang makin meningkatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dibanding pada tahun 1980. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik maka akan memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan. Peningkatan persentase pengeluaran publik untuk bidang pendidikan juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2001, Indonesia telah mengalami peningkatan persentase pengeluaran publik untuk bidang pendidikan.

Persentase pengeluaran publik untuk pendidikan dari empat negara ASEAN, Indonesia yang paling kecil, yaitu hanya 9%, sedangkan yang terbesar adalah Negara Malaysia, begitu juga kalau dilihat dari tingkat pendapatan Indonesia yang paling kecil pendapatan perkapitanya, hanya 906 US$, sedangkan Malaysia sudah 4.290 US$. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang paling besar, sedangkan Malaysia yang paling kecil, dilihat dari persentase penduduk usia 0–14 tahun 4 negara ASEAN itu tidak terlalu jauh berbeda, yaitu kisaran 2,8 Filipina dan 4,1 Thailand, ini kalau dihubungkan dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan menggunakan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan penduduk usia kerja, dan pendapatan per kapita, maka Malaysia merupakan negara yang kualitasnya paling tinggi, dan Indonesia sebaliknya paling rendah.

Teori pertumbuhan Solow (1956) mengkaji tentang mengapa negara-negara yang memiliki faktor produksi yang tersedia melimpah ternyata tidak ada korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Solow mencoba memasukkan faktor pertumbuhan teknologi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, walaupun baru diidentifikasikan sebagai variabel yang eksogen.

Model teori pertumbuhan baru (*the new growth theory*), atau lebih dikenal dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*) ada dua tipe teori, yaitu (1) model modal manusia (*Human Capital Model*), dan (2) model penelitian dan pengembangan (*Research and Development Model*). *Human Capital Model* menitikberatkan pada akumulasi modal dalam berbagai bentuknya seperti modal fisik, modal manusia, modal kesehatan dan lain sebagainya, yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. *Human Capital Model* ini diperkenalkan oleh Romer (1983, 1986, 1996), Lucas (1988), dan Robelo (1991). *Research and Development Model* dipelopori oleh Romer (1990), Grossmen dan Helpman (1991), dan Aghion dan Howitt (1992) lebih menekankan pada kemajuan teknologi yang akan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan menghasikan pertumbuhan ekonomi.

Bila dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka diantara kedua tipe model pertumbuhan endogen tersebut, pendekatan yang lebih tepat digunakan adalah *Human Capital Model*, karena pendidikan merupakan unsur utama dari modal manusia, yakni salah satu bentuk modal selain modal fisik dan modal kesehatan, sehingga sangat beralasan apabila digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skills*) dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskills*), serta rata-rata lama sekolah (RLS) serta pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi selain tingkat pendidikan adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk pendidikan. Penelitian Barro dan Sala-i-Martin (1995) menunjukkan adanya korelasi yang positif antara pertumbuhan GDP dengan *initial GDP per capita, educational attainment, life expectancy, public spending in education, changes in the terms of the investment ratio and the rule of law*. Rostow dan Musgrave (2003) mengembangkan teori yang meng hubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti

pendidikan, kesehatan, prasara transportasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut (1) bagaimana pengaruh pertumbuhan investasi (modal), pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia (2) bagaimana pengaruh pertumbuhan investasi (modal), pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia (3) bagaimana pengaruh pertumbuhan investasi (modal), pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

METODE

Model Penelitian

Model yang dikembangkan diturunkan dari teori, konsep dan penelitian empiris yang didasarkan kepada hasil peneltian Baro dan Sala-i-Martin (1990) dan Moretti (1999), dengan mengacu pada fungsi produksi dari Cobb-Douglas:

$$Y = A \cdot L^{\beta} K^{\delta} HC^{\gamma} G^{\theta} \quad \text{.....} \quad (1)$$

di mana:

Y	= produk domestik bruto
A	= tingkat teknologi
L	= tenaga kerja
K	= modal swasta
HC	= modal manusia
G	= pengeluaran pemerintah
$\beta, \delta, \gamma, \theta$	= parameter yang akan diuji

Modal manusia (HC) di samping dapat diturunkan dari tingkat pendidikan, juga dapat diturunkan dari tenaga kerja (L) yang memiliki keahlian. Keahlian tenaga kerja dalam hal ini didapat dari pendidikan tenaga kerja, dan dari pelatihan. Moretti (1999) membagi tenaga kerja itu menjadi dua kelompok, yaitu: (1) tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*), merupakan tenaga kerja lulusan sarjana muda/diploma III dan lulusan sarjana, sedangkan (2) tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) merupakan tenaga kerja yang tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, sampai tamat sekolah menengah tingkat atas (SMTA), diploma I dan diploma II. Berdasarkan pengelompokkan tenaga kerja ini, maka persamaan (1) berubah menjadi:

$$Y_{jct} = A_{jct}^{\gamma} H_{jct}^{\alpha H} L_{jct}^{\alpha L} K_{jct}^{\beta} \quad \text{.....} \quad (2)$$

Y adalah output, A merupakan proporsi jumlah pekerja minimal lulusan sarjana muda, H adalah tenaga kerja dengan tingkat modal manusia tinggi (*skill*), L merupakan tenaga kerja dengan tingkat modal manusia rendah (*unskill*), K input selain tenaga kerja, *jct* menunjukkan industri, kota, dan tahun γ, αH, αL, β adalah parameter yang akan diuji.

Jika digabungkan dan dimodifikasi persamaan (1) dan persamaan (2) dan untuk variabel modal manusia (HC) dari pesamaan (1) diproksi dengan rata-rata lama sekolah (E), maka formulasi modelnya menjadi:

$$Y = A^{\alpha} L^{\beta L} H^{\beta H} K^{\delta} E^{\gamma} G^{\theta} \quad \text{.....} \quad (3)$$

di mana:

Y	= output
A	= tingkat teknologi
L	= tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*s)
H	= tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*s)
K	= modal
E	= rata-rata lama sekolah (RLS)
G	= belanja pemerintah untuk pendidikan
$\alpha, \beta L, \beta H, \delta, \gamma, \theta$	= merupakan parameter yang akan diuji

Persamaan (3) tersebut, jika dijadikan dalam fungsi produksi adalah sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = f(PMTB_{it}, skil_{it}, unskill_{it}, RLS_{it}, GEXP_{it}) \quad \text{...} \quad (4)$$

Periode waktu penelitian tahun 1994–2008, pada tahun 1997 di Indonesia terjadi krisis ekonomi, agar tidak mengganggu validitas data, penulis akan memasukkan variabel *dummy* (dcrisis), sehingga persamaan fungsionalnya menjadi:

$$PDRB_{it} = f(PMTB_{it}, skill_{it}, unskill_{it}, RLS_{it}, GEXP_{it}, dummy_{it}) \quad (5)$$

dummy menunjukkan krisis ekonomi tahun 1997.

Dari fungsi persamaan (5) dijadikan dalam persamaan regresi linier berganda, dalam bentuk persamaan logaritma natural, dengan memasukkan *error term* (ε) maka model akhir selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$lnPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PMTB_{it} + \beta_2 lnskill_{it} + \beta_3 lnunskill_{it} + \beta_4 RLS_{it} + \beta_5 lnGEXP_{it} + \beta_6 dummy_{it} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

di mana:

PDRB = pertumbuhan PDRB provinsi-provinsi di Indonesia (%)

PMTB = pertumbuhan modal (investasi) provinsi-provinsi di Indonesia (%)

skill = pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian provinsi-provinsi di Indonesia (%)

unskill = pertumbuhan tenaga kerja tidak memiliki keahlian provinsi-provinsi di Indonesia (%)

RLS = rata-rata lama sekolah (RLS) provinsi-provinsi di Indonesia (%)

GEXP = pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan provinsi-provinsi di Indonesia (%)

dummy = variabel dummy krisis yang menunjukkan setelah krisis ekonomi (1998, ..., 2008 = 1, dan lainnya = 0)

ln = logaritma natural

βn = parameter (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

i = provinsi i (i = 1, 2, 3, ..., 26)

t = tahun ke-t (t = 1994–2008)

ε = *error term*

Operasionalisasi Variabel

Batasan operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian mengenai analisis pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja yag memiliki keahlian (*skill*), dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian *unskill*), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia ditetapkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep	Ukuran	Skala
1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dengan harga konstan 2000 di provinsi yang bersangkutan, periode 1994–2008.	Persen	Rasio
2.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	Pertumbuhan jumlah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang dilakukan di daerah yang bersangkutan, periode 1994–2008.	Persen	Rasio
3.	Pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*)	Pertumbuhan jumlah penduduk yang berusia 15 ke atas (penduduk usia kerja) yang bekerja dari lulusan sarjana muda/Diploma III dan tamat sarjana, periode 1994–2008.	Persen	Rasio
4.	Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*)	Pertumbuhan jumlah penduduk yang berusia 15 ke atas (penduduk usia kerja) yang bekerja dari yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMTA, tamat Diploma I, dan II periode 1994–2008.	Persen	Rasio
5.	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi periode 1994–2008.	Persen	Rasio
6.	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan (GEXP)	Pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dari APBD untuk pos pengeluaran pendidikan, periode 1994-2008.	Persen	Rasio

HASIL

Pertumbuhan investasi (PMTB), pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) dan yang tidak memiliki keahlian (*unskill*), rata-rata lama sekolah (RLS), dan *dummy* krisis (*dummy*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Perbandingan nilai koefisien estimasi model pertumbuhan masing-masing provinsi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.

Uji Variabel Bebas Secara Parsial (Uji-t)

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel bebas dengan menggunakan uji-t. Dengan mengambil df (derajat kepekaan) n – k – 1 = 390 – 31 –1 = 368, dengan kriteria uji (α = 5%), maka diperoleh t-tabel = $t_{0,05}$ = 1,973. Hasil perhitungan pada Tabel 1. memperlihatkan untuk variabel investasi pada model satu, dua, dan tiga, diperoleh t-hitung berturut-turut sebesar 7.163303, 5.546249, dan 2.935865. Oleh karena $t_{hit} > t_{tab}$, maka H_0 ditolak, dan H_1 di terima artinya variabel investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja yang memiliki keahlian memiliki nilai t_{hit} untuk ketiga model berturut-turut sebesar –1.736911, –0.609750, –0.795400. Oleh karena $t_{hit} < t_{tab}$, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak artinya variabel tenaga kerja yang memiliki keahlian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian memiliki nilai t_{hit} pada model satu, dua, dan tiga, berturut-turut sebesar 5.015023, 4.137710, 1.719685. Oleh karena $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima artinya variabel tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel rata-rata lama sekolah memiliki nilai t_{hit} untuk model satu, dua, tiga berturut-turut sebesar 7.164997, 3.188400. Oleh karena $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima artinya variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t_{hit} untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 11.10137 dan 8.186329. Oleh karena $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima artinya semua variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t_{hit} untuk variabel *dummy* krisis sebesar 28.29176, 6.997858, dan 18.31922). Oleh karena $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak artinya semua variabel *dummy* krisis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Kecocokan Model (Koefisien Determinasi/R^2)

Uji R^2 merupakan salah satu uji untuk melihat seberapa besar variasi variabel bebas secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi variabel tidak bebas. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa *adjusted R-square* untuk ketiga persamaan adalah sebesar 0.995077 untuk persamaan pertama, 0.971118 untuk persamaan kedua, dan 0.97073 untuk persamaan ketiga. Dengan demikian 99%, 97%, dan 97% variasi variabel bebas pada model satu, dua dan tiga dapat menjelaskan masing-masing persamaan variasi variabel tidak bebasnya.

Uji Variabel Bebas Secara Bersama-sama (Uji-F)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama (serempak) digunakan uji-F, yaitu dengan cara membandingkan antara F-tabel dengan F-hitung. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H_1 diterima dan H_0 di tolak, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama (serempak) berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama (serempak) tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dengan (df1) sebesar k – 1, 30 – 1 = 29, sedangkan utuk (df2) adalah n – k, 390 – 30 = 360, dan kriteria uji (α = 5%), maka diperoleh F-tabel sebesar 1,46. Nilai F-hitung untuk masing masing model satu, dua dan tiga berturut-turut sebesar 2537.218, 402.3691, dan 431.0635. Dengan demikian dari ketiga model tersebut F-hitungnya lebih besar dari F-tabel, artinya H_1 diterima, dan H_0 ditolak, berarti pada semua persamaan atau model, semua variabel bebas secara bersama-sama (serempak) berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien Estimasi (1)	Koefisien Estimasi(II)	Koefisien Estimasi (III)
C	9.361946	8.744150	11.87177
	(11.49106)	(7.440936)	(8.197414)
PMTB	0.099589	0.142239	0.093825
	(7.163303)	(5.546249)	(2.935865)
Skills	-0.037951	-0.035702	-0.032364
	(-1.736911)	(-0.609750)	(-0.795400)
Unskills	5.015023	0.285135	0.157364
	(5.015023)	(4.137710)	(1.719685)
RLS	0.154182	0.265205	-
	(7.164997)	(3.188400)	
GEXP	0.047216	-	0.069069
	(11.10137)		(8.186329)
Dummy	0.047216	0.505651	0.650742
	(28.29176)	(6.997858)	(18.31922)
Uji-F	2537.218	402.3691	431.0635
R-Square	0.995469	0.971118	0.972989
Adj. R-Square	0.995077	0.968705	0.97073
Durbin-Watson stat	1.713375	1.636512	1.772342

Keterangan: Angka dalam kurung adalah t-hitung

Sumber: Hasil Perhitungan

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Investasi

Investasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka yang panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara/wilayah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada periode tahun 1994–2008, variabel pertumbuhan investasi dari ketiga persamaan (model) adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia (Tabel 1.). Dari ketiga model tersebut ternyata pada model kedua nilai koefisien variabel pertumbuhan investasi paling besar, jika dibandingkan dengan model satu dan model tiga.

Pada model dua variabel yang dikeluarkan adalah variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan pada model ketiga yang dikeluarkan adalah variabel rata-rata lama sekolah (RLS). Jika dibandingkan model dua dan tiga, yaitu peran pertumbuhan investasi lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, jika dihilangkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, daripada rata-rata lama sekolah (RLS).

Nilai parameter pertumbuhan investasi pada model pertama memberi arti jika pertumbuhan investasi provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 9,95%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model kedua memberi arti jika pertumbuhan investasi provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provisi di Indonesia akan meningkat sebesar 14,22%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model ketiga memberi arti jika pertumbuhan investasi provinsi-provinsi diIndonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 14,22%, *ceteris paribus*. Dengan demikian selama lebih kurang 15 tahun pembangunan, pertumbuhan investasi memperlihatkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam satuan waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat secara nyata, seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya, belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuannya yang dimilikinya. Anwar (dalam Wiyono, 1996) mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh: a) perkembangan barang modal per pekerja, b) perbaikan tingkat keterampilan, pendidikan, dan kesehatan pekerja, c) meningkatkan skala usaha, d) perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, e) perubahan komposisi output dari tiap sektor atau sub sektor, dan f) perubahan teknik produksi.

Dalam analisis pembagian tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan yang dibagi menjadi dua kelompok: a) tenaga kerja yang memiliki keahlian, adalah tenaga kerja lulusan sarjana muda/ diploma III dan sarjana, disebut juga *labor skills*, dan b) tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian, adalah tenaga kerja mulai dari lulusan diploma II ke bawah sampai tenaga kerja yang tidak sekolah, disebut *labor unskill*.

Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian *(skill)*

Modal manusia terbentuk dari ilmu pengetahuan, dikatakan oleh Romer, J. M. Clark (2000) bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu faktor produksi yang tidak pernah berkurang (*diminishing*). Ilmu pengetahuan biasanya didapat dari hasil pengalaman, pendidikan, ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil pengalaman akan menghasilkan tenaga kerja yang terlatih/terampil, sedangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil pendidikan dan pelatihan (*on the job training)* akan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih yang memiliki keahlian.

Tapscott (1997) mengemukakan bahwa orang akan lebih banyak bekerja dengan mengunakan otaknya daripada menggunakan tangan. Di Amerika Serikat saat ini hampir 60 persen pekerjaannya berkecimpung dalam pekerjaan yang menggunakan *knowledge* (ilmu pengetahuan).

Hasil estimasi darinilai parameter pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skills*) pada periode tahun 1994–2008 pada ketiga model mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dari ketiga model tenaga kerja yang memiliki keahlian nilai parameter yang paling besar adalah pada model yang pertama dengan variabel bebas yang lainnya adalah pertumbuhan investasi, pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*), rata-rata lama sekolah (RLS), pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan *dummy* krisis.

Nilai parameter model pertama memberi arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) pada provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provisi di Indonesia akan turun sebesar –0.037951%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model kedua memberi

arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) pada provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan turun sebesar –0.035702%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model yang ketiga nilainya memberi arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan turun sebesar –0.032364%, *ceteris paribus*.

Meskipun dari ketiga model pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*), mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, tetapi dari ketiga model tersebut tidak ada yang signifikan. Temuan ini sesuai dengan jumlah pekerja yang memiliki keahlian/*skill* (pekerja lulusan sarjana muda/diploma tiga dan sarjana) dari jumlah pekerja hanya 2,94 persen pada tahun 1996 dan 4,39 persen pada tahun 2005 (BPS, Supas Tahun 2005) dari rata-rata tenaga kerja yang bekerja.

Hal tersebut juga didukung dengan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang berusia dari 15 tahun ke atas dari tahun 1994 sampai tahun 2008 masih relatif rendah, di mana rata-rata lama sekolah yang dicapai sampai tahun 2008 itu, masih dikisaran 7,5 tahun (BPS, Indikator Kesra, dan IPM, 2008). Pada tahun 1994 rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 6,09 tahun, dengan provinsi yang terendah adalah NTB yaitu 4,5 tahun dan yang tertinggi DKI Jakarta 9,3 tahun. Untuk tahun 1999 rata-rata lama sekolah (RLS) 6,7 tahun, provinsi yang terendah masih NTB yaitu 5,2 tahun, dan yang tertinggi sama masih Provinsi DKI Jakarta, yaitu 9,7 tahun. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah (RLS) 7,2 tahun, provinsi yang terendah tetap masih NTB, dan yang tertinggi masih DKI Jakarta dengan 10,1 tahun, dan untuk tahun 2008 adalah 7,5 tahun, provinsi yang terendah sekarang adalah Papua yaitu 6,3 tahun, sedangkan yang tertinggi masih tetap, yaitu DKI Jakarta 10,2 tahun.

Jika dilihat dari lamanya rata-rata sekolah sebesar 7,5 tenaga kerja masih tergolong tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*), karena hanya mencapai sekolah SMP kelas dua. Maka dalam hal ini hubungan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) hubungannya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

Tenaga kerja yang Tidak Memiliki Keahlian (*unskill*)

Tenaga kerja dari lulusan pendidikan menengah merupakan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang handal dan paling banyak dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi, manajer tingkat menengah pada perusahaan, merupakan tulang punggung administrasi negara, hal ini sejalan dengan pendapat A. Lewis (1962) bahwa pendidikan menengah sebagai "perwira dan perwira cadangan" dari suatu sistem ekonomi dan sosial.

Collins (1979) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Tetapi jika sumber daya manusia yang berpendidikan rendah mendapat pelatihan, diharapkan akan memiliki produktivitas relatif sama dengan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan formal.

Hasil estimasi dari nilai parameter pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) pada periode tahun 1994–2008 pada ketiga model mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dari ketiga model tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*), nilai parameter yang paling besar adalah pada model yang kedua. Model yang kedua adalah model pertumbuhan ekonomi tanpa variabel bebas pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Hal ini berbeda dengan model pertumbuhan ekonomi yang lainnya, yaitu dengan pertumbuhan investasi, yang paling besar nilai parameternya adalah pada model yang ketiga yaitu pada model yang tidak memasukkan variabel rata-rata lama sekolah (RLS).

Nilai parameter pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) pada model pertama memberi arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.284651%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model kedua memberi arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka

pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.285135%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model ketiga memberi arti jika pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.157364%, *ceteris paribus*. Dengan demikian selama lebih kurang 15 tahun pembangunan, pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) memperlihatkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Rata-rata Lama Sekolah

Ukuran rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur *human capital*, (Barro dan Lee, 1993; Canning, 1999). Rata-rata lama sekolah (RLS) dari tahun 1994 sampai tahun 2008 menunjukkan angka yang bertambah, yaitu pada tahun 1994 adalah 6,4 tahun dan pada tahun 2008 adalah 7,5 tahun. Besarnya parameter rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 0.154182 pada model yang pertama, dan 0.265205 pada model yang kedua. Jika dibandingkan nilai parameter model pertama dengan model kedua, pengaruh rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia lebih besar pada model yang kedua yang tidak ada variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

Hasil estimasi dari parameter rata-rata lama sekolah pada model pertama sebesar 0.154182 ini memberi arti jika rata-rata lama sekolah provinsi-provinsi di Indonesia meningkat dalam 1 tahun, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.154182%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model kedua memberi arti jika rata-rata lama sekolah provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.265205%, *ceteris paribus*. Dengan demikian selama lebih kurang 15 tahun pembangunan, rata-rata lama sekolah memperlihatkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia, meskipun dalam pertumbuhan tiap tahunnya relatif kecil, namun meningkat terus.

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mulai tahun 2003, mengalami perubahan format (UU No 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara), pada APBN sebelum tahun 2003 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan itu merupakan bagian dari pos pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga. Pada APBN mulai tahun 2003, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, adalah dari pengeluaran pembangunan pos biaya barang dan modal.

Pengeluaran biaya pendidikan mulai pada tahun 2003 ditetapkan sebesar 20% dari APBN/APBD, yang ditetapkan oleh MPR, dan Lembaga Konstitusi Nomor 13/PUU-V11/2008, yang merupakan pengenjawantahan dari pasal 31 amandemen UUD 1945. Namun alokasi 20% itu sampai sekarang pelaksanaannya masih banyak diragukan, termasuk Lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian untuk melihat berapa besar alokasi besarnya biaya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mengacu kepada hasil penelitian UNESCO, *Institute for Statistics* (UIS), *Word Bank*, UNAIDS, ILO, *Household Surveys*, IMF, *Country, Data are for the most recent year available in* 2000–2005 bahwa besarnya biaya pendidikan adalah 3,5% dari GDP, atau 17,5% dari biaya pengeluaran pemerintah. Jadi yang dijadikan acuan untuk pengambilan biaya pendidikan dari tahun 2003–2008 adalah mengacu kepada 3,5% dari GDP/PDRB.

Selama periode penelitian 1994–2008, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat terus. Hasil estimasi dari parameter pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dari model pertama dengan model ketiga, bahwa pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan adalah signifikan

dan berpengaruh positif. Pada model pertama besarnya parameter pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memberi arti jika pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provisi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.047216%, *ceteris paribus*. Nilai parameter pada model ketiga memberi arti jika pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan provinsi-provinsi di Indonesia meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi provinsi-provisi di Indonesia akan meningkat sebesar 0.069069%, *ceteris paribus*. Dengan demikian selama lebih kurang 15 tahun pembangunan, pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memperlihatkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Dummy Krisis Ekonomi Tahun 1997

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada periode 1994–2008 variabel *dummy* krisis tahun 1997 dari ketiga model berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Nilai *dummy* krisis tahun 1997 dari ketiga model tersebut yang paling besar nilainya adalah pada model yang ketiga (tanpa variabel rata-rata lama sekolah). Jika dibandingkan dengan model kedua (tanpa variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan) variabel *dummy* krisis tahun 1997 yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia adalah apabila dikeluarkannya variabel rata-rata lama sekolah.

Nilai parameter *dummy* krisis tahun 1997 untuk model pertama memberi arti bahwa setiap terjadi perubahan krisis sebesar 1% akan berdampak pada perubahan pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia sebesar 0.550338%, *ceteris paribus*. Parameter pada model kedua mempunyai arti jika terjadi perubahan krisis sebesar 1% akan berdampak pada perubahan pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia sebesar 0.505651% *ceteris paribus*. Pada model ketiga nilai parameternya mempunyai arti jika terjadi perubahan krisis sebesar 1% akan berdampak pada perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia sebesar 0.650742% *ceteris paribus*. Dengan demikian krisis ekonomi yang terjadi pada bulan Juli 1997 di Indonesia berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Hasil ini cukup beralasan mengingat bahwa dalam penelitian ini perhatian ditunjukkan pada pertumbuhan bukan level, sehingga pada saat terjadi krisis perekonomian sangat terpuruk yang ditandai dengan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang negatif, tetapi setelah puncak krisis yang terjadi pada akhir tahun 1997, maka mulailah terjadi *recovery* yang meskipun sangat lambat, telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan investasi (modal) pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dilihat dari nilai parameter pertumbuhan investasi (modal) yang terbesar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah model kedua dengan tidak memasukkan variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Dalam keadaan seperti ini, investasi yang dibutuhkan lebih banyak dalam bentuk investasi fisik, yang langsung dirasakan oleh penerima program investasi keadaan ini.

Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dilihat dari nilai parameter pertumbuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*) yang terbesar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah model kedua dengan tidak memasukkan variabel rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, meskipun belum masuk ke dalam rata-rata lama sekolah yang masuk ke dalam kelompok tenaga kerja yang memiliki keahlian.

Pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Meskipun hubungan tenaga kerja yang memiliki keahlian bersifat negatif/ terbalik hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia, tapi tidak signifikan, artinya tetap bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian adalah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Jika dimasukkan ke dalam rata-rata lama sekolah untuk tenaga kerja provinsi-provinsi di Indonesia termasuk dalam kelompok tenaga kerja yang belum memiliki keahlian, sehingga tenaga kerja yang memiliki keahlian masih berpengaruh negatif.

Rata-rata lama sekolah pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dilihat dari nilai parameter rata-rata lama sekolah yang terbesar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah model kedua dengan tidak memasukkan variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan rata-rata lama sekolah merupakan proksi dari modal manusia, dalam hal ini pembentuk modal manusia pengaruhnya lebih besar dari rata-rata lama sekolah daripada pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, temuan ini sesuai dengan teori *human capital*.

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dilihat dari nilai parameter pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang terbesar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah model ketiga dengan tidak memasukkan variabel rata-rata lama sekolah.

Dummy krisis pada model modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dilihat dari nilai parameter *dummy* krisis yang terbesar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah model ketiga dengan tidak memasukkan variabel rata-rata lama sekolah. Krisis ekonomi pada umumnya tidak berpengaruh terhadap kinerja pelaku ekonomi UMKM. UMKM inilah yang berhasil menyelamatkan kondisi ketenagakerjaan pada masa krisis ekonomi. Banyak pengangguran yang berasal dari pelaku usaha menengah dan besar yang gulung tikar beralih ke UMKM. Keadaan inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi cepat mengalami *recovery* dan perekonomian tumbuh terus.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D. 1998. Why Do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4): 1055-1089.

Aghion, P. and P. Howitt. 1992. A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2): 323-352.

Arrow, K. J. 1969. The Economic Implications of Learning by Doing. *Review of Economic Studies*, 29(June): 155-73.

Badan Pusat Statistik. Beberapa Terbitan. Keuangan Pemerintah Daerah, PDRB Provinsi, Tenaga Kerja. Jakarta.

Barro, R. S. and Sala-I-Martin. 1995. *Economic Growth*. New York: McGraw Hill.

Barro, Robert J., and Jong-Wha Lee. 1993. International Comparisons of Educational Attainment. *Journal of Monetary Economics*, 32(3): 363-394.

Barro, Robert. 1990. Government Spending in Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*.

---------- 1997. Determinants of Economic Growth: Across-country Empirical Study. *Journal of Political Economy*.

Becker, G. S., and Barry, R. Chiswick. 1994. Education and the Distribution of Earning. *American Economic Review*, 56(3): 58-69.

Beddies, Christian H. 1999. Investment, Capital Accumulation and Growth: Some Evidences from the Gambia 1964–1998. *IMF Working Papers*, WP/99/117.

Bigsten, A. and Levin, J. 2001. Growth, Income Distribution and Poverrty. *Working Paper in Economics*. Melalui http://rru.Woridbankorg/ Paper Link/htm (05/09/2006).

Canning, D. 1999. Infrastructure's Contribution to Aggregate Output. *World Bank Policy Working Paper*, 2246, Washington DC.

David, N. Hyman. 1999. *Public Finance, A. Contenporary Application of Theory to Policy* (6thedition). Orlando: *The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.*

Domar, E. 1946. Capital Expansion, Rate of growth and Employment. *Econometrica,* 14: 137-147.

----------. 1947. Expansion and Employment. *American Economic Review,* 37(1): 343-355.

Frantzen. D. 2000. R&D, Human capital and International Technology Spillovers: A cross-country Analysis. *The Scandinavian Journal of Economics*, 102(1).

Greene, H, William. 2000. *Econometric Analysis* (4thedition). New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.

Grossman, G. M. and E. Helpman. 1991. Trade, Knowledge, Spillovers, and Growth. *European Economic Review,* 80(April): 517-526.

Gujarati, D. N. 1995. *Basic Econometrics* (3rdedition). New York: McGraw-Hill.

Harmadi, Sonny H. B. dan Ardhi Santoso. 2007. Analisis Efek Limpahan Modal Manusia Terhadap Produktivitas Industri Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Indonesia,* 2: 27- 43.

Harrod, R. F. 1939. An Essay in Dynamic Theory. *Economic Journal*, 49(March): 14-33.

----------. 1948. *Toward a Dynamic Economics*. London: Macmillan.

Jhingan, M. L. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada.

Jose, R. Joesoef. 2007. *Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Sebuah Analisis Makroekonomi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Judson, Ruth. 1998. Economic Growth and Investment in Education: How Allocation Matters. *Journal of Economic Growth,* 3(4).

Kangqing, Zhang. 2001. *Human Capital Investement and Flows; A Multipriod Model China*. Prepared for the 6th International Metropolis Conference; Workshop on Triangular Human Capital Flows. Rotterdam: The Netherlands.

Landau, Daniel. 1986. Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960–1980. *Economic Development and Culture Change Journal*, 35(1).

Lewis, Arthur, W. 1960. *The Theory Of Economic Growth*. London.

Lucas, R. E., Jr. 1988. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics,* 22(1): 3-42.

Mangkusubroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: BPFE-UGM.

Mankiw, N. Gregory. 2005. *Macroeconomics* (5th edition). Worth Publisher.

Otani, I. and Villanueva, D. B. 1989. Long Term Growth in Developing Countries and Its Determinants: an Empirical Analysis. *World Development,* 18(6): 769-783.

_____. 1989. Theoretical Aspect of Growth in Developing Countries: External Debt Dynamics and the Role of Human Capital. *IMF Working Papers,* 36(June).

Psacharopoulos, G. 1994. Returns to Investement in Education: A Global Update. *World Development*, 22.

_____. 1997. Vocational Education and Training Today: Challenges and Responses. *Journal of Vocational Education and Training*, 49.

Randal, Collins. 1979. The Credential Socienty: An Historical Sosiology of Education and Stratification. *Journal of Education Economic*, 44.

Ranis G., Stewart F., and Ramirez A. 2000. Economics Growth and Human Development. *World Development*, 28(2): 197-219.

Robelo, Sergio. 1991. Long Run Policy Analysis and Long Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94 (October): 1002-37.

Romer, D. 2006. *Advanced Macroeconomics* (3rd edition). McGraw-Hill Irwin.

Romer, P. M. 1986. Increasing Returns and Long Run Growth. *Journal of Long Political Economy*, 94:12-37.

_____. 1990. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98:S71-S102.

_____. 1994. The Origins of Endogenous Growth. *Journal of Economic Perspective,* 8(1): 3-22.

Ruttan, V. W. 1998. Growth Economics and Development Economics: What Should Development Economists Learn (if anything) From the New Growth Theory. *University of Minnesota Economic Development Centre Bulletin,* (4).

Sacerdoti, Emilio, *et al.*, 1998. The impact of human capital on growth: evidence from West Africa. *IMF Working Paper WP/98/162*.

Sanjoyo. 2008. *Peran Sektor Publik dalam Akumulasi Human Capital dan kapasitas Research & Development (In Contect of Understanding The Source of Growth)*. Paper, Mahasiswa, Doktoral Pascasarjana Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Schultz, T. P. 1993. Investments in Schooling and Health of Women and Men. *Journal of Human Ressources*, (4): 694-734.

Solow, R. M. 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics,*70: 65-94.

Tapscott, D. 1997. Strategy in The New Economy. *Strategy and Leadership*, November/Desember.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development* (9thedition). United Kingdom: Pearson Education Limited.

----------. 2003. Undang-Undang.No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

----------. 2003. Undang-Undang. No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Trikonomika
Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 162–175
ISSN 1411-514X

Keterjangkauan Perumahan di Indonesia

Endang Rostiana
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
Jl. Tamansari No. 6 - 8 Bandung 40116
E-Mail: endangrostiana@yahoo.com

ABSTRACT

The major housing problem in Indonesia is provided affordable housing specially for lower income household. Household ability home ownership depends on their housing affordability. This research focuses on measuring housing affordability with three concepts: income affordability, repayment affordability, and residual income affordability. It shows that household with the median income in 33 municipal city of provinces in Indonesia less affordable to purchased house at the median price. Repayment affordability shows that most of household affordable to pay the housing annual mortgage payment, except in the several rural area. The other result shows that the number of household with deficit residual income decrease, but nominal value of deficit increase.

Keywords: housing affordability, income affordability, repayment affordability, residual income affordability.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam bidang perumahan di Indonesia adalah penyediaan perumahan yang terjangkau khususnya bagi kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah. Kemampuan rumah tangga dalam memiliki rumah yang layak ditentukan oleh seberapa besar keterjangkauan perumahan mereka. Penelitian ini memfokuskan kepada perhitungan keterjangkauan perumahan dengan menggunakan tiga konsep, yaitu: keterjangkauan penghasilan, keterjangkauan cicilan, dan keterjangkauan sisa penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga dengan penghasilan median di 33 ibukota provinsi di Indonesia kurang dapat menjangkau harga rumah pada tingkat harga mediannya. Keterjangkauan dari konsep cicilan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga mampu membayar cicilan kredit perumahan, kecuali di beberapa wilayah pedesaan. Hasil lainnya memperlihatkan bahwa jumlah rumah tangga yang mengalami defisit sisa penghasilan mengalami penurunan, tetapi nilai defisitnya secara nominal bertambah besar.

Kata Kunci: keterjangkauan perumahan, keterjangkauan penghasilan, keterjangkauan cicilan, keterjangkauan sisa penghasilan.

PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (*basic human needs*) selain sandang dan pangan. Berbeda dengan kebutuhan pokok sandang dan pangan yang relatif lebih mudah dalam pemenuhannya, pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak lebih sulit dilakukan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 22% atau 13 juta rumah tangga dari 61 juta rumah tangga Indonesia tidak punya tempat tinggal. Sementara 78% penduduk yang sudah memiliki tempat tinggal, masih banyak yang tempat tinggalnya tidak layak huni atau berada di tempat yang ilegal.

Pemenuhan akan rumah bagi masyarakat ditetapkan sebagai salah satu hak dasar masyarakat miskin yang menjadi prioritas untuk dipenuhi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Hal inilah yang dijadikan sebagai dasar mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat berpengahasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Seberapa besar kemampuan atau keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah (*housing affordability*) ditentukan oleh seberapa besar daya beli masyarakat atau sebuah rumah tangga dengan penghasilannya dalam membeli rumah pada tingkat harga tertentu. Oleh karena itu dalam perkembangannya, pembicaraan tentang keterjangkauan perumahan berkisar pada pembahasan tentang penghasilan dan perkembangan harga perumahan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa permasalahan keterjangkauan perumahan merupakan permasalahan yang komples (Quigley, 2000; Chen, 2006; Rinker, 2007; Suhaida, 2010). Permasalahan perumahan telah menjadi kompleks, karena berkembang pula permasalahan lain yang dapat mempengaruhi keterjangkauan perumahan, yaitu terkait dengan proses atau tata cara pembayaran perumahan yang lebih banyak dilakukan secara kredit yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berhubungan dengan sektor perbankan dan kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab menurunnya keterjangkauan perumahan adalah terjadinya peningkatan harga yang tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang memadai. Peningkatan harga perumahan dapat ditinjau dari sisi permintaan dan sisi penawaran perumahan. Dari sisi permintaan, peningkatan harga perumahan terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah: (a) peningkatan jumlah penduduk, (b) perkembangan suatu daerah, (c) perubahan selera, (d) kebiasaan penduduk (e) adanya ekspektasi peningkatan harga perumahan di masa yang akan datang yang menyebabkan peningkatan permintaan perumahan untuk tujuan investasi lebih besar dari permintaan perumahaan untuk tujuan konsumsi (Malpezzi, 1997), dan (f) relatif tingginya suku bunga kredit perumahan dari lembaga penyedia kredit (Hoek-Smith, 2005). Dari sisi penawaran, peningkatan harga perumahan terjadi karena adanya peningkatan biaya pembangunan perumahan yang terjadi karena naiknya harga-harga material perumahan dan harga tanah yang terus melambung terutama terjadi di kota-kota besar.

Permasalahan penghasilan yang terkait dengan keterjangkauan perumahan berkisar pada peningkatan penghasilan yang tidak sesuai dengan peningkatan harga perumahan dan distribusi penghasilan yang tidak merata. Penduduk dengan tingkat penghasilan tinggi hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil penduduk saja, sedangkan sebagian besar penduduk berada pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Permasalahan penghasilan lain dalam keterjangkauan perumahan adalah pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok di luar perumahan harus diperhitungkan. Pengeluaran biaya rumah tangga untuk keperluan non perumahan, misalnya untuk konsumsi pangan, sandang, biaya sekolah, dan biaya sehari-hari lainnya juga sangat dipengaruhi oleh sedikit banyaknya anggota rumah tangga yang menjadi beban tanggungan. Semakin banyak anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan, berarti semakin besar beban biaya konsumsi non perumahan, dan mengurangi kemampuan rumah tangga untuk membiayai biaya perumahan. Seharusnya dengan penghasilan tertentu, setelah membayar biaya perumahan, maka sebuah rumah tangga masih mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya di luar perumahan, biasanya diasumsikan biaya rumah adalah 25-30% dari penghasilan (Burke, 2003).

Pada umumnya pada rumah tangga berpenghasilan rendah dan keluarga muda, pembelian perumahan dilakukan secara kredit. Pada saat proses jual beli rumah secara kredit disyaratkan bahwa penghasilan pembeli

rumah adalah 3 atau 4 kali dari biaya cicilan yang harus mereka bayar setiap bulannya atau biaya cicilan merupakan 25-30% dari tingkat penghasilannya (Mombray, 2006). Besar kecilnya biaya cicilan ini berpengaruh terhadap keterjangkauan perumahan sebuah rumah tangga. Semakin besar cicilan yang harus dibayar semakin rendah keterjangkauan perumahan sebuah rumah tangga. Besar kecilnya cicilan terkait dengan suku bunga pinjaman, besarnya uang muka pinjaman, dan jangka waktu pinjaman.

Untuk mengukur seberapa besar keterjangkauan masyarakat dalam kepemilikan rumah telah banyak dikembangkan berbagai ukuran atau perhitungan keterjangkauan perumahan. Keterjangkauan perumahan pada umumnya dihitung dengan menggunakan ukuran indeks. Selain dengan menggunakan ukuran indeks, keterjangkauan perumahan dapat dihitung atau diukur dengan menggunakan beberapa jenis ukuran lain yang dapat dikelompokkan berdasarkan konsep yang mendasarinya, yaitu konsep *income affordability*, konsep *repayment affordability*, konsep *deficit affordability*, dan konsep *housing transportation affordability* (Kementrian Perumahan Rakyat, 2010).

Keterjangkauan penghasilan (*income affordability*) merupakan konsep keterjangkauan yang paling sederhana, semata-mata hanya mengukur rasio/perbandingan antara tingkat harga jual rumah terhadap tingkat penghasilan rumah tangga (Hill, 2009). Konsep keterjangkauan ini menganggap makin rendah rasio antara harga jual rumah terhadap penghasilan rumah tangga, maka dapat dikatakan keterjangkauan perumahan rumah tangga tersebut makin meningkat. Konsepsi keterjangkauan ini biasanya digunakan oleh asosiasi pengembang atau realtor. Salah satu contoh perhitungan keterjangkauan dengan konsep *income affordability* adalah *Demographia Index* yang merupakan hasil dari *International Housing Affordability Survey* yang dilaksanakan di kota-kota di enam negara, yaitu Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Konsep keterjangkauan cicilan (*repayment affordability*) beranggapan bahwa tingkat keterjangkauan dipengaruhi oleh kemampuan sebuah rumah tangga untuk memikul beban pembayaran angsuran atau cicilan perumahan (Hill, 2009). Makin ringan beban angsuran yang harus dibayar (dibandingkan dengan penghasilan) sebuah rumah tangga, maka dapat dikatakan keterjangkauan perumahan rumah tangga tersebut makin meningkat. Konsepsi keterjangkauan ini biasanya digunakan oleh asosiasi perbankan atau lembaga penerbit pembiayaan perumahan. Beberapa contoh perhitungan keterjangkauan dengan konsep *repayment affordability* di antaranya adalah *NAR* (*National Association of Realtors*) *Index, HUD* (*US Department of Housing*) *Index, NAHB* (*National Association of home Builders*) *Index,* dan *CAR* (*California Association of Realtors*) *Index*.

Keterjangkauan sisa penghasilan *residual income affordability* atau *deficit affordability* merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa tingkat keterjangkauan kepemilikan rumah tergantung pada besar kecilnya nilai sisa penghasilan rumah tangga, yaitu nilai yang didapat setelah penghasilan rumah tangga dikurangi pengeluaran untuk rumah dan pengeluaran konsumsi non perumahan (Stone, 2006). Makin kecil nilai sisa penghasilan sebuah rumah tangga, maka rumah tangga tersebut dianggap makin tidak mampu menjangkau perumahan. Konsepsi keterjangkauan ini biasanya digunakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengurusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Konsep *housing transportation affordability* menganggap keterjangkauan kepemilikan perumahan ditunjukkan oleh rasio/perbandingan antara jumlah pengeluaran kepemilikan rumah dan pengeluaran transpotasi sebuah rumah tangga terhadap tingkat penghasilan rumah tangga tersebut. Semakin rendah nilai perbandingan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keterjangkauan kepemilikan rumah rumah tangga tersebut makin meningkat. Konsepsi keterjangkauan ini biasanya digunakan oleh pengembang kawasan perumahan berskala besar dan pengelola kawasan metropolitan.

Perhitungan keterjangkauan masyarakat terhadap perumahan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan secara umum dari masyarakat di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau dan memenuhi standar layak huni minimal. Gambaran keterjangkauan ini dapat dipergunakan bagi masyarakat secara umum sebagai konsumen yang akan membeli rumah, bagi pengembang sebagai produsen yang menyediakan rumah dan pemerintah pusat maupun daerah sebagai pengambil kebijakan terkait perumahan yang mempunyai tugas meningkatkan kemampuan masayarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah.

METODE

Ukuran Keterjangkauan

Berdasarkan empat konsep perhitungan keterjangkauan masyarakat dalam membeli rumah atau keterjangkauan perumahan seperti dijelaskan dalam bagian pendahuluan, dalam penelitian ini dihitung tiga jenis ukuran keterjangkauan perumahan, yaitu dengan menggunakan konsep keterjangkauan penghasilan (*income affordability*), keterjangkauan mencicil (*repayment affordability*) dan konsep keterjangkauan sisa penghasilan (*residual income affordability*).

Indeks keterjangkauan dengan konsep keterjangkauan penghasilan (IK – KP) dihitung dengan suatu rasio atau perbandingan antara harga jual rumah median (HJ_{Median}) terhadap penghasilan rumah tangga median (PK_{Median}). Rumus perhitungan indeks keterjangkauan ini adalah sebagai berikut:

$$IK - KP = \frac{HJ_{median}}{PK_{median}} \quad \text{.....} \quad (1)$$

Berdasarkan kepada perhitungan keterjangkauan dengan konsep keterjangkauan penghasilan yang telah dilakukan di beberapa negara sebelumnya, seperti pada perhitungan *Demographia Index*, maka keterjangkauan perumahan dengan konsep keterjangkauan penghasilan dapat dikelompokkan dengan kriteria keterjangkauan seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Keterjangkauan

Nilai IK-IA	Keterjangkauan
Lebih dari 5	Sangat tak terjangkau
4,1 – 5,0	Tak terjangkau
3,1 – 4,0	Kurang terjangkau
Kurang dari atau sama dengan 3	Terjangkau

Indeks keterjangkauan dengan konsepsi keterjangkauan cicilan (IK – KC) merupakan rasio/perbandingan antara penghasilan rumah tangga median (PK_{Median}) terhadap penghasilan minimum yang dipersyaratkan ($PK_{Minimum}$) oleh lembaga pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang harganya setara dengan dengan harga jual rumah median (HJ_{Median}) atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IK - KC = \frac{PK_{median}}{PK_{minimum}} \quad \text{.....} \quad (2)$$

Semakin besar nilai IK – KC untuk suatu wilayah, maka dapat dikatakan bahwa perumahan di wilayah tersebut makin terjangkau. Namun, jika nilai IK – KC nya < 1 maka dapat dikatakan perumahan di wilayah tersebut kurang/tidak terjangkau.

Indeks keterjangkauan yang didasari oleh konsepsi keterjangkauan sisa penghasilan (IK – SP) menunjukkan nilai sisa penghasilan rumah tangga (SP) yang didapat setelah penghasilan rumah tangga (PK) dikurangi dengan pengeluaran perumahan (PR) dan pengeluaran non perumahan (PNR). Rumus perhitungan IK-SP adalah sebagai berikut:

$$IK - SP = PK - PR - PNR \quad \text{.....} \quad (3)$$

Nilai pengeluaran perumahan (R) yang digunakan di sini adalah nilai cicilan rumah untuk pembiayaan rumah dengan standar minimum kelayakan yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan tingkat suku bunga pembiayaannya menggunakan nilai rata-ratanya selama periode perhitungannya. Berbeda dengan jenis IK lainnya yang tak bersatuan, IK – SP menggunakan satuan rupiah.

Data

Perhitungan indeks keterjangkauan dengan konsep keterjangkauan penghasilan (IK – KP) dan kemampuan mencicil (IK – KC) menggunakan sampel kota yang menjadi ibukota provinsi pada setiap provinsi di seluruh Indonesia, yaitu terdiri dari 33 kota/kabupaten dengan periode tahun 2006 sampai dengan 2008. Perhitungan keterjangkauan dengan menggunakan konsep keterjangkauan sisa penghasilan (IK – SP) mengambil sampel 11 kota/kabupaten dan dua wilayah metropolitan, dengan periode tahun 2007 dan 2008.

Data sekunder yang terkait dengan data harga rumah, penghasilan, dan suku bunga kredit, uang muka kredit dan tenor atau jangka waktu kredit bersumber dari beberapa instansi seperti dari Bank Tabungan Negara, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementrian Perumahan Rakyat, dengan periode tahun 2006 sampai tahun 2008. Penjelasan tentang data yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel operasionalisasi variabel berikut.

Tabel 2. Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Data yang Dipergunakan
1.	Harga Jual Median (HJ_{Median})	• Dengan pertimbangan bahwa penjualan rumah secara kredit sebagian besar dilakukan oleh Bank Tabungan Negara, maa harga jual rumah median dihitung berdasarkan data harga dari Bank Tabungan Negara (BTN) pada tingkat Kantor Cabang di seluruh Indonesia. • Harga rumah yang dipergunakan adalah harga perumahan formal dalam bentuk *formal landed house*, tidak termasuk rumah susun. • Data harga rumah dari BTN tersebut merupakan harga rumah yang terjual atau harga rumah transaksi, belum termasuk harga rumah yang belum terjual atau harga rumah stok. • Data harga rumah dari BTN ini sebenarnya bukan merupakan harga rumah total tapi merupakan nilai KPR yang besarnya diasumsikan 75% dari total harga rumah, maka harga rumah total dihitung kembali disesuikan dengan nilai KPR tersebut, dengan rumus: $Harga\ Rumah = \left\{\frac{100\%}{100\% - \%Uang\ Muka}\right\} \times Nilai\ KPR$
2.	Penghasilan Rumah Tangga (PK_{Median})	• Oleh karena data tingkat pengahasilan rumah tangga median tidak ada, maka data tingkat penghasilan rumah tangga di-*proxy* dari rata-rata pengeluaran rumah tangga median yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Asumsi ini akan tepat untuk rumah tangga yang termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena pada kelompok ini seluruh penghasilan biasanya habis untuk membiayai pengeluaran rumah tangga. Artinya, nilai penghasilannya sama dengan nilai pengeluarannya. • Khusus untuk perhitungan daya beli perumahan dengan pendekatan *deficit affordability*, penghasilan di-proxy dari data tingkat pengeluaran rumah tangga bulanan berdasarkan kelompok pengeluaran dan jumlah anggota rumah tangga yaang diperoleh dari BPS. • Kelompok pengeluaran terdiri dari 37 kelompok pengeluaran mulai dari tingkat pengeluaran kurang dari 500 ribu rupiah sampai dengan lebih besar dari 5 juta rupiah. • Kelompok rumah tangga terdiri dari 7 kelompok anggota rumah tangga mulai dari jumlah anggota rumah tangga 2 orang sampai dengan lebih dari 6 orang.
3.	Penghasilan Rumah Tangga Minimum ($PK_{Minimum}$)	Penghasilan minimum ini dikenal dengan istilah *qualifying income*, yaitu besarnya penghasilan minimum yang dipersyaratkan oleh pemberi kredit perumahan kepada calon pembeli rumah. Dalam perhitungan pengahasilan rumah tangga minimum ini diperlukan data-data seperti tingkta suku bunga kredit perumahan, besarnya uang muka pembelian rumah secara kredit dan tenor atau jangka waktu kredit perumahan Penghasilan minimum rumah tangga (*qualifying income*) dihitung dengan rumus: *Qualifying Income = Cicilan per bulan* × RCP × 12 dimana: RCP = Rasio Cicilan terhadap Penghasilan
4.	Pengeluaran Rumah (PR)	Pengeluaran rumah merupakan besarnya cicilan per bulan yang harus dibayar rumah tangga yang membeli rumah dengan mencicil.
5.	Pengeluaran Non Rumah (PNR)	Pengeluaran konsumsi non rumah adalah pengeluaran konsumsi minimum (di luar biaya rumah) per rumah tangga yang dihitung dengan mengkalikan nilai pengeluaran konsumsi minimum per kapita dengan jumlah anggota rumah tangga.

HASIL

Perhitungan indeks keterjangkauan perumahan menggunakan beberapa asumsi berkaitan dengan tingkat suku bunga kredit kepemilikan rumah, besaran uang muka pembelian rumah secara kredit, jangka waktu atau tenor pelunasan kredit kepemilikan rumah, dan persyaratan rasio angsuran atau cicilan kredit kepemilikan rumah terhadap penghasilan pembeli rumah, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Asumsi-asumsi Perhitungan Indeks Keterjangkauan Perumahan

Uraian	Satuan	2006	2007	2008	2009
Tingkat Suku Bunga	(%)	8.00	12.00	12.00	14.50
Uang Muka	(%)	25.00	25.00	25.00	25.00
Tenor	(Tahun)	15	15	15	15
Persyaratan rasio angsuran terhadap penghasilan	(%)	33.33	33.33	33.33	33.33

Sumber: Kementrian Perumahan Rakyat

Keterjangkauan Penghasilan (IK – KP)

Berdasarkan data-data asumsi seperti ditunjukkan oleh Tabel 3. hasil perhitungan indeks keterjangkauan perumahan dengan konsep kemampuan penghasilan di 33 ibukota provinsi di Indonesia untuk tahun 2006 sampai 2008 terlihat pada Tabel 4.

Keterjangkauan Cicilan (IK – KC)

Jika pada perhitungan indeks keterjangkauan perumahan dengan konsep kamampuan penghasilan (IK-KP) belum memasukkan unsur-unsur pembelian rumah dengan menggunakan fasilitas kredit kepemilikan rumah, maka dalam indeks keterjangkauan perumahan dengan konsep kemampuan mencicil (IK – KC) ini aspek-aspek kredit kepemilikan rumah sudah dimasukkan dalam perhitungannya. Perhitungan aspek-aspek kredit kepemilikan rumah ini ada dalam perhitungan penghasilan rumah tangga minimum ($PK_{Minimum}$) atau *qualifying income*. Hasil perhitungan IK-KC dapat dilihat pada Tabel 5.

Keterjangkauan Sisa Penghasilan (IK – SP)

Berbeda dengan dua konsep perhitungan indeks keterjangkauan sebelumnya, dalam perhitungan keterjangkauan perumahan dengan konsep sisa penghasilan ini (IK – SP) sudah memasukkan adanya unsur biaya non perumahan, yaitu biaya kebutuhan konsumsi sehari-hari yang pada umumnya lebih diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Keterjangkaun dalam konsep ini adalah diukur dengan seberapa besar sisa penghasilan yang tersedia setelah penghasilan rumah tangga dikurangi dengan biaya kebutuhan konsumsi sehari-hari. Apakah sisa penghasilan rumah tangga tersebut masih mencukupi untuk membayar biaya perumahan yang diwakili dengan biaya cicilan rumah setiap bulannya.

Dengan perhitungan IK – SP ini dapat diketahui (a) jumlah rumah tangga (*head count*) yang IK – SP nya masih negatif, artinya rumah tangga tersebut belum mampu membayar cicilan rumah atau keterjangkauan perumahannya masih rendah, dan (b) nilai rata-rata kekurangan penghasilan (*depthness*) rumah tangga untuk dapat membiayai biaya perumahan pada tingkat harga tertentu. Hasil perhitungan IK – SP untuk 11 kota/kab. dan dua wilayah metropolitan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6.

PEMBAHASAN

Keterjangkauan Penghasilan (IK – KP)

Dalam kriteria keterjangkauan dengan konsep kemampuan penghasilan (*income affordability*), jika nilai IK-KP untuk suatu wilayah tidak melebihi 3, dapat dikatakan bahwa perumahan di wilayah tersebut terjangkau, sedangkan jika nilai IK-KP nya melebihi 3, maka dikatakan perumahan di wilayah tersebut kurang terjangkau.

Hasil perhitungan indeks keterjangkauan perumahan dengan konsep kemampuan penghasilan (Tabel 5.), dari 33 ibukota provinsi-provinsi di Indonesia rata-rata memiliki nilai indeks keterjangkauan perumahan sebesar 3,30. Dengan demikian, secara rata-rata perumahan di kota-kota sebagai ibukota provinsi di Indonesia masih kurang terjangkau, walaupun demikian terdapat kota-kota tertentu yang nilai indeks keterjangkauan perumahannya kurang dari atau sama dengan 3, berarti di kota-kota tersebut perumahan sudah terjangkau oleh rumah tangga yang berada pada kelompok tingkat penghasilan median.

Tabel 4. Indeks Keterjangkauan Perumahan dengan Konsep Kemampuan Penghasilan (IK – KP)

No.	Provinsi	Kota/Kab.	IK – KP			
			2006	2007	2008	Rata-Rata
1.	Nanggroe Aceh	Kota Banda Aceh	2.09	1.94	1.51	1.85
2.	Sumatera Utara	Kota Medan	2.79	2.99	2.65	2.81
3.	Sumatera Barat	Kota Padang	3.21	3.36	2.74	3.10
4.	Riau	Kota Pekanbaru	2.55	2.48	1.72	2.25
5.	Jambi	Kota Jambi	3.36	3.13	2.83	3.10
6.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	3.02	3.19	2.80	3.00
7.	Bengkulu	Kota Bengkulu	3.44	3.82	5.68	4.31
8.	Lampung	Kota Bandar Lampung	2.84	2.93	2.63	2.80
9.	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	2.39	3.39	2.34	2.71
10.	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	2.43	2.65	1.86	2.31
11.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	2.33	2.44	2.06	2.28
12.	Jawa Barat	Kota Bandung	3.16	3.20	2.61	2.99
13.	Jawa Tengah	Kota Semarang	4.12	3.62	3.31	3.69
14.	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	5.10	7.74	4.01	5.62
15.	Jawa Timur	Kota Surabaya	3.53	3.88	3.04	3.49
16.	Banten	Kota Cilegon	2.66	2.65	2.46	2.59
17.	Bali	Kota Denpasar	4.38	5.08	5.03	4.83
18.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	6.31	4.38	3.65	4.78
19.	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2.75	3.13	2.67	2.85
20.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	2.86	2.88	2.36	2.70
21.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	3.69	3.66	3.04	3.46
22.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	2.97	3.08	2.94	3.00
23.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	3.04	2.57	1.88	2.50
24.	Sulawes Utara	Kota Manado	3.55	3.57	2.94	3.36
25.	Sulawesi Tengah	Kota Palu	3.29	3.40	3.26	3.32
26.	Sulawesi Selatan	Kota Ujung Pandang	3.41	3.76	2.79	3.32
27.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	3.07	3.33	3.68	3.36
28.	Gorontalo	Kota Gorontalo	3.96	3.89	3.57	3.80
29.	Sulawesi Barat	Kab. Majene	5.40	5.30	4.99	5.23
30.	Maluku	Kota Ambon	4.52	4.17	4.85	4.51
31.	Maluku Utara	Kota Ternate	3.67	3.25	3.81	3.58
32.	Papua Barat	Kota Sorong	2.78	2.94	2.04	2.59
33.	Papua	Kota Jayapura	2.26	2.39	4.19	2.95
					Rata-rata	3.30

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 5. Indeks Keterjangkauan Perumahan dengan Konsep Kemampuan Mencicil (IK – KC)

No.	Provinsi	Kota/Kab.	IK – KC			
			2006	2007	2008	Rata-Rata
1.	Nanggroe Aceh	Kota Banda Aceh	185.63	340.47	436.75	320.95
2.	Sumatera Utara	Kota Medan	139.05	220.73	249.01	202.93
3.	Sumatera Barat	Kota Padang	120.79	196.70	241.29	186.26
4.	Riau	Kota Pekanbaru	152.03	266.02	383.99	267.35
5.	Jambi	Kota Jambi	115.44	211.38	233.49	186.77
6.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	128.22	206.96	236.05	190.41
7.	Bengkulu	Kota Bengkulu	112.70	172.91	116.21	133.94
8.	Lampung	Kota Bandar Lampung	136.26	225.64	251.28	204.39
9.	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	162.48	194.65	282.22	213.11
10.	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	159.64	249.64	354.64	254.64
11.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	166.55	270.31	320.80	252.55
12.	Jawa Barat	Kota Bandung	122.65	206.30	253.56	194.17
13.	Jawa Tengah	Kota Semarang	93.96	182.41	199.30	158.55
14.	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	75.99	85.35	164.92	108.75
15.	Jawa Timur	Kota Surabaya	109.69	170.33	217.02	165.68
16.	Banten	Kota Cilegon	145.41	249.41	268.54	221.12
17.	Bali	Kota Denpasar	88.43	130.00	131.21	116.54
18.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	61.39	150.99	180.88	131.09
19.	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	140.99	211.39	247.38	199.92
20.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	135.73	229.35	279.40	214.83
21.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	104.96	180.28	217.62	167.62
22.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	130.63	214.29	224.84	189.92
23.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	127.63	257.21	350.97	245.27
24.	Sulawes Utara	Kota Manado	109.02	185.18	224.43	172.88
25.	Sulawesi Tengah	Kota Palu	117.85	194.12	202.45	171.47
26.	Sulawesi Selatan	Kota Ujung Pandang	113.62	175.51	236.85	175.33
27.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	126.10	198.12	179.59	167.94
28.	Gorontalo	Kota Gorontalo	97.84	170.00	185.23	151.02
29.	Sulawesi Barat	Kab. Majene	71.75	124.66	132.40	109.60
30.	Maluku	Kota Ambon	85.76	158.42	136.32	126.83
31.	Maluku Utara	Kota Ternate	105.50	203.30	173.33	160.71
32.	Papua Barat	Kota Sorong	139.26	224.54	324.33	229.38
33.	Papua	Kota Jayapura	171.47	276.48	157.80	201.92
					Rata-rata	187.69

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 6. Indeks Keterjangkauan Perumahan dengan Konsep Sisa penghasilan (IK – SP), *Head Count*

No.	Kota/Wilayah Kajian	2007		2008	
		Jumlah (Rumah Tangga)	%	Jumlah (Rumah Tangga)	%
1.	Pekanbaru	52,978	29.72%	11,646	6.10%
2.	Bengkulu	34,004	51.86%	13,106	25.26%
3.	Semarang	228,636	59.12%	112,083	29.00%
4.	Denpasar	32,994	20.98%	12,417	23.93%
5.	Pontianak	44,044	39.93%	25,402	19.64%
6.	Banjarmasin	78,126	49.56%	34,379	22.86%
7.	Balikpapan	25,473	21.35%	7,774	6.54%
8.	Kendari	26,481	45.47%	24,289	42.94%
9.	Gorontalo	26,845	65.03%	14,261	38.84%
10.	Ternate	6,607	18.84%	2,226	7.06%
11.	Manokwari	8,134	57.25%	6,262	47.23%
12.	Jabodetabek	3,349,206	54.66%	2,410,714	38.44%
13.	Gerbangkertasusila	1,471,581	65.16%	829,932	37.54%

Keterangan: Jabodetabek menggunakan harga rumah median Rp 70 juta,
Kota lain dan Gerbangkertasusila menggunakan harga rumah median Rp 55 juta.

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 7. Indeks Keterjangkauan Perumahan dengan Konsep Sisa Penghasilan (IK-SP), *Depthness*

No.	Kota Kajian	2007	2008
		Kekurangan rata-rata (Rp/RT)	Kekurangan rata-rata (Rp/RT)
1.	Pekanbaru	299,128	343,288
2.	Bengkulu	372,985	360,993
3.	Semarang	390,330	316,742
4.	Denpasar	222,051	298,960
5.	Pontianak	384,602	429,954
6.	Banjarmasin	370,443	335,247
7.	Balikpapan	226,146	373,946
8.	Kendari	432,996	374,276
9.	Gorontalo	410,412	296,114
10.	Ternate	311,101	317,679
11.	Manokwari	582,777	623,211
12	Jabodetabek	602,053	523,533
13.	Gerbangkertasusila	391,470	351,381

Keterangan: Jabodetabek menggunakan harga rumah median Rp 70 juta,
Kota lain dan Gerbangkertasusila menggunakan harga rumah median Rp 55 juta.

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 8. Indeks Keterjangkauan dengan Kosep Keterjangkauan Cicilan (IK – KC) Beberapa Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

Kota/Kabupaten	2006	2007	2008	Rata-Rata
Kab. Garut	58.83	91.92	85.07	78.61
Kab. Tasikmalaya	56.01	88.17	76.45	73.54
Kab. Ciamis	63.04	98.51	85.70	82.42
Kab. Grobogan	49.79	96.31	97.45	81.18
Kab. Blora	45.96	88.90	82.55	72.47
Kab. Rembang	50.77	98.22	95.78	81.59
Kab. Bondowoso	43.32	69.60	92.01	68.31
Kab. Situbondo	50.22	80.67	88.61	73.17
Kab. Probolinggo	51.25	79.81	97.53	76.20
Kab. Klungkung	52.41	77.05	73.16	67.54
Kab. Bangli	53.05	78.00	56.57	62.54
Kab. Karang Asem	44.63	65.62	57.68	55.98
Kab. Buleleng	51.38	75.53	63.76	63.56

Sumber: Hasil perhitungan

Perkembangan nilai indeks keterjangkauan perumahan dengan konsep kemampuan penghasilan ini dapat dipergunakan oleh pengembang dan masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk rumah. Para pengembang perumahan lebih berminat untuk mengembangkan usahanya di wilayah kota/ kab. yang memiliki nilai indeks keterjangkauangan perumahan (IK – KP) kurang atau sama dengan tiga, karena di wilayah kota/kabupaten tersebut penduduknya diharapkan dapat menjangkau harga rumah yang dijual pengembang. Demikian juga dengan masyarakat sebagai individu yang ingin berinvestasi jual beli rumah, mereka akan membeli rumah di wilayah dengan indeks keterjangkauan yang menunjukkan perkembangan nilai indeksnya menurun. Hal ini dengan pertimbangan bahwa jika suatu saat mereka menjual rumah investasinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, akan terjangkau oleh pembeli di wilayah tersebut.

Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, indeks keterjangkauan dengan konsep kemampuan penghasilan ini akan berguna untuk menentukan bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah yang layak. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan cara meng-intervensi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kebijakan pemerintah diarahkan untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, misalnya melalui bantuan subsidi pembelian rumah atau subsidi uang muka untuk pembelian rumah formal secara kredit khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi penawaran pemerintah dapat membantu pengembang dalam menyediakan rumah layak yang terjangkau, di antaranya dengan cara menyediakan lahan dengan harga yang lebih terjangkau, misalnya melalui program Kasiba (Kawasan Siap Bangun), memberikan subsidi kepada pengembang, dan mengurangi biaya-biaya perizinan pembangunan rumah bagi pengembang. Pengembang juga dapat melakukan berbagai inovasi dalam teknologi membangun rumah untuk mengurangi biaya pembangunan rumah per unitnya (Mc.Cray, 1994).

Keterjangkauan Cicilan (IK – KC)

Rumah di sebuah wialayah dilakatakan ter-jangkau jika indeks keterjangkauan dengan konsep

kemampuan mencicilnya (IK – KC) lebih besar dari satu. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara nasional, rata-rata IK – KC kota-kota ibukota provinsi di Indonesia sebesar 187,69 (Tabel 5.). Hal ini menunjukkan pada tingkat harga rumah mediannya, penduduk di kota/kab. tersebut sudah dapat menjangkau biaya cicilan kredit rumah setiap bulannya.

Terjangkaunya beban cicilan rumah oleh rumah tangga yang terdapat di wilayah kota yang menjadi ibukota provinsi dimunginkan, karena biasanya di wilayah perkotaan yang sudah cukup maju, penghasilan rumah tangga relatif lebih tinggi dibandingkan di wilayah-wilayah pinggiran (*hinterland area*) atau di wilayah pedesaan. Selain itu, relatif terjangkaunya cicilan kredit kepemilikan rumah di wilayah ibukota provinsi disebabkan karena di wilayah ini kredit kepemilikan rumah lebih banyak dan mudah untuk diakses, sementara di wilayah pedesaan belum banyak lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan perumahan. Hal ini dapat didukung dengan hasil perhitungan IK – KC untuk beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali menunjukkan nilai kurang dari 100. Hal ini berarti di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut keterjangkauan dalam membayar cicilan rumah pada tingkat harga mediannya masih rendah. Kondisi seperti ini juga terjadi di tahun 1990 di Amerika Serikat, di mana di daerah pedesaan keterjangkauan perumahan masyarakatnya lebih lebih dibandingkan dengan keterjangkauan di perkotaan (Ha MiKyoung, 1994).

Hasil penelitian Marja C. Hoek-Smit tentang bagaimana sektor pembiayaan perumahan di Indonesia (2005) menunjukkan bahwa kurang terjangkauannya perumahan oleh masyarakat Indonesia disebabkan karena adanya hambatan-hambatan pada sisi permintaan dan pada sisi penawaran perumahan. Hambatan pada sisi permintaan di antaranya adalah karena masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, sehingga masih sedikit pekerja yang dapat mengakses kredit perumahan karena lembaga pembiayaan, biasanya mensyaratkan peminjam sebagai pekerja pada sektor formal. Hambatan lainya adalah masih tingginya tingkat suku bunga kredit kepemilikan rumah yang dibebankan oleh lembaga pembiayaan perumahan. Hambatan dari sisi penawaran di antaranya adalah kurangnya kemampuan pengembang untuk membangun rumah dengan harga yang terjangkau, karena masih tingginya biaya membangun rumah. Tingginya biaya membangun rumah ini disebabkan karena semakin mahalnya harga lahan, prosedur perizinan yang tidak efisien dan efektif, serta keterbatasan struktur pembiayaan dari lembaga keuangan.

IK – KC terutama sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan perumahan. Perkembangan nilai IK – KC dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembiayaan perumahan. Jika nilai IK – KC kurang dari 100 (menunjukkan perumahan tidak terjangkau), maka lembaga pembiayaan seharusnya mulai berupaya untuk menurunkan besarnya angsuran. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga pembiayaan dan memperpanjang tenor atau jangka waktu pelunasan kredit. Namun, jika IK – KC lebih dari 100 (cukup terjangkau), maka lembaga pembiayaan dapat mempertimbangkan keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga pembiayaan dan memperpendek tenor atau jangka waktu pembayaran cicilan.

Faktor lainnya yang dapat menjadi kendala sebuah rumah tangga, khususnya rumah tangga muda dalam melakukan pembelian rumah secara mencicil adalah masih tingginya uang muka yang harus mereka dibayarkan kepada lembaga pembiayaan perumahan. Hal ini juga terjadi di beberapa negara maju, seperti di Amerika Serikat seperti dijelaskan dalam hasil penelitian Christopher J. Mayer (1996). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa subsidi uang muka cicilan kredit perumahan bagi rumah tangga muda yang berpenghasilan rendah.

Keterjangkauan Sisa penghasilan (IK – SP)

Oleh karena keterjangkauan perumahan dengan konsep sisa penghasilan ini diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan rumah tangga dengan biaya konsumsi non perumahan dan biaya perumahan, maka nilai IK-DA dapat positif maupun negatif. Nilai positif artinya, rumah tangga tersebut dapat menjangkau biaya perumahan yang diwakili dengan biaya cicilan per bulannya. Akan tetapi walaupun negatif, namun jika nilai defisit anggaran sebuah rumah tangga makin

kecil, maka dapat dikatakan kondisi keuagan rumah tangga tersebut semakin membaik atau keterjangkauan perumahannya semakin meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan keterjangkauan perumahan dengan konsep sisa penghasilan (Tabel 6 dan 7) terlihat bahwa dari 14 wilayah kajian (12 kota/ kabupaten serta 2 wilayah metropolitan), pada tahun 2007 terdapat 6 wilayah yang jumlah rumah tangga dengan IK – SP negatif masih di atas 50%. Namun kondisi ini berubah pada tahun 2008, di mana pada tahun ini IK – SP menunjukkan kondisi membaik. Hal ini diperlihatkan dengan semakin menurunnya persentase rumah tangga yang IK – SP-nya negatif.

Perkembangan keterjangkauan perumahan dengan konsep sisa penghasilan ini dapat juga dianalisis dari rata-rata kekurangan penghasilan (*depthness*) rumah tangga untuk dapat membiayai biaya perumahan pada tingkat harga tertentu. Berbeda dengan perkembangan jumlah rumah tangga yang memiliki nilai IK – SP negatif yang menunjukkan perkembangan membaik atau jumlah rumah tangga yang mengalami defisit anggaran rumah tangga semakin sedikit, maka perkembangan rata-rata kekurangan penghasilan (*depthness*) rumah tangga untuk dapat membiayai biaya perumahan, pada 8 kota/ kabupaten yang dijadikan sampel justru menunjukkan kondisi yang semakin besar kekurangannya (Tabel 6.). Di satu sisi jumlah rumah tangga yang IK – SP-nya semakin menurun, sementara di sisi lain rata-rata kekurangan penghasilan untuk dapat membiayai cicilan rumah semakin besar. Hal ini menunjukkan kondisi kesenjangan yang semakin tinggi. Walaupun jumlah penduduk yang belum dapat menjangkau biaya perumahan semakin sedikit, tetapi kondisi mereka menjadi semakin buruk, karena untuk dapat menjangkau biaya perumahan, penghasilan mereka semakin tidak mencukupi. Kondisi inilah yang dikenal dengan konsep *shelter poverty* (Nunez, 1994; Bratt, 1995; Armenoff 1998; Kutty, 2005) yang menyatakan bahwa semakin besarnya biaya perumahan menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi miskin.

Penghasilan sebuah rumah tangga menjadi semakin tidak mencukupi untuk dapat membayar biaya perumahan dapat terjadi karena semakin besarnya biaya non perumahan, khususnya biaya kebutuhan pokok sehari-hari. Semakin besarnya biaya non perumahan dapat terjadi karena semakin mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok, selain itu juga dapat disebabkan karena jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan semakin banyak.

Jika melihat kecenderungan nilai IK–SP, maka permasalahan perumahan menjadi semakin kompleks. Permasalahnnya tidak lagi menyangkut permasalahan harga rumah dan tingkat penghasilan, tetapi juga ditentukan oleh hal lainnya, misalnya oleh tingkat inflasi untuk kelompok barang-barang kebutuhan pokok serta jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan. Oleh karena itu, permasalahan keterjangkauan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapat perhatian pemerintah.

Nilai IK–SP dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menetapkan rumah tangga mana yang layak mendapatkan bantuan perumahan, misalnya rumah tangga yang nilai IK–SP-nya negatif. Atau dapat juga digunakan untuk menentukan prioritas rumah tangga mana, serta wilayah mana yang perlu mendapat bantuan terlebih dahulu (misalnya yang nilai IK–SP-nya lebih rendah/lebih negatif). Selain itu dengan IK–SP *depthness* dapat juga ditentukan besaran bantuan yang harus diberikan kepada rumah tangga yang menjadi prioritas untuk dibantu. Menurut Robert Mowbray (2006), rumah tangga yang harus dibantu adalah rumah tangga yang sudah mengalami "*housing stress*", yaitu rumah tangga yang pengeluaran perumahannya sudah melebihi 30% dari total penghasilan rumah tangga tersebut.

Peran pemerintah dalam membantu rumah tangga untuk dapat menjangkau pembiayaan perumahan menjadi begitu penting, karena pemerintah sudah menetapkan rumah sebagai salah satu hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang perlu mendapat prioritas untuk pemenuhannya. Seperti halnya negara tetangga Malaysia, pemerintahnya telah menetapkan perumahan sebagai kebutuhan dasar penduduknya dan merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan ekonomi perkotaan sehingga diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi penduduknya (Suhaida, 2010).

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, informasi IK–DA dari beberapa kota/kabupaten akan sangat bermanfaat untuk menentukan bentuk program

bantuan perumahan, anggaran bantuan perumahan yang perlu disediakan bagi masing-masing kota/ kabupaten, serta daerah mana yang perlu lebih dulu diprioritaskan untuk dibantu.

KESIMPULAN

Keterjangkauan perumahan masyarakat di 33 kota/ kabupaten yang menjadi ibukota provinsi di Indonesia menunjukkan kondisi masih kurang terjangkaunya harga rumah pada tingkat harga mediannya oleh kelompok rumah tangga dengan tingkat penghasilan median. Sebagian besar rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan sudah mampu mencicil biaya perumahan formal yang dibiayai dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Akan tetapi kondisinya menjadi berbeda dengan wilayah pedesaan, di mana besarannya nilai cicilan kredit kepemilikan rumah belum terjangkau oleh rumah tangga-rumah tangga yang tinggal disini.

Hasil perhitungan lainnya menunjukkan bahwa di 12 kota/kabupaten dan dua wilayah metropolitan di Indonesia telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga (*head count*) yang sisa penghasilan rumah tangganya menunjukkan nilai negatif atau mengalami defisit. Hal ini menujukkan bahwa telah terjadi peningkatan keterjangkauan perumahan di wilayah-wilayah tersebut. Akan tetapi besaran nilai rata-rata kekurangan penghasilan (*depthness*) rumah tangga untuk dapat membiayai biaya perumahan pada tingkat harga tertentu justru semakin besar. Hal ini menunjukkan kondisi kesenjangan yang semakin tinggi. Penghasilan sebuah rumah tangga menjadi semakin tidak mencukupi untuk dapat membayar biaya perumahan dapat terjadi karena semakin besarnya biaya non perumahan. Semakin besarnya biaya non perumahan dapat terjadi karena semakin mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok, selain itu juga dapat disebabkan karena jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan semakin banyak.

Jika melihat hasil perhitungan keterjangkauan perumahan di Indonesia, maka permasalahan perumahan menjadi semakin kompleks. Permasalahan-nya tidak lagi menyangkut permasalahan harga rumah dan tingkat penghasilan, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan banyak dalam membantu meningkatkan keterjangkauan perumahan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap sisi permintaan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan. Dari sisi penawaran, pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembang, khususnya pengembang perumahan formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pengembang dapat menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Armenoff, K. 1998. Shelter poverty: New Ideas on housing affordability. *Journal of Urban Affairs*, 20(3): 359-362.U S I N

Badan Pusat Statistik. 2006. *Jumlah Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga*. Jakarta.

_____. 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta.

_____. 2009. *Survey Sosial Nasional*. Jakarta.

Bank Tabungan Negara. 2006. *Data Harga Rumah Median*. Jakarta.

_____ . 2007. *Data Harga Rumah Median*. Jakarta.

_____ . 2008. *Data Harga Rumah Median*. Jakarta.

Bogdon, A. S., Can, A. 1997. Indicators of Local Housing Affordability: Comparative and Spatial Approaches. *Real Estate Economics*, 25(1): 43-80.

Bratt, R. G. 1995. Shelter Poverty - New Ideas on Housing Affordability. *Journal of the American Planning Association*, 61(2): 285-286.

Buckley, R. M., & Kalarickal, J. 2005. Housing Policy in Developing Countries: Conjectures and Refutations. *The World Bank Research Observer*, 20(2): 233.

Burke, Terry. 2003. Measuring Housing Affordability. *Swinburne Monash AHURI Centre, Swinburne University of Technology.*

Chen, J., Hao, Q. and Turner, B. 2006. *Housing Finance, Economic Development and Housing Affordability in China: A Case Study of Shanghai*. Paper for SSE-LSE-CCER Joint Conference in Stockholm, November.

Demographia. 2010. *6th Annual Demographia International Housing Affordability Survey*. Belleville, Illinois: Performace Urban Planning.

Ha, MiKyoung and Weber, Margareth. 1994. Housing Affordability: Effect of Housing Market and Socio Economic Factors. *Housing and Society*, 21(1): 47-59.

Hill, Robert and Gan, Q. 2009. Measuring Housing Affordability: Looking Beyond the Median, *Journal of Housing Economics* 18(2): 115-125.

Kementrian Perumahan Rakyat. 2010. *Panduan Umum Indeks Keterjangkauan Masyarakat Dalam Kepemilikan Rumah*. Jakarta.

Kutty, N. 2005. A New Measure of Housing Affordability: Estimates and Analytical Results. *Housing Policy Debate*, 15(1): 113-42.

Malpezzi, Stephen and Mayo, Stephen.K. 1997. Housing and Urban Develompment Indicators: A Good Idea Whose Time Returned. *Real Estate Economics*, 25(1): 1-11.

Mayer, J. Christopher. 1996. Gifts, Down Payment, and Housing Affordability. *Journal of Housing Research*, 7(1): 59-77.

McCray, J. W. 1994. A Causal Model of Barriers and Incentives to Affordable Housing in Southern Rural Communities: An Overview. *Housing and Society*, 21(1): 3-12.

Mowbray, Robert. 2006. Private Rental: Can It Deliver Affordable Housing to Low-Income Tenants?. *Shelter New South Wales Issues Paper*, June.

Nunez, R. D. 1994. Shelter Poverty - New Ideas on Housing Affordability. *Political Science Quarterly*, 109(2): 379-381.

Quigley, J. M. 2000. A Decent Home: Housing Policy in Perspective. *Brookings Papers on Urban Affairs*, 1(1): 53-99.

Rinker, M. E. 2007. Housing Affordability Index in Florida. *Affordable Housing Issues*, XVII (2): 1-4.

Stone, M. E. 2006. What is housing affordability? The case for the residual income approach. *Housing Policy debate*, 17(1): 151–184.

Suhaida, M. M., *et al*. 2010. A Conceptual Overview of Housing Affordability in Selangor, Malaysia. *Academy of Science, Engineering and Technology*, 72.

INDEKS PENULIS VOLUME 10

A

Agus Supandi Soegoto 19

C

Caska 105

D

Deddy Supardi 116

E

Ellen Rusliati 31
Elvira Zeyn 52
Endang Rostiana 162

F

Fenty Yoseph M 63

G

Galih Prasetyo 31

H

Haryadi 1
Herwin Mopangga 40

J

Jaja Suteja 128

M

Madris 95

R

R. Abdul Maqin 10
R. Adisetiawan 72

S

Saparuddin M. 85

T

Tete Saepudin 148

V

Vera Pauline K 63

Y

Yerimias Manuhutu 63

Z

Zulki Zulkifli Noor 139

INDEKS SUBYEK VOLUME 10

A

accounting standards of government 52

C

civil servant 95
cointegration 72, 75, 76, 82
collaborative 105, 113, 114
cooperative business cluster 105

D

demographic characteristics 1
dividen 32, 33, 34, 38, 79, 128, 130, 131, 135, 136, 137
Dividend per Share (DPS) 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38
dividend 34, 36, 128, 130

E

Earnings per Share (EPS) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
economic growth 2, 10, 17, 18, 40, 93, 148, 159, 160
educational attainment average 148
education infrastructure 10
education and training 85
electricity infrastructure 10
employment opportunities 2, 8, 85
exchange rates 63, 72, 139

F

financial accountability 52
financial leverage 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38
fisheries export 63

G

good governance 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
government expenditure 10, 148
growth rate of the firm 128

H

health infrastructure 10
housing affordability 162, 163

I

IHSG 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 136
inclusive 105, 113, 114
income contribution 1
income affordability 162, 164, 165, 167
industri kecil dan menengah 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
inflation 63, 72, 139, 140
inflasi 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 173
institutional ownership 128, 130, 136
interest rate 72, 139, 142
investasi 11, 12, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 38, 43, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 128, 130, 131, 132, 135, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 163
investment 2, 3, 4, 6, 7, 18, 29, 39, 63, 65, 85, 99, 110, 128, 135, 148, 150

J

JCI 72
jumlah uang beredar 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 139, 145

K

kebijakan leverage 128
kelapa sawit 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114
kepemilikan institusional 32, 128, 130, 135
kepemilikan manajerial 32, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 137
kesempatan kerja 85, 88, 89, 90, 91, 92, 102
keterjangkauan cicilan 162, 164, 165, 171
keterjangkauan penghasilan 162, 165, 167
keterjangkauan perumahan 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
keterjangkauan sisa penghasilan 162, 165
kointegrasi 72, 75, 76, 77, 80, 82

L

labor supply as lecturer 95
labour 10
leverage policy 128

M

macro economic variables 72
managerial ownership 128, 137
manufacturing company 31
market driven 21, 105, 113, 114
marketing strategy 19, 22, 28, 29
market orientation 19, 21, 22
money supply 72, 139, 141, 142, 144, 145, 146
motivation 1, 3, 5
multinomial logit regression 128, 130, 133, 137

N

nilai perusahaan 32, 33, 38, 56, 128, 130, 132, 135, 136, 137
nilai tukar 32, 66, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146

P

palm 105
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 95, 96, 97, 99, 100, 101
penawaran tenaga kerja dosen 95, 103
pendapatan per kapita 42, 43, 47, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 158
pendidikan dan latihan 85, 91
pengeluaran pemerintah untuk pendidikan 148, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159
penghentian prematur 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126
per capita income 85
positional advantage 19, 22
premature sign-off 116
productivity 1, 2, 5, 7, 8, 11, 18

R

rata-rata lama sekolah 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159
regional disparity 40
regresi multinomial 128, 133, 135, 136
repayment affordability 162, 164, 165
residual income affordability 162, 164, 165
road infrastructure 10

S

size of the firm 128
skilled-labor 148
small and medium industries 85
social economic condition 1
stasioneritas 72, 74, 76
stationarity 72
stock prices 31
suku bunga 65

T

tekanan budget waktu 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
tenaga kerja ahli 148
tenaga kerja tidak ahli 148
the province of gorontalo 40
time budget pressure 116
tingkat suku bunga 72, 73, 79, 81, 82, 135, 139, 140, 141, 142, 145, 165, 167, 172
transparency 52, 58

U

ukuran perusahaan 128, 130, 135, 136, 137
university performance 19, 22, 29
unskilled-labor 148

V

value of the firm 128, 130
variabel makro ekonomi 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83
Vector Auto Regression (VAR) 72, 75, 76, 78, 81, 82

DAFTAR ISI

Trikonomika, Volume 10, No. 1, Juni 2011

An Analysis of Demographic Characteristics and Female Workers Productivity Toward Family Income
Haryadi 1–9

Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat
R. Abdul Maqin 10–18

Orientasi dan Strategi Pemasaran dalam Menciptakan Keunggulan Posisional serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi
Agus Supandi Soegoto 19–30

Pengaruh *Financial Leverage*, *Earnings per Share*, dan *Dividend per Share* Terhadap Harga Saham
Ellen Rusliati, Galih Prasetyo 31–39

Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo
Herwin Mopangga 40–51

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Elvira Zeyn 52–62

Keterbukaan Ekonomi Sektor Perikanan di Provinsi Maluku: Aplikasi *Error Correction Model* (ECM)
Yerimias Manuhutu, Fenty Yoseph M, Vera Pauline K 63–71

DAFTAR ISI

Trikonomika, Volume 10, No. 2, Desember 2011

Keseimbangan Jangka Panjang antara Variabel Makro Ekonomi dengan Indeks Harga Saham
R. Adisetiawan 72–84

Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita
Saparuddin M. 85–94

Analisis Penawaran Tenaga Kerja Dosen PTN di Luar Tugas Pokok PNS
Madris 95–104

Determinan dan Strategi Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi
Caska 105–115

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur *Audit*
Deddy Supardi 116–127

Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Perusahaan *Go Public* Berbasis Pendekatan *Multinomial Logit*
Jaja Suteja 128–138

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar
Zulki Zulkifli Noor 139–147

Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia
Tete Saepudin 148–161

Keterjangkauan Perumahan di Indonesia
Endang Rostiana 162–175

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah belum pernah dipublikasikan atau dalam proses penyuntingan dalam jurnal ilmiah atau dalam media cetak lain.
2. Naskah diketik dengan spasi 1½ pada kertas ukuran A4 dan pias 2,5 sentimeter dengan huruf *Times New Roman* berukuran 11 point. Naskah diserahkan dalam bentuk cetakan sebanyak 2 eksemplar disertai *file* dalam CD atau dapat dikirim melalui *e-mail* kepada redaksi.
3. Melampirkan surat pernyataan tidak plagiat.
4. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan jumlah isi 10–25 halaman A4 termasuk daftar pustaka.
5. Naskah berupa artikel hasil penelitian terdiri dari komponen: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka dan ucapan terima kasih (jika ada).
6. Daftar pustaka terdiri dari acuan primer (80%) dan sekunder (20%). Acuan primer berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, sedangkan acuan sekunder berupa buku teks.
7. Naskah berupa artikel konseptual terdiri dari komponen: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan ucapan terima kasih (jika ada).
8. Judul harus menggambarkan isi artikel secara lengkap, maksimal terdiri atas 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam bahasa Inggris.
9. Nama penulis disertai dengan asal lembaga tetapi tidak disertai dengan gelar. Penulis wajib menyertakan biodata penulis yang ditulis pada lembar terpisah, terdiri dari: alamat kantor, alamat, dan telepon rumah, Hp. dan *e-mail*.
10. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak memuat ringkasan esensi hasil kajian secara keseluruhan secara singkat dan padat. Abstrak memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak diketik spasi tunggal dan ditulis dalam satu paragraf.
11. Kata kunci harus mencerminkan konsep atau variabel penelitian yang dikandung, terdiri atas 5–6 kata.
12. Pendahuluan menjelaskan hal-hal pokok yang dibahas, yang berisi tentang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoritik yang relevan. Penyajian pendahuluan dalam artikel tidak mencantumkan judul.
13. Metode meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, yang diuraikan secara singkat.
14. Hasil menyajikan hasil analisis data yang sudah final bukan data mentah yang belum diolah.
15. Pembahasan merupakan penegasan secara eksplisit tentang interpretasi hasil analisis data, mengaitkan hasil temuan dengan teori atau penelitian terdahulu, serta implikasi hasil temuan dikaitkan dengan keadaan saat ini.
16. Pemaparan deskripsi dapat dilengkapi dengan gambar, foto, tabel, dan grafik yang semuanya mencantumkan judul, dan sumber acuan jika diperlukan.
17. Istilah dalam bahasa Inggris ditulis dalam huruf miring (*italic*).
18. Ucapan terima kasih ditujukan kepada mereka (individu, organisasi, dan institusi) yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penulisan.
19. Pencantuman nama penulis dalam pengacuan (kutipan) dan daftar pustaka mengikuti sistem penulisan yang disyaratkan oleh redaksi Trikonomika.
20. Editing terakhir dilakukan oleh redaksi.
21. Trikonomika memiliki hak penuh dalam mempublikasikan artikel di *website* Trikonomika dan Portal Garuda (http://garuda.kemdiknas.go.id atau http://garuda.dikti.go.id).

Teknik Penulisan Daftar Kutipan

- Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun. Jika ada dua pengarang, perujukan dilakukan dengan menyebut nama akhir kedua pengarang. Jika pengarangnya lebih dua orang, perujukan dilakukan dengan menulis nama akhir pengarang pertama diikuti dengan *et. al.*
- Nama pengarang disebut terpadu dalam teks, sehingga yang ditulis di dalam kurung hanya tahun

dan halaman, yang ditulis (tahun:halaman)

Contoh:

a. Gunadi (2005:4) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah jika Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

b. Gitman (2006:325) *Capital structure is one of the most complex areas of financial decision making because of its interrelationship with other financial decision variables.*

- Nama pengarang tidak terpadu dalam teks, sehingga nama pengarang ditulis dalam tanga kurung bersama-sama dengan tahun dan halaman, yang ditulis (nama pengarang, tahun:halaman)

  Contoh:

  Tingkat suku bunga seringkali digambarkan sebagai harga dari kredit kredit (Thomas, 1997: 79).

- Pengarang terdiri dari dua orang

  Contoh:

  Pengalaman akan memberikan *feed back* yang berguna terhadap bagaimana sesuatu dilakukan secara lebih baik (Brouwman and Bradley, 1997:121)

- Pengarang lebih dari dua orang

  Contoh:

  Manajer harus memilih struktur modal yang mereka percaya akan mempunyai nilai perusahaan yang paling tinggi, karena struktur modal ini akan sangat bermanfaat bagi pemegang saham (Ross, *et. al.*, 2001).

- Jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berbeda, maka cara penulisan sumber kutipan itu adalah:

  Contoh:

  Jika dihubungkan dengan penelitian terdahulu yang telah menguji laba operasi dan laba agregat hasilnya konsisten, di mana laba operasi memiliki daya prediksi yang lebih kuat dan direaksi oleh pasar lebih kuat dibandingkan dengan laba agregat (Ball & Brown, 1968; Beaver, 1968; Brown & Sivakumar, 2001; Butar-butar, 2004; Febriyanti, 2005; Finger, 1994; Foster, 1977; Lipe, 1986; Ou, 1990; Strong & Walker, 1993; Swaminathan & Weintrop, 1991).

- Jika sumber kutipan adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, maka cara penulisannya adalah dengan menambahkan huruf a, b, dan seterusnya pada tahun penerbitan.

  Contoh:

  (Bathur, 1990a, 1990b)

- Catatan kaki tidak untuk menuliskan daftar kutipan atau rujukan. Catatan kaki hanya untuk menambahkan informasi yang penting atau penjelasan lanjut dari suatu topik.

Teknik Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dan kronologis berdasarkan jenis sumber yang digunakan. Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut.

a. Nama penulis, dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan (disingkat). Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia.

b. Tahun penerbitan, judul sumber tulisan yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada, dan nama penerbit.

c. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau satu tab pada komputer.

d. Cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis sumber yang digunakan adalah sebagai berikut.

   1) Jika sumbernya berupa jurnal, setelah nama jurnal (diketik miring), diikuti koma kemudian nomor volume, lalu nomor edisi yang ditulis dalam tanda kurung kemudian diikuti titik dua dengan halaman.

      Ndubisi, N. O. 2007. Relationship Marketing and Customer Loyalty. *Marketing Intelligence and Planning*, 25(1):98-106.

   2) Jika bersumber buku:

      a) Jika buku ditulis seorang saja:

         Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley and Sons, Inc.

      b) Jika buku ditulis oleh dua atau tiga orang, maka semua nama harus ditulis dan nama penulis kedua dan seterusnya tetap dibalik, nama kota dan nama

penerbit:

Kotter, J. P. and Heskett, J. L. 1992. *Corporate Culture and Performance*. Canada: Maxwell Macmillan.

c) Jika buku ditulis oleh lebih dari tiga orang, digunakan *et. al*. (dicetak miring atau digarisbawahi):

Hart, K. *et. al*., 1985. *Celsea Diagnostic Test*. Winsdor: NFER-Nelson.

d) Jika penulis sebagai penyunting:

Boe, E.E. and Gilford, D.M. (Eds). 1992. *Teacher Supply, Demand, and Quality: Policy Issues, Models, and Data Bases. Washington, DC*: National Research Council.

e) Jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang:

Pujianto. 1984. Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia, dalam. *Dialog Manusia, Filsafat, Budaya, dan Pembangunan*. Malang: YP2LPM.

f) Jika buku itu berupa edisi:

Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics* (4th edition). New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis* (Edisi ke-9). Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

3) Jika bersumber di luar jurnal dan buku

a) Berupa skripsi, tesis, atau disertasi

Ashtahyam, A.D. 2002. *Upaya Peningkatan Prestasi Siswa dalam Persekolahan Terpadu yang Guru-gurunya pada Umumnya Guru Praktek*. Disertasi Doktor PPS UNK, Bandung: tidak diterbitkan.

b) Berupa publikasi departemen:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kebijaksanaan Umum Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Dep-diknas.

c) Berupa dokumen:

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 1983. *Laporan Penilaian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru*. Jakarta: Depdikbud.

d) Berupa makalah:

Djojonegoro, W. 1996. *Pengembangan Pendidikan dalam Era Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Jabatan Guru*. Makalah pada Seminar Nasional Wawasan Profesi Guru Tahun 2000, tanggal 21 Desember 1996. Surabaya: Tidak diterbitkan.

e) Berupa surat kabar:

Niels, M. 1998. Masyarakat Madani Tak Bisa Andalkan Nilai Jawa. *Kompas* (29 Nopember 1998).

4) Jika bersumber dari internet:

a) Jika karya perorangan, cara penulisannya ialah:

Pengarang/penyunting. Tahun. Judul (edisi), [jenis medium]. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses].

b) Jika bagian dari karya elektrik, cara penulisannya ialah:

Pengarang/penyunting. Tahun. Judul (edisi), [jenis medium]. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

c) Jika artikel dalam jurnal, cara penulisannya ialah:

Pengarang. Tahun. Judul. Nama Jurnal [jenis media], volum (terbitan), halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

Contoh:

Supriadi, D. 1999. *Restructuring the Schoolbook Provision System in Indonesia. Some Recent Initiatives. Dalam Educational Policy Analysis Archieves* [Online], 7(7):12. Tersedia: http://epaa.asu.edu/epaa/v7n7.html [18 April 2002].

BERITA PERNGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:

- ○ Rp. 100.000,00,- untuk langganan 1 tahun (per tahun), mulai Volume .....

  Nomor ..... Tahun ..... .

- ○ Uang tersebut telah saya kirimkan melalui: Bank Mandiri Cabang Dago,

  Rekening Nomor: 131 000 778877 3 a.n. FE Unpas.

- ○ Pos Wesel dengan Resi Nomor ..... tanggal ..... .

..... gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi Jurnal Ilmiah *Trikonomika* FE Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 6–8, Telp. (022) 4233646 Fax. (022) 4208363 Bandung 40116, http://www.unpas.ac.id/ *E-mail*: Trikonomika@yahoo.com

FORMULIR BERLANGGANAN JURNAL TRIKONOMIKA

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Ilmiah *Trikonomika*

Nama : .....

Alamat : .....

... .(Kode Pos .....).

....., ...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIPERBANYAK